

# **ANTARADHIN**

## **DALAM PERSPEKTIF PERDAGANGAN KONTEMPORER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMINDAHAN HAK KEPEMILIKAN**

## **UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

### Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# **ANTARADHIN**

## **DALAM PERSPEKTIF PERDAGANGAN KONTEMPORER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMINDAHAN HAK KEPEMILIKAN**

Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.





deepublish | publisher

Jl. Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl. Kaliurang Km. 9,3 – Yogyakarta 55581  
Telp/Faks: (0274) 4533427  
Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)  
[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)  
e-mail: [deepublish@gmail.com](mailto:deepublish@gmail.com)

---

### Katalog Dalam Terbitan (KDT)

---

**RUSFI, mohammad**

Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan  
Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan /oleh Mohammad  
Rusfi.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Oktober 2016.

viii, 108 hlm.; Uk:15.5x23 cm

ISBN 978-Nomor ISBN

1. Klasifikasi Buku

I. Judul

No.DDC

Hak Cipta 2016, Pada Penulis

---

Desain cover : Herlambang Rahmadhani

Penata letak : Haris Ari Susanto

**PENERBIT DEEPUBLISH**  
**(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Copyright © 2016 by Deepublish Publisher

All Right Reserved

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah buku ini selesai tanpa hambatan yang berarti, meskipun terdapat kekurangan disana sini. Kekurangan tersebut diharapkan dapat memicu kreativitas penulis untuk lebih menyempurnakannya. Buku ini diangkat dari tesis penulis ketika menyelesaikan studi pasca sarjana di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Prinsip antaradhin dalam hukum jual beli dan implikasinya terhadap pemindahan hak kepemilikan dalam proses perubahan sosial”. Setelah direvisi dengan mempertimbangkan probahan social dewasa ini serta efesiensi kalimat maka judulnya diroboh dengan tidak mengurangi ide dasar dari thesis tersebut dengan judul “Antaradhin dalam perspektif perdagangan kontemporer dan implikasinya terhadap pemindahan hak kepemilikan” dan diterbitkan dalam bentuk buku ini

Ide dasar dari buku ini dipicu oleh realitas sosial yang berkembang dimasyarakat adanya pemindahan hak yang tidak lagi mengindahkan prinsip suka sama suka (antaradhin). Hal ini dapat ditemukan pada tataran ganti rugi tanah rakyat oleh pemerintah ketika tanah itu akan digunakan untuk kepentingan yang lebih besar seperti pembuatan jalan, lapangan golp, perluasan pasar dan lain sebagainya. Sebagai akibat dari prilaku hukum yang menyimpang tersebut muncullah sikap ambivalence dan brutalisme yang tumbuh dengan suburnya di era reformasi ini.

Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut mempengaruhi hasil ijtihad ulama masa silam dalam hal aflikasi prinsip suka sama suka dalam jual beli. Bila ulama masa silam menetapkan sahnya jual beli adanya suka sama suka dengan bukti penuturan lapas menjual dan membeli, maka pada perkembangan perdagangan dewasa ini tidak lagi terpaku pada ketetapan tersebut. Hal ini nampak jelas ketika jual beli di mall,super market,internet dan lainnya.

Perkembangan tersebut, sangat mempengaruhi kehidupan sosilal masyarakat terutama dibidang hak kepemilikan dan pemindahan hak

kepemilikan itu. Yang menjadi persoalan mendasar adalah bagaimana menerapkan prinsip suka sama suka (*an taradhain*) dalam jual beli dan bagaimana implikasinya terhadap pemindahan hak kepemilikan. Untuk itu buku ini menjelaskan tentang persoalan tersebut berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Buku ini diharapkan dapat memberi inspirasi bagi para penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan ketika hak-hak mereka terabaikan terutama ketika terjadi gantirugi tanah oleh pemerintah.

Selain itu buku ini juga dimaksudkan untuk menambah khazanah pengetahuan dibidang hukum muamalah dalam menerapkan dan merekonstruksi pemikiran suka sama suka (*antaradhin*) dalam hukum jual beli.

Disadari kekurangan disana sini tentu masih mewarnai buku ini. Untuk itu, kritikan konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaanya. Semoga buku ini akan bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya. Amien

Bandar Lampung, 15 September 2016  
Penulis

Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	5
C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II     HARTA DALAM PANDANGAN ISLAM .....</b>	<b>8</b>
A.    Hak Allah dan Hak Hamba .....	8
B.    Nilai-Nilai Universalitas dalam Pemindahan Hak .....	14
<b>BAB III    ‘AN TARADHIN DALAM PERSPEKTIF             KONTEMPORER .....</b>	<b>23</b>
A.    Pengertian ‘An Taradhin .....	23
B.    ‘An Taradhin dalam Pandangan Ulama Salaf.....	24
C.    ‘An Taradhin dalam Praktik .....	33
<b>BAB IV    HAK INDIVIDU DAN KETIMPANGAN             SOSIAL DALAM MASYARAKAT .....</b>	<b>38</b>
A.    Hak Individu .....	38
B.    Ketimpangan Sosial.....	40
C.    Beberapa Pendekatan dalam Memandang Ketimpangan Sosial.....	51
1.    Pendekatan Pasivisme - Religious.....	51
2.    Pendekatan Skularisme – Kapitalis .....	54

3.	Pendekatan Materialisme – Komunis. ....	58
D.	Konsepsi Islam dalam Menanggulangi Ketimpangan Sosial .....	61
<b>BAB V</b>	<b>IMPLIKASI ANTARADHIN TERHADAP PEMINDAHAN HAK KEPEMILIKAN .....</b>	<b>69</b>
A.	Sistem Pemindahan Hak Milik.....	69
1.	Waris dan Wasiat.....	70
2.	Infaq dan Shadaqah.....	75
3.	Jual Beli dan Riba.....	78
B.	Status Hukum Bagi Hak Milik Yang Dipindah Tangankan Tanpa antaradhin .....	88
1.	Jual Beli Tanpa Sukarela.....	88
2.	Ganti Rugi Tanah Rakyat Oleh Pemerintah.....	96
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>103</b>
	DAFTAR PUSTAKA .....	105
	RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	107



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

Prinsip suka sama suka (*mutual consent or agreement*) atau lebih dikenal dengan istilah *prinsip an taradhin*, merupakan salah satu prinsip yang di tetapkan Allah dalam al-quran untuk diberlakukan dalam berbagai bentuk mu'amalah terutama dalam jual beli. Perinsip ini berdasarkan firman Allah (Q.S. al-Nisak : 29) berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dalam hukum Islam dikenal bahwa diantara syarat sahnya jual beli adalah *ijab* dan *qabul* secara suka sama suka, pembeli suka menerima barang yang dibelinya, dan penjualpun suka melepaskan barang yang dijualnya. Akan tetapi, suka sama suka itu merupakan sifat yang tersembunyi di dalam hati, dan orang lain tidak dapat mengetahuinya kecuali dengan tanda-tanda (*qarinah*).

Oleh karenanya, menurut imam Syamsudin Muhammad bin Abi Abbas dalam mazhab Syafi'iyah, sebagai tanda bahwa jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka adalah *ijab* dan *qabul* melalui lafadz yang dituturkan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), *ijab* dari penjual dan *qabul* dari pembeli seperti “saya jual barang ini kepadamu

dengan harga...’’ kata penjual. Lalu pembeli menerimanya dengan ucapan lafadz “saya terima membeli barang ini darimu dengan harga sekian .....’’<sup>1</sup> Hal semacam ini perlu dilakukan sebab *ridha* itu merupakan sifat yang tersembunyi di dalam hati, dan kita tidak tahu kecuali dengan lafadz yang diucapkan sebagai bukti keridhaanya itu.<sup>2</sup>

Apabila prinsip suka sama suka harus dibuktikan dengan pengucapan lafadz menjual dan membeli yang dituturkan oleh penjual dan pembeli ketika terjadi *ijab* dan *qabul*, seperti yang dimaksudkan oleh imam Syamsudin tersebut di atas, nampaknya tidak relevan lagi dengan perkembangan perdagangan kontemporer yang menggunakan sistem mall dan supermarket, sebab dengan sistem ini pembeli dapat memilih barang yang diinginkan dan membayar harganya sesuai dengan yang tertera pada label barang, bahkan sistem pembayarannya pun dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit meskipun tanpa bicara. Masalahnya apakah *ijab* dan *qabul* semacam ini sudah termasuk pengertian *an-taradhin* sebagaimana yang dikehendaki oleh al-quran pada ayat tersebut di atas.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, corak penerapan prinsip suka sama suka mengalami pergeseran bila dibandingkan dengan konsep yang ditetapkan oleh ulama salaf. Bila penerapan suka sama suka secara konseptual dibuktikan dengan *talafudz*, maka realitas menunjukkan bahwa konsep tersebut ternyata sering tidak berlaku, bahkan bukan saja konsep *talafudz* telah terabaikan, malah prinsip suka sama suka itu sendiri sering dilanggar. Kenyataan tersebut akan sangat jelas terlihat manakala bersinggungan dengan kepentingan penguasa dan pengusaha, sebut saja ganti rugi tanah rakyat dengan dalih demi kepentingan umum dan pembangunan.

Menanggapi berbagai bentuk perilaku hukum yang menyimpang tersebut, maka sikap dan perilaku masyarakat pun ikut berubah. Kalau tadinya bersikap apatis, akhirnya berubah menjadi agresif, dari budaya sopan santun menjadi brutal dan premanisme. Dengan demikian terjadilah

---

<sup>1</sup> Syamsudin Muhammad bin Abi Abbas, *Nihayatu al-Muhajjat ila syarhi al-Minhaj*, Daru al-fikri, Beirut 1984 jilid III hal. 378

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.375

perampasan sebagai upaya untuk menuntut hak mereka yang sebelumnya telah diambil alih oleh pihak-pihak tertentu dengan mengabaikan prinsip suka sama suka tadi.

Walaupun judulnya “*ganti rugi*” namun yang dirasakan tidak jauh berbeda dengan “perampasan hak” juga. Kalau sudah begitu, siapa sebenarnya yang disalahkan? penguasa yang salah mendidik rakyatnya, atau rakyat yang salah menerima pendidikan dari penguasanya. Kita tidak perlu mengambil keputusan siapa yang salah dan siapa yang benar, namun yang pasti aturan hukum tidak ditaati menurut yang semestinya.

“Ganti rugi” agaknya satu nafas dengan jual beli, meskipun sebutannya berbeda namun keduanya ibarat masih satu tubuh, yaitu *mu’amalat*. Dalam *mu’amalat* berlaku prinsip universal yang disebut prinsip suka sama suka (*an taradhain*). Akan tetapi ketika dilakukan pembebasan tanah rakyat oleh pemerintah, prinsip ‘an taradhin sering kali terabaikan, seperti ketika akan dilakukan pembuatan jalan, lapangan golf, perluasan pasar, pelastarian hutan lindung dan lain sebagainya.

Dengan landasan kepentingan umum serta berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>3</sup> Pemerintah punya kewenangan untuk mengambil alih tanah milik rakyat. Akan tetapi, ketika tanah rakyat itu akan digunakan untuk kepentingan seperti tersebut diatas pemiliknya tidak mendapatkan penggantian yang setimpal bahkan ada yang tidak dibayar sama sekali.

Kasus semacam ini banyak melanda masyarakat kecil seperti yang dialami warga Teluk Pucung Bekasi beberapa tahun silam yang sampai tahun 1999 kasus tersebut belum terselesaikan.<sup>4</sup>

Kasus diatas menunjukkan bahwa prinsip antaradhin sebagai unsur penting keabsahan pemindahan hak kepemilikan, tidak ditempatkan pada

---

<sup>3</sup> Edisi lengkap *Ketetapan MPR RI 1999, GBHN, UUD 1945 dan perubahan pertama UUD 1945*, Penerbit Citra Umbara Bandung, 1999 hal. 143

<sup>4</sup> Baca : Majalah berita Mingguan; *UMMAT*, No. 41 Tahun ke IV tanggal 26 April 1999, hal. 67

proporsi yang sesungguhnya, bahkan cenderung diabaikan. Padahal ketentuan hukum menurut al-Quran sahnya pemindahan hak itu manakala dilakukan atas prinsip suka sama suka. Prinsip ini merupakan syarat keabasan pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain, dan al-Quran melarangnya dengan cara-cara bathil. ***“janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara bathil”***. (Q.S : al-Nisak : 29)

Pegertian “memakan harta” tentu bukan hanya dalam arti harfiah, sebab tidak semua harta atau benda dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut, tetapi lebih mengarah kepada pengambil alihan atau pemindahan hak seseorang kepada orang lain. Larang memakan harta orang lain itu terjadi bila dilakukan dengan cara-cara bathil. Artinya cara-cara yang dilakukan dengan melawan hukum, atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik ketentuan itu berasal dari al-Quran dan al-Hadits, maupun ketentuan-ketentuan pemerintah yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, seperti jual beli, tukar menukar barang, sewa menyewa, gadai menggadai, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat 29 surat al-Nisak itu mengatakan: *“bahwa yang dimaksud dengan memakan harta tersebut adalah segala bentuk usaha yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti riba, penipuan dan lain sebagainya”*.<sup>5</sup>

Salah satu pemindahan hak yang dibenarkan adalah *tijarah*, (*Illa an-takuna tijarah*). *Tijarah* disini dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi terapan yang meliputi semua jenis mu’amalat yang berlaku pada masyarakat, mulai dari jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai menggadai, perbankan, jasa, dan lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut harus memperhatikan prinsip suka sama suka.

Apabila prinsip suka sama suka ini diabaikan, maka pemindahan hak kepemilikan dikategorikan sebagai memakan harta secara bathil. Ini akan berdampak batalnya pemindahan hak tadi. Pada masyarakat yang masih dalam tahap proses perubahan sosial, prinsip suka sama suka itu sering kali terabaikan. Kenyataan ini sering terjadi ketika pemerintah atau

---

<sup>5</sup> Lihat: al-Qurtubi, *CD al-Quran dan al-Hadits 650*

kelompok tertentu membutuhkan tanah untuk pelebaran jalan, pembuatan lapangan golf, perluasan pasar, pelestarian alam dan sebagainya.

Barang kali inilah yang dikategorikan kedalam larangan Allah yang menyatakan; ***Janganlah kamu membunuh dirimu***". Membunuh artinya mematikan, yang dapat dipahami sebagai langkah untuk menghentikan kehidupan, baik kehidupan jiwa, budaya, kehidupan sosial dan kehidupan beragama. Jadi, apabila pemindahan hak dilakukan tidak secara suka sama suka berarti termasuk perbuatan bathil karena akan dapat mematikan kehidupan usaha atau perekonomian. Itulah sebabnya al-Quran sangat menekankan prinsip suka sama suka dalam kegiatan perekonomian khususnya jual beli.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka ganti rugi tanah menarik untuk dikaji, sebab pada umumnya yang dilakukan selama ini banyak yang tidak mengindahkan prinsip suka sama suka. Demikian pula halnya jual beli kontemporer yang tidak lagi sejalan dengan pemahaman antaradhin masa klasik, dengan menuturkan lafaz menjual dan membeli ketika terjadi ijab dan qabul karena penjual hanya memasang tarif pada barang jualannya dan memberi kebebasan pada konsumen untuk membeli atau tidak.

Masalahnya, apakah pengertian antaradhin sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama salaf masih relevan untuk diterapkan pada perdagangan dewasa ini, atau ada pemahaman lain dari antaradhin itu sehingga dapat realistis untuk diberlakukan dalam menghadapi segala bentuk perubahan sosial, dan apakah pemindahan hak milik tanpa antaradhin seperti pada kasus ganti rugi tanah sah menurut hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: *"Bagaimana menerapkan prinsip antaradhin pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial"*, dengan tiga pokok masalah :

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap harta.
2. Bagaimana menerapkan prinsip antaradhin dalam perspektif kontemporer.
3. Bagaimana implikasi antaradhin terhadap pemindahan hak kepemilikan.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk merekonstruksi pemahaman antaradhin dalam hukum jual beli, sehingga dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan perdagangan diabad modern ini. Namun secara khusus penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui kegunaan harta dalam pandangan Islam, serta hak seorang hamba dalam memiliki harta tersebut. Dengan demikian diharapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan secara hukum dalam bermu'amalah khususnya jual beli dapat lebih diperhatikan oleh para konsumen maupun produsen sehingga manakala terjadi persoalan hukum antara konsumen dan produsen maka dengan mudah para hakim dapat menentukan hukumnya.
- b. Untuk mengetahui pemahaman prinsip antaradhin dalam pandangan ulama salaf, guna mencari pemahaman yang lebih komprehensif agar prinsip antaradhin itu dapat sejalan dengan perdagangan kontemporer.
- c. Untuk mengetahui kedudukan hukum bagi harta yang dipindah tangankan tanpa prinsip antaradhin. Hal ini dirasa perlu, karena seiring dengan terjadinya perubahan-perubahan sosial dewasa ini sering kali prinsip antaradhin itu tidak lagi mendapat perhatian yang semestinya, sehingga menciptakan ketimpangan-ketimpangan sosial ditengah kehidupan masyarakat.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ummat Islam secara umum, khususnya dikalangan praktisi hukum Islam (hakim) dalam menetapkan hukum bagi kasus-kasus pemindahan hak milik seperti jual beli dan ganti rugi tanah rakyat oleh penguasa atau pengusaha.
- b. Selain itu diharapkan juga dapat berguna bagi kalangan akademisi dalam rangka mengembangkan makna 'an taradhin pada khazanah pengetahuan perekonomian dewasa ini. Sebab dengan mengetahui pengertian antaradhin dalam pemahaman ulama salaf dan pengertiannya secara konprehensif menurut tataran ekonomi modern diharapkan dapat berguna bagi para penegak hukum dan akademisi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi yang Islami, dan dapat diterapkan dalam perekonomian kontemporer terutama dalam menghadapi ekonomi global dan perdagangan bebas dimasa mendatang, sehingga pemahan antaradhin lebih realistis dan dapat digunakan untuk mengukur keabsahan suatu transaksi jual beli.
- c. Tulisan ini juga diharapkan dapat berguna bagi para ekonom dalam mengkomparasikan ilmu-ilmu ekonomi umum dan ekonomi Islam, sehingga tercipta solusi alternatif dalam menerapkan perekonomian di indonesia, yang diharapkan pula akan tercapai kemakmuran dan keadilan yang dapat dirasakan semua pihak terutama oleh rakyat kalangan bawah yang selama ini kurang menikmati pelayanan ekonomi yang seimbang.

## BAB II

### HARTA DALAM PANDANGAN ISLAM

#### A. Hak Allah dan Hak Hamba

Harta merupakan kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya sebagai sarana kehidupan dalam rangka beribadah kepada-Nya. Islam menempatkan manusia sebagai pemegang “amanah” terhadap harta. Artinya harta yang ada ditangan manusia tidak lebih dari amanah Allah, karena pemilik yang sesungguhnya hanyalah Allah SWT. Yusuf Qardhawi mengatakan; “Di antara nilai-nilai agung dan istimewa yang menjadi pusat nilai Ilahiyah dalam ekonomi Islam adalah nilai yang menetapkan bahwa sesungguhnya manusia yang memiliki harta itu adalah “wakil” dalam harta Allah”<sup>6</sup>.

Konsep ini memperkuat karakteristik Ilahiyah dalam ekonomi Islam. Seorang muslim yakin bahwa dia adalah makhluk Allah, Ia bekerja di muka bumi Allah, dengan kemampuan yang dianugerahkan Allah, dengan alat-alat yang dikaruniakan Allah, dan sejalan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Apabila setelah itu seorang muslim memperoleh harta, maka dia hanyalah pemegang amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki dari harta tersebut, karena Allah yang menjadikannya, dan Allah pula yang memeliharanya.

Pengertian bahwa manusia sebagai wakil dan pemegang amanah dari Allah atas harta yang dimilikinya, karena sesungguhnya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi pada dasarnya hanyalah milik Allah;

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Terjemahan Didin Hafidhuddin, dkk. Dari Judul Asli: *Daurul Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishod al-Islami*. Robbani Press Jakarta, cet. I, th. 1997 hal. 39



لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

**Artinya:** Kepunyaan-Nya lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan semua yang ada di antara keduanya serta semua yang ada dibawah tanah. (Q.S . Thaha : 6)

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ (يونس: 66)

**Artinya:** Ingatlah ! Sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. (Q.S.Yunus : 66).-

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. (سبأ: 22)

**Artinya:** Katakanlah! Panggillah mereka yang kamu dakwakan (sebagai Tuhan) selain Allah. Mereka tidak punya kekuasaan sebesar zarrahpun di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai bagian (saham) pada keduanya, sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya. (Q.S : Saba': 22).

Selain ayat tersebut di atas, masih banyak ayat al-Quran yang menyatakan bahwa semua apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, karena Dia-lah yang menciptakannya, Dialah yang memilikarannya, dan Dia pula yang mengatur semua yang ada. Manusia hanya penerima amanah untuk memanfaatkan apa yang ada atas izin-Nya. Allah berfirman;

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (الحديد : 7)

**Artinya:** Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah

*menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebahagian dari hartanya) bagi mereka pahala yang besar. (al-Hadid : 7)*

Dalam menafsirkan ayat 7 Surat al-Hadid ini, Yusuf Qardhawi mengutip pendapat pengarang kitab al-Kasysyaf yang mengatakan bahwa “harta yang ada di tanganmu itu adalah harta Allah yang diciptakan dan dikembangkan-Nya. Allah memberikan harta tersebut kepadamu dan mengizinkannya untuk kamu nikmati. Allah menjadikan kamu sebagai khalifah – khalifah yang bisa mengelola harta. Karena itu, harta bukanlah harta kamu. Kedudukanmu dalam harta itu hanyalah *sebagai wakil dan pemegang amanat*. Infaqkanlah harta itu pada hak-hak Allah, Ringankanlah tanganmu untuk menginfakkannya sebagaimana seseorang menginfakkan harta orang lain dengan sangat ringan”.<sup>7</sup>

Sebagai konsekwensi dari wakil dan pemegang amanah, manusia tidak sepatasnya berlaku sombong kepada orang lain dengan harta yang ada padanya, karena sesungguhnya harta itu bukan miliknya, tetapi milik Allah yang dititipkan kepada manusia untuk sementara waktu. Suatu saat nanti harta itu akan diambil kembali oleh pemilik yang sesungguhnya. Pujangga Arab berkata;

وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدَائِعٌ : لَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ<sup>8</sup>

**Artinya:** *Harta dan keluarga hanyalah titipan, suatu saat nanti mesti dikembalikan pada yang menitipkannya.*

Manusia sebagai pemegang amanah hanya memiliki “**Hak Guna Pakai**” dari harta yang dititipkan Allah kepadanya, bukan hak milik secara hakiki. Prinsip ini bukan saja mengajarkan kepada manusia untuk menginfakkan sebahagian hartanya secara ringan, tetapi juga mengikat manusia dengan kehendak pemilik harta yang sesungguhnya. Wakil tidak punya hak lain kecuali melaksanakan kehendak pihak yang memberikan perwakilan dan memenuhi permintaannya, wakil tidak boleh bertindak

---

<sup>7</sup> Ibid : hal. 45

<sup>8</sup> Syekh Muhammad Djamil, *Tadzkiratu al-Qulub*, Sa'diyah Putera Padang Panjang, 1977 hal. 14

sendiri sesukanya. Jika tidak, maka perwakilannya akan batal dan tidak layak menerima hak perwakilan karena melampaui kewenangannya.

Kewenangan manusia untuk mengatur harta benda yang ada di atas dunia ini berpangkal dari perannya sebagai “khalifah Allah”. Oleh karena itu kesejahteraan tidaklah berhenti pada benda itu sendiri, tetapi sebuah tujuan agar manusia bisa secara efektif mempertanggung jawabkan peranannya sebagai khalifah Allah. Pernyataan ini dapat difahami dari firman Allah; (Q.S:al-Baqarah:30)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

**Artinya:** *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi.*

Allah telah menetapkan tujuan dan penggunaan hak milik itu menurut *sunnatullah* (secara alamiah) baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan sosial dari dimensi kolektif kemanusiaan. Oleh karena itu, hak kepemilikan harta yang ada di tangan manusia dapat dibedakan kepada dua kategori, yaitu hak *kepemilikan hakiki*, dan *hak kepemilikan majazi*.

Hak kepemilikan hakiki adalah Allah SWT. Dialah yang menciptakan, Dialah yang mengatur dan menjaganya. Sedangkan hak kepemilikan manusia hanyalah bersifat majazi dan temporer. Manusia hanya diberi hak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari harta tersebut sebagai sarana kehidupan dalam rangka melaksanakan ibadah kepada-Nya. Apabila manusia menggunakan harta untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, melawan aturan yang telah ditetapkan Allah, maka orang tersebut dikategorikan sebagai kufur nikmat karena tidak mengikuti ketentuan Allah yang menjadi pemilik hakiki dari semua harta.

Dalam pengelolaan harta-harta Allah tersebut, dapat dibedakan kepada dua kategori; *Pertama:* Hak Allah. *Kedua:* Hak Hamba. Hak Allah diwujudkan dalam bentuk hak bersama yang pengelolaannya diserahkan

kepada penguasa / pemerintah. Hak semacam ini dapat disebut sebagai hak negara karena menyangkut kepentingan bersama secara kolektif seperti halnya air, garam, bumi, udara, tambang minyak, batu bara, emas, perak, besi dan lain sebagainya.

Di Indonesia ditetapkan pada pasal 33 UUD 1945 ayat (3) berbunyi; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>9</sup> Penguasaan negara terhadap hak-hak tersebut sebagai perwujudan dari hak Allah, untuk melindungi kehidupan, martabat dan hak milik anggota masyarakat agar tingkat kebebasan bagi semuanya dapat terjamin.

Dari sinilah muncul sejumlah fungsi dan kewajiban sebuah negara terhadap rakyatnya dalam rangka menegakkan keadilan, dan pemerataan distribusi kekayaan bagi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh diskriminatif dalam pembagian harta yang dikelolanya. Dan karenanya pejabat yang diberi amanah untuk mengelola Negara atau perusahaan bukanlah pemilik dari harta Negara tetapi pengemban amanah Allah untuk mengelolah harta Negara guna kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Sedangkan hak hamba – yang dalam istilah sehari-hari disebut hak milik–adalah hak yang diberikan Allah kepada seorang hamba untuk mengelola sepenuhnya terhadap harta tersebut. Hak hamba ini diwujudkan dalam bentuk hak milik secara individu berdasarkan anugerah Allah SWT kepadanya, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا  
(النساء : 32)

---

<sup>9</sup> TAP MPR RI 1999, GBHN 1999 / 2004 dan UUD 1945, Citra Umbara, Bandung, 1999, hal. 143

**Artinya:** Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q. S : al-Nisa': 32)

Hak milik individu ini meskipun pemiliknya diberi kewenang penuh untuk mengelola dan memanfaatkan harta yang dimilikinya, namun pada harta tersebut terdapat pula hak orang lain yang disalurkan Allah lewat orang yang menguasai harta itu. Karenanya pemilik harta harus menyalurkan hak orang lain itu melalui sistem hukum yang telah ditetapkan Allah SWT dengan cara zakat, infaq, sadaqah, hibbah, wakaf, dan hadiah. Allah berfirman;

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ . لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

**Artinya:** Dan orang-orang yang di dalam hartanya tersedia bahagian tertentu bagi orang yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa. (Q.S: al-Ma'arij: 24-25)

Ketentuan ini dimaksudkan agar kekayaan itu dapat merata dan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, sebagai mana firman Allah;

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الحشر: 7)

**Artinya:** Agar harta itu jangan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja di antara kamu. (Q. S : al-Hasyr : 7).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harta sebagai hak hamba dapat dibedakan antara hak individu dan hak masyarakat karena pada harta yang ada di tangan seorang hamba secara individu memiliki nuansa sosial. Oleh karena itu, setiap individu, masyarakat maupun negara memiliki hak atas kepemilikan, sesuai dengan fungsi dan peran yang dimiliki oleh masing-masingnya. Hak kepemilikan dari ketiga agen kehidupan ini – negara, individu dan masyarakat – tidak boleh menjadi sumber konflik

antar mereka, demikian juga tidak dibenarkan penggunaan hak milik suatu agen oleh agen lainnya, seperti halnya juga tidak dibenarkan penggunaan hak milik tersebut untuk membahayakan lainnya.

Suatu pemerintahan Islam memiliki yurisdiksi atas hak-hak individu sebagai wujud dari kekuasaan Allah di muka bumi. Setiap individu tidak boleh iri atas intervensi pemerintah yang dilakukan secara wajar yang menurut pertimbangan syar'iy memang dibutuhkan guna mewujudkan tujuan bersama yang telah diletakkan oleh syari'at.

Untuk mendapatkan dan menggunakan harta yang menjadi hak milik hamba tersebut, Allah telah menetapkan sistem dan aturan yang harus diikuti oleh manusia. Aturan tersebut tertuang di dalam al-Quran dan al-Sunnah Rasul SAW dalam bentuk prinsip dan asas mu'amalat. Berdasarkan prinsip-prinsip dan asas tersebut manusia bisa mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Sebab sangat boleh jadi penetapan hukum sebagai hasil ijtihad para ulama di masa lampau sudah tidak lagi mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh ummat masa berikutnya.

Salah satu prinsip mu'amalat yang harus diikuti, terutama dalam pemindahan hak milik dari suatu agen kehidupan kepada agen lainnya adalah prinsip suka samasuka (*'an taradhin*). Prinsip ini berlaku umum dalam setiap kegiatan ekonomi, terutama dalam hal pemindahan hak milik melalui perdagangan.

## **B. Nilai-Nilai Universalitas dalam Pemindahan Hak**

Diawal pertumbuhan Islam, Rasulullah telah menciptakan kondisi yang memungkinkan ekonomi tumbuh dan berkembang secara cepat, dengan menyatukan unsur-unsur yang terdapat pada kaum muslimin melalui persaudaraan kaum muhajirin dengan anshar sebagai gambaran penjual dan pembeli yang memberi kontribusi terbentuknya pasar Madinah. Meskipun diawal hijrah, Madinah merupakan kota miskin, namun berkat kepiawaian Nabi membina penduduknya, Madinah akhirnya menjadi kota besar dan pusat perdagangan sehingga membuat rakyatnya

menjadi makmur dan mampu memberi kehidupan ekonomi bagi daerah sekitarnya.

Dalam pelaksanaan mu'amalah selain mengacu kepada ketentuan nash, Nabi SAW juga memberikan kebebasan untuk mengembangkan pola ekonomi sesuai dengan perkembangan masyarakat sejauh kebebasan itu tidak bertentangan dengan syari'at baku. Dalam kaitan ini Nabi SAW bersabda; "*Antum a'lamu bi umuri duniyakum*" (kalian lebih tahu tentang urusan duniamu). Dengan demikian syari'at Islam meletakkan kemampuan dan kebebasan akal manusia untuk bermu'amalah, sebab mu'amalah itu bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan evolusi pemikiran, ilmu pengetahuan dan peradaban umat manusia.

Syari'at Islam telah menggariskan nilai universal sebagai batasan kebebasan dalam pemindahan hak kepemilikan khususnya perdagangan. Nilai tersebut tertuang dalam bentuk prinsip, azas dan etika bisnis yang termaktub dalam al-Quran dan al-Hadits. Manusia hanya diberi kebebasan untuk menafsirkan dan mengaplikasikannya dalam rangka mencapai kemaslahatan ummat. Oleh karena itu prinsip dan azas menjadi rujukan. etis bagi para pelaku ekonomi. Juhaya. S. Praja<sup>10</sup> menyimpulkan prinsip-prinsip ekonomi tersebut kedalam 5 (lima) macam prinsip yaitu:

1. Haqq Allah wa Haqq al-Adami,
2. La Yakun Daulatan Baina al-Aghniya',
3. 'An taradhin,
4. Tabaddul al-Manafi',
5. Takafful al-Ijtima'.

*Haqq Allah* mengandung pengertian bahwa ada jenis harta dan kekayaan yang menjadi milik bersama dan harus dikuasai oleh negara dan pemerintah. Sedangkan *Haqq al-Adami* mengandung arti ada harta dan kekayaan yang dapat dimiliki oleh perorangan atau lembaga nonpemerintah. Dalam hal kepemilikan harta yang menjadi *haqq al-Adami*, Allah memberikan batasan-batasan yang menjadi prinsip dan azas

---

<sup>10</sup> Juhaya S. Praja, Prof. DR. *Filsafat Hukum Islam*, LPPM UNISBA, Bandung, 1995, hal. 112

mu'amalah. Prinsip yang kedua mengajarkan bahwa harta tidak boleh hanya beredar dilingkungan orang-orang kaya saja. Artinya dalam hal distribusi kekayaan hendaklah menyebar keseluruh lapisan masyarakat.

Sistem monopoli sumber ekonomi secara individual bertentangan dengan hukum Islam. Islam mengakui adanya hak kepemilikan secara individu, namun kepemilikan bukan untuk memonopoli kekayaan tetapi sebagai jembatan distribusi dalam menyebarkan kekayaan sampai ketingkat paling bawah, baik dengan cara zakat, infaq, sedekah, hibbah, atau dengan cara jual beli dan lainnya sebagai suatu sistem pemindahan hak kepemilikan.

Sistem pemindahan hak kepemilikan harus pula menggunakan prinsip ketiga yaitu *Prinsip 'an taradhin* (suka sama suka). Prinsip ini mengandung makna bahwa pemindahan hak atas harta dilakukan secara sukarela melalui proses jual beli, kewarisan, hibbah, wakaf, shadaqah, infaq, zakat, pinjam meminjam, hutang piutang, gadai, atau sewa menyewa. Tujuannya untuk menghindari pemaksaan kehendak pihak-pihak tertentu kepada orang lain.

Jika pemindahan hak itu dilakukan secara sukarela, berarti harta yang diberikan atau dipindah tangankan itu perlu mempertimbangkan adanya manfaat bagi penerima maupun bagi pemberi, bagi konsumen maupun produsen. Karena itu pemindahan hak harus juga berpegang kepada prinsip *Tabaddul al-Manafi'* sebagai prinsip yang ke-empat dalam hukum mu'amalat ini. Prinsip *Tabaddul al-Manafi'* mengandung arti bahwa pemindahan hak atas harta didasarkan atas manfaat. Oleh karena itu proses transaksi sebagai bentuk pemindahan hak atas harta dan prolehan harta perlu memperhatikan azas-azas mu'amalat berikut ini.

1. **antaradhin**, yaitu suka sama suka tidak boleh ada pihak yang merasa tertipu (*adam al-gharar*).
2. **Tabadulul manafi'**, yaitu saling menguntungkan tidak boleh ada pihak yang menambah beban atas transaksi, terutama dalam bentuk intrest atau rente. (*'adam al-riba*).
3. **Taawwun**, yaitu saling tolong menolong tidak boleh ada unsur judi (*'adam al-maisir*).



4. **Pemerataan**, yaitu harus ada pemerataan baik distribusi maupun komisi, tidak boleh ada unsur penimbunan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga atau monopoli (*'adam al-Ihtiqar wa al-Tas'ir*).
5. **Musyarakah**; Kerjasama yang menguntungkan bagi semua pihak. Karena itu pihak-pihak yang bersangkutan haruslah jujur tidak boleh ada pihak-pihak ambivalence (*Adam al-Khianah*).
6. **Al-Birru wa al-Taqwa**, Asas ini menekankan bahwa bermuamalah itu haruslah selalu mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum Allah dalam rangka mencapai kebaikan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, tidak boleh ada pendurhakaan terhadap ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya. (*Adam al-Takaffur*). Bentuk mu'amalat yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mu'amalat yang terlarang dalam Islam.

Enam macam azas ini terdapat kaitan yang signifikan dengan prinsip *Takafful al-Ijtima'* karena itu terkandung makna bahwa proses lalu lintas pemindahan hak dan kepemilikan atas harta didasarkan pada kesadaran solidaritas sosial untuk saling memenuhi kebutuhan satu pihak dengan pihak-pihak lainnya. Lebih lanjut Juhaya, S. Praja menyatakan bahwa "asas-asas mu'amalat tersebut meliputi pengertian-pengertian dasar yang dapat dikatakan sebagai teori-teori yang membentuk hukum mu'amalat. Asas-asas muamalat ini berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia".<sup>11</sup>

#### Prinsip-prinsip hukum Islam dan Asas mu'amalah

Prinsip hukum Islam	Asas Mua'amalat	
	Positif	Negatif
1. Tauhid	1. Tabaddulul Manafi'	'Adam al-Riba
2. Keadilan	2. Pemerataan	Adam al-Ihtiqar
3. Amar makruf nahi munkar	3. antaradhin	Adam al-Gharar
4. Al-Hurriyah	4. Ta'awun	Adam al-Maisir

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 113

Prinsip hukum Islam	Asas Mua'amat	
	Positif	Negatif
5. Al-Musawah	5. Al-Birru wa al-Taqwa	Adam al-Takaffur
6. Al-Tawun	6. Musyarakah	Adam al-Khianah
7. Al-Tasamuh		

Prinsip dan asas ini laksana rel hukum yang harus dilewati oleh para penegak hukum agar sampai pada tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Salah satu bentuk penjaminan itu adalah dengan memberlakukan prinsip dan asas hukum.

Dibidang harta misalnya berlaku prinsip 'an taradhin ketika terjadi 'aqad dalam pemindahan hak kepemilikan melalui jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan lainnya. 'Aqad menuntut adanya suka sama suka ('an taradhin) bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi. Karena itu prinsip 'an taradhin merupakan salah satu prinsip yang harus ditaati dalam aktifitas ekonomi, terutama dalam transaksi jual beli.

Prinsip suka samasuka ('an taradhin) menjadi prinsip dalam mu'amalat berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Nisa' : 29 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

**Artinya:** Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini memberi petunjuk bahwa 1). Tidak dibenarkan “memakan” harta dengan cara yang bathil, 2). Boleh melakukan perdagangan secara suka sama suka, 3). Tidak boleh melakukan pembunuhan.

Penggunaan istilah *makan* pada ayat tersebut diatas menurut Muhammad Hijazi, karena makan merupakan tujuan utama dari suatu harta; Namun pengertian makan tidak hanya dalam arti harfiah, tetapi juga termasuk mengambil hak orang lain<sup>12</sup>. Larangan memakan harta dengan cara bathil, dapat diartikan tidak boleh melakukan pemindahan hak milik atau mengambil hak orang lain dengan cara melawan hukum, seperti merampok, mencuri, manipulasi, korupsi, menjarah dan lain sebagainya.

Pemindahan hak milik melalui jual beli harus dilakukan dengan cara suka sama suka antara penjual dan pembeli, karena itu suka sama suka merupakan tuntutan hukum yang mesti ditaati oleh pelaku ekonomi agar transaksi dianggap sah secara hukum. Ketentuan ini mengandung filosofis yang dalam, bagi kelangsungan kehidupan perekonomian umat manusia. Kita tidak dapat membayangkan betapa besar konsekwensi negatif yang harus diderita komunitas insani manakala prinsip suka sama suka ini terabaikan, baik dilihat dari sosiologis, psycologis, serta kehidupan ekonomi itu sendiri. Untuk itu Allah menegaskan: *“janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu”*.

Membunuh artinya mematikan, yang dapat dipahami sebagai langkah untuk menghentikan kehidupan, baik kehidupan jiwa, kehidupan usaha, kehidupan ekonomi, kehidupan budaya, kehidupan sosial, dan kehidupan beragama dan lain sebagainya. Jadi, apabila pemindahan hak dilakukan tidak secara suka sama suka berari termasuk perbuatan bathil karena akan dapat mematikan kehidupan usaha atau perekonomian. Itulah sebabnya al-Quran sangat menekankan prinsip suka sama suka dalam kegiatan perekonomian.

Secara pilosofis, prinsip suka sama suka (*‘an tarq<sup>dh</sup>in*) sebagai prinsip niscaya dari diberlakukannya hukum larangan memperoleh dan atau menggunakan harta dengan cara bathil. Pengertian *Al-bathil* menurut al-Khazin adalah segala sesuatu yang oleh syara’ tidak dihalalkan seperti

---

<sup>12</sup> Muhammad Mahmud Hijazi, *al-Tafsir al-Wadhih*, Dar al-Jaiyil, Beirut cet. Ke XI 1993 77 hal. 364

*riba, al-qimar, al-ghashab, al-sirqah, al-khianah, syahadatu al-zur* dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Penyebutan istilah *al-Aklu* (makan) pada surat al-Nisa' 29 hanyalah karena makan merupakan tujuan utama dari adanya harta, namun bukan berarti harta itu hanya untuk dimakan. al-Khazin berkata;

الْأَكْلُ بِالذِّكْرِ وَنَهْيُ عَنْهُ تَنْبِيْهَا عَلَى غَيْرِهِ مِنْ جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ الْوَاقِعَةِ عَلَى وَجْهِ الْبَاطِلِ<sup>14</sup>

**Artinya:** (Yang disebutkan adalah makan, tetapi yang dimaksudkan adalah peringatan untuk melarang semua pengalihan hak dengan cara-cara yang bathil).

Lebih lanjut dikatakan bahwa larangan memakan harta dengan cara yang bathil itu berlaku terhadap harta milik sendiri maupun harta milik orang lain. Memakan harta milik sendiri dengan cara yang bathil maksudnya menggunakan harta tersebut untuk keperluan maksiat, seperti berjudi, membeli minuman keras, atau membeli obat-obatan terlarang (*narkoba*) dan lain sebagainya. Sedangkan memakan harta milik orang lain dengan cara bathil maksudnya melakukan transaksi jual beli atau pemindahan hak atas harta tersebut dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syara' seperti penipuan, pemaksaan, perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan harta milik sendiri atau pengambil alihan hak atas harta orang lain dengan cara-cara yang bathil termasuk perbuatan yang diharamkan dalam hukum Islam.

Penyebutan larangan memakan harta dengan cara yang bathil pada surat al-Nisa' 29 disertai dengan kata "*illa*" sebagai pengecualian (*istisna munqati'*) dan diiringi oleh kata "*an takuuna tijaratan 'an taradhin minkum*" menunjukkan bahwa pemindahan hak itu dapat dibenarkan apabila telah ada kesepakatan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kedua belah pihak yang bersangkutan seperti; dalam jual beli, antara penjual dan pembeli; dalam sewa menyewa, antara penyewa

<sup>13</sup> Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdady, *Tafsir Al-Khazin*, Juz I. Mushthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, Mesir 1955 hal. 512

<sup>14</sup> *Ibid.*

dengan yang menyewa; dalam kontrak kerja, antara majikan dengan pekerja dan lain sebagainya. Dengan demikian penyebutan '*an taradhin*' yang bertarti suka sama suka mengandung hikmah sbb;

1. Bahwa pemindahan hak atas harta baru dibenarkan dan sah menurut hukum apabila dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak. Apabila unsur suka sama suka ini tidak ada maka pemindahan hak atas harta tersebut termasuk bathil yang dihukum haram dan mengakibatkan pemindahan hak atas harta itu tidak sah, sebab sahnya transaksi jual beli akan berdampak pada sahnya kepemilikan barang yang dibeli oleh pembelinya.
2. Menghindarkan adanya penipuan (*al-Gharar*).
3. Menghindarkan pemaksaan kehendak suatu pihak kepada pihak lainnya.
4. Merupakan kebijakan ekonomi dalam menghapuskan praktek riba.

Empat macam hikmah prinsip *taradhin* tersebut diatas menunjukkan betapa pentingnya prinsip itu diterapkan dalam kehidupan ekonomi. Keabsahan misalnya sangat tergantung dengan adanya kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan (penjual dan pembeli) dalam melepas dan menerima barang yang dijadikan obyek jual beli. Hal ini terasa lebih penting lagi manakala dikaitkan dengan hikmah yang kedua yaitu agar tidak terjadi penipuan. Artinya Islam mengajarkan kepada pihak penjual maupun pembeli, produsen maupun konsumen agar menghindari praktek penipuan karena penipuan akan merugikan semua pihak yang pada gilirannya akan memicu krawanan sosial dan instabilitas nasional.

Selain itu jika prinsip *taradhin* ini diabaikan maka tentu akan membuka peluang bagi kelompok tertentu untuk melakukan tindakan pemaksaan kehendak kepada pihak lain. Hal ini telah terbukti pada tataran ganti rugi tanah rakyat oleh penguasa atau pengusaha. Sebagai dampak dari perilaku menyimpang tersebut timbullah berbagai macam tindakan diluar hukum, seperti perampasan, penjarahan, pembunuhan dan lain sebagainya.

Praktek riba, juga menjadi penyakit ekonomi masyarakat, meskipun secara sekilas kelihatannya memberi keuntungan yang besar

bagi para pelaku ekonomi, namun sejak masa jahiliyah sampai saat ini orang-orang yang mengeruk keuntungan lewat riba ternyata mengalami kehidupan yang memprihatinkan lantaran mereka terkena penyakit gila, yaitu gila harta. Ayat 275 Surah al-Baqarah adalah landasan pokok kearah itu. Allah berfirman;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

**Artinya:** Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata; Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S: al-Baqarah : 275).

Jual beli sebagai solusi penghapusan riba menuntut adanya prinsip ‘an taradhin antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagai mana dinyatakan Allah dalam ayat 29 Surat al-Nisa’ diatas tadi. Dengan demikian jelas bahwa prinsip ‘an taradhin mengandung filosofis yang sangat penting bagi kehidupan ummat manusia.

## BAB III

### ‘AN TARADHIN DALAM PERSPEKTIF KONTEMPORER

#### A. Pengertian ‘An Taradhin

‘An taradhin terdiri dari dua suku kata; ‘an dan *taradhin*. Taradhin berasal dari *taradhaya*, *yataradhayu*, *taradhuyan* setimbang dengan *tafa’ala*, *yatafa’alu*, *tafa’ulan*.<sup>15</sup> yang berarti *suka*.<sup>16</sup> Dengan menggunakan *bina musyarakah* menunjukkan arti *saling suka menyukai (mutual consent or agreement)*.<sup>17</sup> Penambahan huruf “ ‘an “ menunjukkan bahwa prinsip suka sama suka tersebut haruslah muncul dari keinginan hati masing-masing pihak yang dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul, bukan suka sama suka dalam arti formal. Oleh karena itu al-Syafi’iy berpendapat;

لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إِلَّا بِالْقَبُولِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى التَّرَاضِي نَصًّا<sup>18</sup>

**Artinya:** Tidak sah jual beli melainkan dengan serah terima karena itulah yang secara nash menunjukkan suka sama suka.

Juahaya, S. Praja, menjelaskan bahwa ‘an *taradhin* termasuk salah satu prinsip *mu’amalat* yang berlaku bagi setiap bentuk *mu’amalat* antar individu atau antar pihak, karenanya dalam menjalankan kegiatan *mu’amalat* harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk *mu’amalat*, maupun

<sup>15</sup> Ibrahim Anis, et. *Al-Mu’jam al-Wasith*, Dar al-Ma’arif Kairo, th. 1972 Juz. I hal 351.

<sup>16</sup> Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *Qamus al-Marbawi*, Musthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, Mesir, 1350 H. Jilid I hal. 239

<sup>17</sup> Rohi Baalbaki, DR. *Al-Mawarid, A Modern Arabic – English Dictionary*, Dar al-‘Ilm Lilmalayin, Beirut Lebanon 1997 hal. 304.

<sup>18</sup> Al-Qurthuby, *CD al-Quran 6.50 dan al-Hadits, versi Indonesia*.

kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk mu'amalat lainnya.<sup>19</sup>

**B. 'An Taradhin dalam Pandangan Ulama Salaf.**

Istilah '*an taradhin*' ini berdasarkan firman Allah (Q. S : 4 : 29) yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*Artinya:* (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu).

Berdasarkan ayat ini '*an taradhin*' merupakan prinsip yang mesti ada dalam proses jual beli, karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi termasuk jual beli haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada mu'amalat seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (*tabaddulul manfa'at*), atas dasar saling merelakan ('*an taradhin*'), saling menguntungkan (*murabbahah*), saling percaya mempercayai (*amanah*), dan bekerja sama (*musyarakah*) sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan *maisir*.

Menurut ketentuan fiqih terdapat unsur syarat dan rukun jual beli yang apabila kedua unsur tersebut terpenuhi maka jual beli dikategorikan sah menurut hukum. Sebaliknya bila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual beli dihukum batal. Imam Abdu al-Rahman al-Jaziri mengungkapkan bahwa rukun jual beli itu ada enam macam;

---

<sup>19</sup> Juhaya S.Praja, Prof. DR. *Filsafat Hukum Islam*, LPPM UNISBA, Bandung, 1995, hal.114



اركان البيع : صيغة وعقد ومعقد عليه وكل منها قسمان لان العاقد اما ان يكون بائعا او مشتريا والمعقود عليه اما ان يكون ثمنا او مثمنا والصيغة ان تكون ايجابا او قبولا فالاركان ستة<sup>20</sup>

**Artinya:** (Rukun-rukun jual beli itu adalah: 1. Shighat, 2. 'Aqid, 3. Ma'qud 'alaih. Masing-masingnya terbagi menjadi dua macam, karena al-'Aqid terdiri dari penjual dan pembeli, sedangkan al'ma'qud 'alaih terdiri dari harga dan yang dihargai, begitu juga shighat terdiri dari ijab dan qabul. Dengan demikian rukun itu menjadi enam macam).

Shighat pada dasarnya adalah ucapan yang dituturkan oleh penjual dan pembeli sebagai bukti kerelaan mereka untuk menjual dan membeli sesuatu barang yang diperjual belikan. Shighat ini menurut Ibnu Rusydi al-Qurthuby haruslah dilafadzkan, karena jual beli dikategorikan tidak sah manakala penjual dan pembeli tidak melafadzkannya. Oleh karena itu menurutnya penjual harus mengucapkan “saya menjual barang ini kepadamu”. Lalu oleh pembeli dijawab dengan mengucapkan lafadz “saya membeli barang ini darimu”.<sup>21</sup>

Karena pentingnya ucapan lafadz tersebut sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak, maka lafadz kinayah-pun diperselisihkan para ulama akan keabsahan jual beli. Menurut Imam al-Syafi'iy tidak sempurna transaksi bila pembeli tidak menuturkan lafadaz “saya membeli barang ini darimu...” jadi jika penjual mengatakan kepada pembeli, belilah barang saya ini, lalu pembeli mengatakan “saya membelinya” maka ucapan yang demikian itu belumlah cukup. Tetapi menurut Imam Malik jual beli sudah sah, sebab lafadz itu sudah dapat difahami.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Abdu al-Rahman al-Jaziri, **Mazahib al-Arba'ah**, Tijariyah Kubro Mesir, cet. VI Juz II hal. 147. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Saiyid al-Bakri al-Dimyathi, dalam kitabnya **Fanatu al-Thalibin**, Juz III hal 3 dan Imam Taqiyuddin dalam **Kifayatu al-Akhyar**, hal. 239

<sup>21</sup> Ibnu Rusydi al-Qurthuby, **Bidayatu al-Mujtahid**, Juz II. Musthafa al-Baby al-Halaby, Mesir th. 1339 H. hal. 128

<sup>22</sup> **Ibid.**

Persoalan yang sama – kurang sempurna jual beli – bila jawaban pembeli diucapkannya setelah mereka berpisah dari majlis transaksi. Misalnya penjual mengatakan “*belilah barang saya ini*” lalu penjual dan pembeli berpisah dari satu majlis sebelum ada jawaban dari sipembeli. Setelah lama berselang pembeli tadi datang kembali dan mengucapkan “saya membeli barangmu itu”. Keadaan semacam ini menurut al-Syafi’iy belum cukup, tapi kata Imam Malik jual beli sudah sah.

Lafadz yang diucapkan itu adalah bukti kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Namun apakah kerelaan tersebut hanya dibuktikan dengan penuturan lafadz dalam artian harfiah, ataukah ada cara lain yang dapat dilakukan oleh mereka yang melakukan transaksi tersebut sebagai penjabaran makna ‘an tarādhin itu, seperti sertifikat tanah, akte jual beli, atau Surat Keterangan Tanah (SKT) pada kasus jual beli tanah. Atau kwitansi, fature, nota, misalnya pada jual beli barang bergerak.

Hal itu perlu kajian mendalam, karena al-Quran hanya menyebutkan “*suka – samasuka*” antara penjual dan pembeli, sedangkan konsep operasionalnya hanya diinterpretasikan oleh para ulama yang dalam hal ini masih terdapat perbedaan pendapat sebab suka atau tidak tersebut merupakan sifat yang tersembunyi di dalam hati (*amran khafīyan wa dhāmīran qalbiyan*), dan baru dapat diketahui apabila sudah ada “*bukti nyata*” dari yang bersangkutan, penjual suka menjual barangnya sedang pembeli suka membeli barang tersebut. Bukti nyata inilah yang menjadi persoalan, sehingga Imam al-Syafi’iy berpendapat bahwa sahnya jual beli itu harus ditandai dengan *ijab* dan *qabul* secara *talaffudz*<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Al-Bakri mengatakan lebih lanjut bahwa dalam menuturkan lafadz *ijab*, sipenjual harus menunjukkan hak kepemilikannya secara jelas, misalnya dengan mengatakan “saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian, atau saya hibbahkan barang ini kepadamu dengan harga sekian, atau saya jadikan barang ini milikmu dengan harga sekian. Lafadz seperti ini sudah dikategorikan sah apabila sipenjual itu meniatkan jual beli. Begitu juga dalam hal pembeli menerima barang yang dibelinya itu dia harus mengatakan saya membeli barang ini darimu dengan harga sekian... , atau saya menerima pemilikan barang ini dengan harga sekian.... (Lih. Sayyid al-Bakri al-Dimyati, *F’anatu al-Thalibin*, Juz. III Musthafa al-Baby al-Halaby, Mesir, 1983 hal. 3 – 4

Pendapat lain menyatakan bahwa transaksi tidak mesti harus dilafadzkan, karena suka atau tidaknya pihak-pihak yang melakukan transaksi dapat dilihat dari keinginan pihak-pihak untuk memberi dan menerima barang yang dijadikan obyek jual beli. Untuk ini terdapat tiga macam pendapat ulama;

*Pertama*; Pendapat yang mengatakan bahwa tidak sah transaksi jual beli melainkan dengan *talaffudz*. Artinya, ‘*aqad*’ baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan *aqad* tersebut mengucapkan lafadz *ijab* dan *qabul*. Ketentuan ini berlaku dalam berbagai bentuk mu’amalat seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, wakaf, nikah, pembebasan budak dan lain sebagainya. Misalnya penjual mengatakan pada pembeli pada saat terjadi transaksi dengan perkataan “saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian ...”. Lalu, pembeli menerima barang yang dibelinya itu dengan mengucapkan lafadz “saya terima membeli barang ini darimu dengan harga sekian ...”.

Bagi golongan ini pengucapan kata sebagai penunjuk untuk membeli barang yang dibelinya itu dapat digunakan kata “membeli, menerima, memiliki, meridhai atau kata lain yang semakna dengan membeli tersebut”. Jika antara penjual dan pembeli itu terhalang oleh sesuatu keadaan seperti bisu, maka transaksi dapat dilakukan dengan isyarat. Begitu juga jika terhalang oleh jarak yang berjauhan maka keduanya dapat melakukan *ijab* dan *qabul* dengan cara tertulis (*kitabah*) sebab menurut mereka transaksi melalui surat sama artinya dengan transaksi yang dilakukan secara langsung.

Pendapat ini dipegang oleh mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah. Mereka beralasan bahwa sahnya *aqad* jual beli itu manakala dilakukan dengan suka sama suka (*‘an taradhin*) sebagai mana tersebut pada surat al-Nisa’ 29 yang menyatakan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh memakan harta dengan cara yang bathil, melainkan dengan cara perniagaan yang dilakukan secara suka-sama suka di antara penjual dan pembeli. Sedangkan suka atau tidak itu adalah suatu sifat yang tersembunyi di dalam hati, karenanya tidak dapat diketahui melainkan diungkapkan dengan lafadz. Oleh sebab itu, “*aqad* jual beli tersebut perlu di

tuturkan dengan lafadz sebagai bukti suka sama sukanya kedua belah pihak”.<sup>24</sup>

Pendapat serupa dikemukakan pula oleh Syihabuddin. Beliau berkata; “tidak sah jual beli tanpa *talaffudz*, sebab ijab dan qabul itu berhubungan erat dengan keridhaan antara penjual dan pembeli berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi; ***Innama al-bai’u ‘an taradhin***. Sedangkan keridhaan itu tersembunyi di dalam hati, dan baru dapat diketahui setelah dilafadzkan. Karenanya, tidaklah sah jual beli kalau hanya saling memberi saja”.<sup>25</sup>

*Kedua*; Pendapat yang mengatakan bahwa ‘*aqad* jual beli itu sah meskipun hanya dilakukan dengan tindakan (perbuatan) tanpa menuturkan lafadz. Begitu juga pada hal-hal lain seperti beri memberi (*mu’athah*), sewa menyewa, pemberian upah, membayar ongkos kendaraan dan lain sebagainya. Keadaan semacam ini menurut Hamzah Ya’kub telah berlaku semenjak zaman Nabi SAW hingga sekarang, bahkan kebanyakan manusia melakukan ‘*aqad* semacam ini tanpa disertai lafadz, melainkan cukup dengan fi’il yang menerangkan tujuan ‘*aqad* itu. Pendapat semacam ini dipegang oleh mazhab Hanafiyah dan satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan Syafi’iy.<sup>26</sup> Dalam kaitan ini Abu Hanifah melandasi pemikirannya dengan ayat al-Quran Surat Hud 87 yang berbunyi:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ  
إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (هود : 87)

**Artinya:** (Mereka berkata: "Hai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa

<sup>24</sup> Lih. al-Zanjani, ***Takhrij al-Furu ‘Ala al-Ushul***, Muassasah al-Risalah Beirut, cet. Ke II 1979 hal. 143

<sup>25</sup> Syihabuddin Ahmad bin Salamah al-Qulyubiy, ***Syarah al-Mahally***, Musthafa al-Baby al-Halaby, Mesir 1956, hal. 153

<sup>26</sup> Hamzah Ya’kub, Hamzah Ya’kub, ***Kode Etik Dagang Menurut Islam***, CV. Diponegoro, Bandung, 1988, hal. 73

*yang kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal).*

Menurut Abu Hanifah jual beli dan ridha itu berhubungan satu sama lainnya seperti halnya memberi. Menurutnya “menjual” itu sudah menunjukkan ridha berdasarkan ayat tersebut di atas. Akan tetapi menurut al-Zanjani, pendapat ini lemah sebab ridha dalam hal memberi tidak sama dengan ridha dalam jual beli, karena ridha dalam jual beli terkandung adanya serah terima, sedangkan memberi memang dihalalkan secara hukum, karena itu, dengan “memberi” sudah menunjukkan ridha. Sedangkan ridha dalam jual beli harus ditunjukkan dengan bukti nyata sebab pengertian ridha di sini adalah ridha secara khusus yang terkandung maksud *ijab* dan *qabul*, artinya penjual ridha menyerahkan barang yang dijualnya dan pembelipun ridha menerima barang yang dibelinya.<sup>27</sup>

*Ketiga;* dikatakan hukum setiap transaksi sah dilakukan dengan cara apa saja, baik dengan perkataan maupun perbuatan, asal menunjukkan kepada maksud dari transaksi tersebut. Jika orang memandang transaksi yang dilakukan itu sebagai jual beli maka sahlah jual beli. Begitu juga apa yang dipandang sebagai sewa menyewa maka sahlah sewa menyewa tersebut, meskipun terdapat perbedaan istilah dalam lafadz dan perbuatannya. Sahnya akad itu bagi apa yang dimengerti oleh masing-masing bangsa baik dalam sighat maupun dalam tindakan, sebab tidak ada pembatasan tertentu dari syara’ maupun dari bahasa. Jadi boleh dengan istilah yang mereka pergunakan menurut bahasa mereka. Terutama seperti membeli roti, rokok, daging atau lainnya. Pendapat ini dimunculkan oleh Imam Malik dan Ahmad bin Hambal dan didukung oleh Ibnu Siraj dan Rauyani.<sup>28</sup> Terjadinya perbedaan pendapat ulama tentang *talaffudz* dalam transaksi jual beli ini disebabkan beberapa perbedaan pandangan;

---

<sup>27</sup> al-Zanjani, *op-cit*, hal. 144

<sup>28</sup> Muhammad al-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, juz II, Musthafa al-Baby al-Halaby, Mesir, 1958 hal.3

### 1. *Perbedaan Pandangan dalam Menilai Suka-Sama Suka.*

Menurut golongan Syafi'iyah sifat suka (*ridha*) adalah sifat yang tersembunyi di dalam hati (*amran khafiyah wa dhamiiran qalbiyan*). Oleh karena itu ketika hakikat ridha itu merupakan sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, maka dia menghendaki kebijakan moral untuk menjelaskan seluruh apa yang dimaksudkan serta jelas mempunyai hubungan yang dapat dipandang sebagai dalil untuk menunjukkan kerelaan dari pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli itu sendiri. Dalam kaitan ini tidak lain adalah *Ijab dan Qabul*. Imam al-Syafi'iy tidak membenarkan ijab dan qabul itu dihubungkan dengan yang lainnya seperti dihubungkan dengan kerelaan dalam hal memberi.<sup>29</sup>

Untuk itu, satu-satunya dalil yang dapat menunjukkan kerelaan tersebut adalah lafadz yang diucapkan oleh pihak penjual dan pembeli. Lafadz tersebut harus dapat dinilai secara transparan, karenanya harus dituturkan dengan lafadz yang *sharih*. Seorang pembeli misalnya berkata kepada sang penjual "*juallah barang daganganmu itu kepada saya dengan harga sekian...*", lalu penjual itu menjawab, "*saya menjualnya...*". Ungkapan seperti ini menurut al-Syafi'iy belum menjadikan transaksi jual beli itu sempurna sampai sang pembeli itu mengucapkan *saya membelinya*. Akan tetapi menurut Imam Malik, ucapan seperti itu sudah dapat dipandang sebagai jual beli yang sah karena yang dituntut adalah pemahaman dari lafadz tersebut, kecuali kalau memang lafadz itu bukan dimaksudkan untuk jual beli. Akan tetapi berbeda dengan apabila seorang pembeli menanyakan kepada penjual "*berapa harga barang dagangmu ini ?*". Lalu penjual menyebutkan harga barang tersebut dan pembeli mengatakan "*saya membelinya dengan harga sekian...*". Keadaan seperti ini menurut al-Syafi'iy jual beli sudah sah terjadi karena penuturan

---

<sup>29</sup> *Ibid, hal. 143*

lafadz itu bisa diucapkan dengan lafadz yang *sharih* dan bisa pula dituturkan dengan lafadz *kinayah*.<sup>30</sup>

**2. Perbedaan Pandangan dalam Menilai Al-Mu'athah.**

Menurut pandangan Imam al-Syafi'iy, penjual yang memberi barang dan pembeli yang memberi uang tanpa satupun di antara mereka yang berbicara (*al-mu'athah*) tidaklah cukup untuk dipandang sebagai terjadinya jual beli, kecuali kalau penilaian ijab dan qabul seperti itu menurut kelazimannya dipandang sebagai sesuatu yang sudah biasa terjadi sebelum mereka berpisah / meninggalkan majlis. Lain halnya apabila sipenjual mengatakan, "Saya menjual barang daganganku ini dengan harga sekian..." Namun, pembeli diam saja dan dia tidak menerima penawaran tersebut sampai mereka berpisah. Kemudian pembeli tadi datang lagi ketempat penjualan barang tersebut dan dia mengatakan kepada penjualnya "saya menerima penawaran tadi". Tindakan seperti ini tidak lazim dilakukan dan dapat dipandang jual beli tidak terjadi. Artinya jika ada orang yang membeli barang tersebut sebelum orang yang ditawarkan pertama tadi datang kembali, maka orang itu tidak dapat menuntut penjualnya.

**3. Berbeda Pandangan dalam Menentukan Waktu Terjadinya Transaksi.**

Dalam menentukan waktu terjadinya transaksi, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan para pengikut mereka, serta kelompok ulama Madinah, bahwa jual beli itu mesti dalam suatu majlis dengan satu pendapat meskipun mereka belum berpisah. Tetapi menurut Imam al-Syafi'iy, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur, Abu Daud, dan Ibnu Umar termasuk para pengikut mereka, bahwa jual beli mesti dengan berpisahannya mereka dari majlis karena masing-masing pihak penjual dan pembeli itu sama-sama berkepentingan selama belum berpisah.

---

<sup>30</sup> Rusydi al-Qurthuby, *op-cit.* hal. 170

Kalau mereka sudah berpisah tidak ada lagi kewajiban menjual dan tidak ada lagi kewajiban transaksi.<sup>31</sup>

Bila kita berpegang kepada pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah seperti tersebut di atas, maka pengucapan lafadz sebagai bukti suka sama sukanya mereka untuk menjual dan membeli sungguh tidak diperlukan karena dipandang terjadinya jual beli itu selama mereka belum berpisah. Artinya, bila sudah berpisah dari majlis maka sudah menunjukkan masing-masingnya telah menyetujui transaksi yang dilakukan itu. Akan tetapi, apabila kita berpegang kepada pendapat Imam al-Syafi'iy Cs, maka tentu diperlukan *talaffudz* sebagai bukti mereka menyetujui transaksi tersebut sebab selama mereka belum berpisah dianggap belum selesai transaksi, dan baru dianggap selesai transaksi itu manakala mereka sudah berpisah.

Meskipun demikian, menurut pendapat ulama Syafi'iyah tidak semua barang yang diperjual belikan harus *ditalaffudzkan* ketika melakukan transaksi karena pada jenis barang tertentu boleh melakukan akad jual beli tanpa *talaffudz*. Al-Bakri mengatakan;

فلا ينعقد بالمعاطاة لكن اختيار الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بما فيه كالخبز  
واللحم دون نحوى الدواب والاراض<sup>32</sup>

**Artinya:** (Tidak sah akad dengan cara *mu'athoh* (saling memberi), namun boleh akad *mu'athoh* itu pada jenis barang yang sudah dikenal sebagai jual beli, seperti roti dan daging, tidak demikian halnya dengan binatang dan tanah).

Berdasarkan pengungkapan Said al-Bakri tersebut dapat dipahami bahwa di kalangan Syafiy'iyah-pun berpendapat bahwa

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Said al-Bakri al-Dimyati, op-cit. Hal. 4*



tidak semua jenis barang yang diperjual belikan harus *ditalaffudzkan* ketika terjadi akad jual beli, seperti beli rokok, roti, korek api, kopi, gula dan lain sebagainya yang sifatnya barang-barang yang secara adat telah dianggap sebagai jual beli. Dengan demikian nampaknya akad dengan menggunakan *talaffudz* tersebut hanya terbatas pada barang-barang yang bernilai tinggi, seperti tanah, mobil dan lain sebagainya. Pembelian barang seperti ini diperlukan *talaffudz*, namun dalam penerapannya tidak mesti dituturkan secara langsung, tetapi dapat dicantumkan dalam surat-surat jual beli. Pada mobil misalnya dicantumkan dalam faktur, STNK dan BPKB. Pada tanah dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) atau sertifikat.

### C. ‘An Tarādhin dalam Praktik

Sistem perdagangan dewasa ini telah melaju pesat baik dalam produk yang dipasarkan maupun dalam sistem bisnis, mulai dari perdagangan pasar sampai pada bisnis lewat internet (*e-commerce*) yang dapat melayani *business to business* atau *business to consumer*. Dengan perkembangan sistem seperti ini, sudah jelas mengundang perubahan hukum yang diterapkan pada masa sebelumnya. Oleh karena itu, prinsip ‘an tarādhin yang dikenal dalam dunia bisnis masa silam perlu direkonstruksi dengan menyesuaikan diri pada perkembangan zaman sekarang, karena nampaknya pola ‘an tarādhin yang dikemukakan ulama salaf seperti dikemukakan di atas tadi sudah tidak mampu lagi menampung layanan perdagangan modern yang semakin canggih dewasa ini.

Dalam perdagangan lewat media elektronik seperti Telephon, TV dan Internet, telah memasyarakat dalam dunia bisnis. Bukan suatu hal yang mustahil di masa depan perdagangan lewat internet dapat mengungguli perdagangan pasar, meskipun perdagangan pasar tidak mungkin dihilangkan. Banyak orang yang tidak pernah membayangkan, dapat membuka usaha 24 jam sehari selama tujuh hari sepekan, nonstop, tanpa libur, tanpa lembur dengan memberdayakan internet. Cara seperti ini sangat praktis karena tidak memerlukan tempat yang lapang dan stok

barang yang perlu dipajangkan layaknya sebuah toko, bahkan sebaliknya mungkin dapat menerima uang dulu sebelum membelanjakan uang untuk membeli barang di muka. Hal semacam itu kini bukanlah khayalan. Sejak diperkenalkannya cara berbisnis di Internet (*e-business*) beberapa waktu silam kini cara tersebut sedang *booming* di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

*E-Business* pada dasarnya adalah cara berbisnis dengan memanfaatkan jaringan elektronik. Sedangkan *E-Commerce* adalah salah satu cara melakukan transaksi melalui media dalam satu jaringan yang dibangun bersama-sama.<sup>33</sup>

Pada awalnya *E-Commerce* berkembang antar perusahaan dengan mitra bisnisnya. Misalnya satu perusahaan dengan pemasok (agen) nya. Cara ini lazim dikenal sebagai *business to business* ( *B to B* ). Namun, dalam perkembangannya *E-Commerce* juga bergerak kearah transaksi yang langsung melibatkan banyak perusahaan, Produsen, pemasok, pengecer besar, supermarket, perbankan dan konsumen ( *B to C* ) semua terkoneksi lewat jaringan *online*. Cara seperti ini dikenal sebagai *E-Bussiness*.

*E-Commerce* juga terjadi di Indonesia. Berbagai jenis usaha sudah mulai menerapkan bisnis di internet. Di kalangan perbankan misalnya, BII dan Bank Lippo yang sudah melangkah jauh, internet Banking sudah bisa dilakukan melalui alamat web mereka. Begitu juga berbagai unit usaha di Group Astra . Pemesanan barang misalnya sudah mulai dilakukan melalui jaringan internet.

Begitu juga penyewaan mobil Toyota Rental a Car. Proses penyewaan mobil sudah bisa dilakukan secara *online* lewat . Sejumlah perusahaan jasa seperti halnya hotel sudah menggunakan internet sebagai satu cara bisnis. Sistem reservasi sudah dengan mudah dilakukan. Misalnya Hotel Ciputra yang sudah cukup lama menggunakan internet. Kini sudah ribuan orang memesan kamar, cukup melalui website mereka, terutama para tamu dari mancanegara.

---

<sup>33</sup> Lihat: *Mengoptimalkan Bisnis di Internet*, Panji Masyarakat No. 01 Th. IV, Jakarta, 26 April 2000 hl. 40 – 59

Berbagai jenis transaksi kini mulai kearah yang lebih simpel dan internet menjadi salah satu pilihan. Pembelian kartu isi ulang telepon misalnya kini sudah dapat dilakukan lewat internet. ICash21 bekerja sama dengan BII dan card center bank lain telah melakukannya sejak akhir tahun 1999. Mereka telah memiliki sekitar 600 anggota. Namun sebagai pengamanan, berbagai data penting masih harus dikirim melalui faksimile atau surat. Di bidang informasi telah banyak pula para investor yang menanamkan modalnya untuk bisnis ini seperti detik.com dan satunet.com.

Pengguna internet di Indonesia menurut data dari IDC (*International Data Corporation*) pada tahun 1999 baru sekitar 350.000 dengan tingkat adopsi internet sekitar 0,11 %. Nilai transaksi e-commerce-nya baru sekitar US\$ 100 juta dan diperkirakan akan menjadi dua kali lipat pada tahun 2000 ini. Sedangkan pada tahun 2003 nanti diproyeksikan pengguna akan mencapai 700.000 dengan nilai transaksi US\$ 1.2 miliar.

Dewasa ini banyak pengusaha yang melakukan bisnis lewat internet ini yang menurut Antonius Alfons Tanudjaya<sup>34</sup>, bisnis lewat internet ini berkembang sangat pesat, bahkan dia tidak menduga kalau perkembangannya akan secepat itu, karena baru dibuka sekitar dua tahun telah banyak investor yang menanamkan modal kearah bisnis lewat internet ini, bahkan beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat telah masuk ke *E-Business* seperti *Wallmart*.

Menurut Suluh T. Rahardjo<sup>35</sup> semua jaringan usahanya, mulai dari pemasok hingga sitem pengadaan barang, telah terhubung satu sama lain secara elektronis. Dengan demikian, persediaan barang tidak pernah kosong dan pasokan barangpun sama sekali tidak ada yang sampai menginap di gudang. Cara seperti ini jelas sangat menghemat karena terpankasnya rantai pasokan yang sebelumnya cukup panjang kini menjadi lebih pendek. Dengan demikian, biaya transaksi bisa dihemat

---

<sup>34</sup> Presiden Direktur "Tumbuh Subur Luhur" pengelola iCash 21 yang melayani pembayaran kartu telephone lewat internet. *Ibid.*

<sup>35</sup> Suluh T. Rahardjo : *Software Channel manager PT. IBM Indonesia yang berkantor di Jakarta.*

yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya yang harus dibayar oleh konsumen. Itu berarti memberi keuntungan bagi perusahaan.

Data dari IDC (*International Data Corporation*) menyebutkan bahwa pada tahun 1997 pengguna internet bisnis hanya sekitar 70 juta di seluruh dunia dengan perputaran uang hanya US\$ 8 miliar setahun. Dalam perkiraan para ahli yang bergerak di bidang ini, pada tahun 2002 nanti akan menjadi 5 (lima) kali lipat dengan perputaran uang sekitar US\$ 333 miliar pertahun. Di Amerika Serikat sebagai negeri yang dijadikan patokan pengguna internet menurut riset yang dilakukan oleh *Nielsen Netratings*, kini menguasai hampir separo pangsa pasar online, dan setiap harinya para pemakai internet menyisihkan 32 menit untuk membuka internet, mereka rata-rata menengok empat situs.

Sejumlah kasus yang fenomenal terdapat di Amerika Serikat tentang perkembangan dan keunggulan berbisnis lewat internet ini. Kalau sebelumnya tidak ada toko buku yang mampu menandingi ketenaran *Barnes & Noble*, kini hanya dalam beberapa tahun sudah terlampaui oleh toko buku "*Amazon. Com*" yang dibangun oleh *Jeff Bezos* yang baru berusia sekitar 30-an tahun. Pada tahun 1997 *Amazon.com* telah memperoleh keuntungan US\$ 610 juta. Begitu juga raja bisnis media dan hiburan *Time Warner* yang mulai berkiprah sejak tahun 1925, akhirnya bergabung dengan AOL (*American Online*), perusahaan yang bergerak di bidang jasa internet terbesar di Amerika Serikat yang baru berdiri tahun 1995 yang lalu, padahal nilai penjualan *Time Warner* US\$ 23 miliar, mencapai empat kali lipat omzet AOL.

Nampaknya, berbisnis lewat jaringan internet ini tetap memegang prinsip '*an taradhin*' meskipun pola yang ditawarkan agak berbeda dengan pola '*an taradhin*' masa lalu. Hal ini dapat dimengerti karena prinsip '*an taradhin*' yang ditawarkan ulama salaf seperti tersebut di atas masih dalam tataran majlis jual beli dalam arti hakiki, sedangkan majlis dalam perdagangan lewat jaringan internet adalah majlis dalam pengertian *majazi*. Artinya, kalau di zaman dahulu para ulama mujtahid belum mengenal perdagangan sistem internet ini – karena memang sistem ini belum muncul – maka tidaklah mengherankan bila pemahaman terhadap

“majlis” jual beli masih dalam skala kecil, pedagang berhadapan langsung dengan pembeli. Tetapi perdagangan lewat jaringan internet baik *business to business* ( *B to B* ) maupun *business to commerce* ( *B to C* ) mereka tidak saling berhadapan secara langsung. Oleh karena itu yang sangat dominan memegang peran di sini adalah “kepercayaan”. Artinya, mereka saling percaya mempercayai. Dengan demikian ‘an taradhin dalam kaitan ini dapat dinyatakan lewat kemauan konsumen untuk menerima tawaran pengusaha dengan ditandai, adanya permintaan dari konsumen, bukti pengiriman uang (transfer lewat rekening bank), bukti pengiriman barang (faktur).

Selain itu, perdagangan melalui sistem *Mall Supermarket* tidak lagi melakukan penawaran *pace to pace* terhadap konsumen tetapi, cukup memajangkan barang dagangannya dengan disertai label harga yang telah ditetapkan. Melalui sistem ini tidak lagi terjadi negosiasi antara penjual dengan pembeli, tetapi pedagang menawarkan barangnya lewat pajangan, sedangkan pembeli langsung mengambil barang yang diinginkannya dan membayar sejumlah uang pada kasir yang telah ditunjuk. Nampaknya ‘an taradhin lewat sistem jual beli seperti ini dapat dibuktikan dengan pengambilan barang yang dipilih oleh pembeli, dan bukti pembayaran yang diberikan oleh kasir sebagai penjual.

## BAB IV

### HAK INDIVIDU DAN KETIMPANGAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT

#### A. Hak Individu

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa gejala ketimpangan sosial dalam masyarakat bermula dari adanya pengakuan terhadap hak kepemilikan atas sesuatu benda atau sesuatu yang bernilai benda yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Upaya menafikan klaim kepemilikan ini tidak ayal membawa petaka kehidupan umat manusia itu sendiri. Sejarah telah mencatat, bagaimana komunisme sebagai ideologi modern yang berkekuatan dunia, secara sistematis dan penuh kekerasan telah berusaha menghilangkan apa yang disebut hak kepemilikan individu. Namun, dipenghujung kisah petualangan mereka, yang terjadi adalah arus balik yang tidak terbendungkan untuk menegakkan kembali apa yang selama ini mereka nistakan.

Berbeda dengan Islam, sebagai agama universal Islam mengakui dengan tegas keabsahan hak kepemilikan pada orang perorang. Bahkan dalam ajarannya Islam mengancam dengan tegas terhadap siapa saja yang secara tidak sah merampas hak milik orang lain dengan hukuman yang sangat berat berupa potong tangan. Allah berfirman; (Q.S. al-Maidah : 38)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(المائدة : 38)

**Artinya:** (Pencuri laki-laki atau perempuan, potong tangan mereka sebagai pembalasan atas apa yang mereka perbuat dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana).

Nabi SAW sebagai Rasul pembawa dan penegak kebenaran menyatakan perlindungannya terhadap hak kepemilikan ini. Beliau bersabda;

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَآيِمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (رواه مسلم)<sup>36</sup>

**Artinya:** Wahai manusia ! umat terdahulu rusak binasa disebabkan ketika pelanggaran hak milik seseorang dilakukan oleh kalangan terhormat mereka membiarkannya begitu saja – bahkan terkesan dilindungi – tetapi apabila pelanggaran itu dilakukan oleh rakyat jelata, dengan serta merta mereka menegakkan sanksi sekeras-kerasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad melanggar hak milik orang lain, pasti akan saya potong tangannya.(H.R. Muslim).

Berangkat dari konsepsi Islam terhadap hak kepemilikan dan realitas yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat dewasa ini, maka pada bagian ini akan di kaji bagaimana Islam menjaga keseimbangan antara kepentingan melindungi hak milik disuatu pihak dan idealisme untuk menghindari ketimpangan sosial– dalam bahasa positifnya menegakkan keadilan sosial– dipihak lain. Disadari bahwa hal ini merupakan suatu perseimbangan yang sangat rumit dan sekaligus labil, sebab kebanyakan masyarakat telah gagal untuk berdiri tegak memperjuangkan keadilan. Kalau tidak terpelanting ke kiri mereka tergelincir ke kanan. Ironisnya mereka yang terpelanting ke kiri maupun yang tergelincir ke kanan, cenderung saling menuding dan bermusuhan, padahal sebenarnya nasib keduanya itu tidaklah berbeda.

---

<sup>36</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz II, al-Ma'arif, Bandung, tt. hal. 47

## **B. Ketimpangan Sosial**

Untuk menelusuri dan memperjelas bagaimana ketimpangan sosial itu terjadi serta solusi apa yang ditawarkan Islam dalam mengatasi ketimpangan tersebut, pada uraian berikut ini akan dijelaskan bagaimana ketimpangan-ketimpangan itu terjadi.

### **1. Ketimpangan Sosial Tradisional.**

Para ilmuwan sosial umumnya berpendapat bahwa pada tahap awal perkembangan masyarakat manusia, ketika kehidupan mereka masih bergantung pada kemampuan berburu hewan dan berpindah-pindah dari suatu tempat ketempat yang lain, persoalan hak milik belumlah ada, karena beberapa sebab.

*Pertama;* apa yang jadi kebutuhan manusia pada saat itu masih terbatas untuk mempertahankan hidup secara fisik, yakni kebutuhan pangan, sandang dan papan. Itupun dalam ukuran yang benar-benar primitif. Untuk masalah pangan asal bisa menahan rasa lapar; sandang asal bisa menutupi bagian-bagian tertentu dari anggota badan; dan papan asal bisa tempat berlindung dari gangguan satwa liar. Pada tahap yang lebih awal lagi, kebutuhan fisik itu boleh jadi terbatas hanya pada pangan saja.

*Kedua;* sementara bobot kebutuhannya masih sangat sederhana, populasi manusia juga masih sangat terbatas. Dibanding luasnya planet bumi yang menjadi sumber penghidupannya, jumlah mereka sama-sekali belum punya arti. Setiap orang ketika itu yakin apa yang jadi kebutuhannya dapat terpenuhi hanya dengan kerja tangan yang sederhana.

*Ketiga;* ikut memperkuat kedua faktor tersebut di atas, yaitu masyarakat manusia masih terasa ibarat satu keluarga (*commune*) yang saling tolong dan saling melindungi satu sama lain. Kalaupun sudah melewati periode waktu yang sangat lama, persoalan hak milik mulai muncul dalam kesadaran, maka hal itu lebih sebagai klaim bersama atas barang–umumnya bahan makanan – yang dihasilkan oleh kerja bersama. Artinya kalau saja muncul persoalan hak milik, hal itu terjadi bukan sebagai klaim



perorangan, melainkan lebih sebagai klaim suatu kelompok terhadap kelompok yang lainnya. Tahap ini bisa disebut tahap *komunalisme*.

Persoalan hak milik mulai dihayati sebagai kepentingan perorangan (*individual*) terjadi ketika masyarakat manusia mulai cenderung menetap untuk membangun kehidupan di wilayah atau lokasi tertentu. Pada tahap ini penghidupan sudah mulai bergeser kearah pertanian. Dibanding dengan berburu, olah pertanian tidak cukup hanya dengan modal tenaga fisik. Perhitungan mengenai peredaran musim, sedikit banyak sudah mulai dilibatkan. Seperti diketahui pola penghidupan olah tani ini lahir disebabkan oleh – atau lebih amannya berbarengan dengan – semakin terbatasnya lahan perburuan. Pada tahap ini meskipun pola komunal masih *kawedar*, akan tetapi fungsinya untuk menjadi acuan bersama – dimana setiap orang saling menopang dan melindungi – sudah tidak lagi sekuat pada tahap sebelumnya.

Dengan memilih tempat atau lokasi tertentu untuk ajang penghidupan, secara perlahan masyarakat manusia sudah mulai berhadapan dengan sumber alam yang terbatas, yakni tanah pertanian seluas yang mereka klaim sebagai wilayah garapannya. Pada mulanya ketika jumlah anggota dari satu kelompok yang memilih tempat tertentu untuk penghidupannya masih sedikit, kepentingan perorangan masih samar-samar.

Akan tetapi lama kelamaan ketika jumlah rombongan kelompok makin banyak dan persediaan lahan penghidupan-tanah pertanian-semakin terasa keterbatasannya, kepentingan yang lebih sempit dari level kelompok mulai menyeruak kepermukaan. Pada tahap ini kohesi kelompok yang utuh dan inten sedikit demi sedikit mulai mengendor. Aliansi keluarga yang terdiri atas suami, isteri dan anak sebagai intinya, mulai menyatakan diri dengan segala kepentingannya cenderung eksklusif.

Persaingan lunakpun mulai menyeruak antara satu unit keluarga dengan unit keluarga yang lain. Siapa di antara mereka

yang memiliki anggota yang lebih banyak, bekerja lebih giat, dan atau berwatak lebih nekad, dengan sendirinya memiliki kesempatan mengatasi pihak lain dalam memperluas tanah pertanian dan sekaligus perolehan hasil-hasilnya. Sebaliknya unit keluarga yang anggotanya sedikit, kurang sungguh-sungguh dalam bekerja, dan atau cenderung menerima seadanya, sangat boleh jadi hanya akan memperoleh hasil yang sedikit. Dan jika keluarga tersebut terakhir ini tidak berhasil merubah pandangan dan sikapnya, kekalahannya oleh keluarga yang tersebut pertama menjadi semakin nyata.

Tidak bisa dihindari bahwa keluarga yang lemah tersebut lambat atau cepat akan dipaksa oleh keadaan untuk melepaskan apa yang ada ditangannya, atau bahkan dirinya sendiri sebagai budak kepada pihak tersebut pertama yang kuat, sekedar untuk menutup kebutuhan dasarnya. Di sini kaidah "*manusia yang kuat menjadi srigala atas manusia yang lemah*" – seperti yang dirumuskan Hobbes – mulai berperan sebagai tata kehidupan yang dominan.

Pada tahap ini-sebut saja tahap *feodalisme*-apa yang kita sinyalir dengan "*ketimpangan sosial*" benar-benar telah menjadi kenyataan. Sebahagian orang berhubungan ke atas dengan kekayaan yang dikuasainya, sementara sebahagian yang lain justru melorot ke bawah dengan kemelaratan yang dideritanya. Ketimpangan itu pada mulanya terjadi dibidang ekonomi, dibidang pemenuhan kebutuhan materi. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri dari ketimpangan ekonomi ini segera menyusul ketimpangan dibidang kehidupan yang lainnya seperti politik, budaya dan bahkan agama.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Banyak kasus yang membuktikan sistem politik, budaya dan agama merupakan hasil kerja para elit ekonomi untuk mempertahankan dominasinya. Tentu agama yang dimaksudkan di sini bukanlah agama ilahiyat yang tumbuh dari penghayatan spiritual orang-orang suci, melainkan agama syaithoniyat yang tumbuh dari sela-sela kepentingan manusia untuk memenuhi kepentingan duniawi. Agama Ilahiyat tentu sangat berbeda dengan agama syaithoniyat, sebab agama Ilahiyat bersifat kritis

Pada tahap awal ketimpangan ekonomi terlihat pada pola kepemilikan tanah, sebab ketika itu tanahlah satu-satunya bentuk aset kekayaan dan juga modal. Pihak keluarga yang muncul sebagai pemenang dengan sendirinya menguasai tanah yang luas jauh melebihi kadar yang mereka perlukan. Sementara yang kalah adalah mereka yang memiliki lebih sempit dari yang mereka perlukan, atau bahkan tidak punya sama sekali. Di antara keduanya terdapat pihak-pihak yang tidak kalah dan tidak menang, yaitu mereka yang memiliki bagian tanah yang kurang lebih sepadan dengan apa yang jadi kebutuhannya.

Sejauh masih bertumpu pada satu obyek pemilikan yaitu tanah, kemungkinan akumulasi kekayaan masih relatif terbatas. Yakni sejauh persediaan tanah masih ada yang diperebutkan dan pihak keluarga yang menguasainya pun merasa mampu mengurusinya, langsung maupun melalui tangan orang lain yang ada dalam kontrolnya. Ini berarti kesenjangan sosial antara orang yang paling kaya disuatu pihak dan yang paling miskin dipihak lain, pada masa itu relatif masih bisa diukur dengan skala lokal. Orang yang kaya adalah mereka yang kaya di antara penduduk di desanya. Dan cakupan kekayaannyapun umumnya terbatas pada penguasaan tanah yang ada di wilayah desanya itu saja. Akan tetapi pola akumulasi kekayaan dan batas lokalitasnya yang sederhana ini kemudian jebol dengan diketemukannya logam kuning yang diberi harga tinggi, yaitu emas. Dengan emas nafsu untuk menghimpun kekayaan dapat dipenuhi dengan cara yang

---

*terhadap ketimpangan sosial, ekonomi, politik maupun budaya yang ada. Sedangkan agama syaithoniyat berwatak oportunistis dan selalu cenderung melegitimasi realitas ketimpangan tadi. Alasannya sederhana saja, yaitu karena tokohnya sekomplot dengan atau bahkan kalangan elit yang mengendalikan realitas itu sendiri. Di antara tokoh agama yang kritis adalah Musa As.Isa, dan tentu saja Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali dan beberapa nama lainnya. Sedangkan tokoh agama yang mengamini tatanan yang ada adalah segenap tokoh agama dan pejabatnya yang selalu berbau kekuasaan Fir'auni, seperti disinyali dalam ayat 35 dari Surat al-Taubah yang menyatakan: Sebahagian besar dari pemuka dan pejabat agama benar-benar telah memakan harta masyarakat dengan cara-cara yang bathil.*

ringkas dan tidak kentara. Kekayaan dalam wujud tanah puluhan hektar, kini dapat disimpan hanya dalam bentuk butiran atau lempengan kecil yang bisa disimpan di bawah bantal atau di dalam tanah.

Dengan demikian, kehadiran emas jelas telah memberikan kemungkinan bagi adanya kesenjangan sosial yang jauh lebih melebar, dan dalam kasus-kasus tertentu lebih tidak bermoral. Orang-orang miskin yang tinggal disepuluan tuan tanah betapapun sengsaranya, masih terbuka kesempatan bagi mereka untuk mencari penghidupan dengan cara bekerja sebagai buruh tani di tanah milik tuan tanah tadi. Dengan berburuh tani mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, meskipun dalam ukuran yang pas-pasan. Sebaliknya ketika kekayaan dihimpun dalam lempengan emas fungsi sosial benar-benar telah ditiadakan.

## **2. Ketimpangan Sosial di Abad Modern**

Apabila dengan kehadiran logam berupa emas ketimpangan sosial dalam masyarakat feodalisme-tradisional telah dikukuhkan, maka dalam masyarakat modern kapitalis, ketimpangan itu lebih diperdalam lagi dengan dua hal. *Pertama*, dengan dicanangkannya sistem ekonomi uang di suatu pihak, dan *kedua*, dengan ditegakkannya lembaga perbankan dengan sistem ribanya di lain pihak. Sebelum adanya lembaga bank, orang kaya yang berhasil menyimpan sejumlah lempengan emas dalam rumah boleh merasa puas untuk menambah simpanan lagi, karena repotnya memelihara dan menjaganya.

Kini dengan kehadiran lembaga bank, kerepotan itu telah di atasi. Dalam bank, orang kaya bisa menyimpan emasnya, atau barang berharga lainnya sebanyak mungkin. Lebih dari sekedar tempat menyimpan emas, bank menyediakan diri sebagai tempat menyimpan uang dan sekaligus melipatgandakannya. Hampir semua orang kini mengatakan bahwa sistem perbankan merupakan kebutuhan zaman yang harus diterima karena fungsi sosialnya.

Dengan “suntikan darahnya” berupa mata uang sebagai modal usaha, berbagai kegiatan ekonomi bisa digerakkan dan dari lapangan kerja bisa disediakan. Melihat fungsi sosial ini masyarakat pun tersugesti untuk menerima kehadiran lembaga itu seutuhnya. Hari demi hari di hampir semua negeri yang berebut kesempatan untuk mendirikan, mulai dari pusat kota sampai ditempat – tempat terpencil di desa, kini bisa ditemukan jaringan-jaringannya.

Pengakuan atas keabsahan lembaga itu pada mulanya diberikan oleh kalangan awam dan pengusaha. Kalangan awam memberikan pengakuan-atau lebih tepatnya pembiaran-karena merasa tidak punya urusan apapun dengannya. Sedang pihak pengusaha, memberikan pengakuan karena merasa ada yang bisa dipetik daripadanya. Sebagai pengusaha mereka menemukan lembaga perbankan yang mampu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan vitalnya, yaitu modal. Bahwa kemudian mereka terpaksa memeras diri sendiri dan orang lain untuk dapat membayar kembali dengan ribanya adalah soal belakang, yang penting dapat membuka usaha dengan modal suntikan perbankan.

Ikut tersugesti melihat lembaga bank dan ribanya sebagai satu-satunya pilihan untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat, kalangan agamapun akhirnya ikut memberikan pengakuannya. Suatu pengakuan (*legitimasi*) yang sebenarnya tidak terlalu dipusingkan oleh lembaga perbankan sendiri sebagai pembawa apinya. Karena tanpa pengakuan mereka, keberadaan lembaga riba ini sudah cukup mampan. Pengakuan itu merupakan kebutuhan dari kalangan agama untuk menyesuaikan diri dengan keadaan.

Pihak agama yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah agama Islam yang selama ini selalu menyatakan penolakannya-bahkan kutukannya-terhadap segala macam bentuk praktek pembungaan uang. Mengacu kepada formalisme ajaran, sebahagian ulama dan pemuka agama Islam berpendapat bahwa

bunga yang dikenakan lembaga perbankan konvensional tidaklah mengapa. Bahkan sejumlah ulama yang tergolong pada jajaran PB. NU menyatakan bahwa bunga bank itu hukumnya *halal*.

Pendapat NU ini dinyatakan dalam Bahsul Masaailnya dan diperkuat oleh pendapat pribadi K.H. Abdurrahman Wahid yang menyatakan bahwa halalnya atau diperbolehkannya umat Islam bermu'amalah dengan bank itu, disebabkan bunga bank tersebut pada hakikatnya merupakan pemanfaatan uang.<sup>38</sup>

Dengan trik-trik *hillah fiqhiyah* beberapa di antara mereka mengatakan bahwa secara formal bunga bank masih bisa diselamatkan dari cap riba. Sementara beberapa yang lainnya, dalam hati kecilnya mengakui bunga bank itu riba. Namun, karena tidak ada jalan lain untuk mengelak, mereka pun akhirnya berfatwa; "*bunga bank memang riba, tapi riba yang bisa dibenarkan, karena tidak berlipat ganda*".<sup>39</sup> Sudah barang tentu

---

<sup>38</sup> **Panji Masyarakat**, No. 650 hal. 12, dikutip oleh Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 hal.7

<sup>39</sup> Tokoh Islam yang berpendapat bunga bank konvensional masih belum mencapai tingkat keharaman karena belum berlipat ganda antara lain; K.H. Abdurrahman Wahid, Ustadz A. Hasan, Safruddin Prawiranegara, M. Dawam Raharjo SE, dan Syaikhul Hadi. Pendapat mereka ini disanggah oleh Masdar F. Mas'udi, menurutnya pendapat tersebut lemah, karena beberapa alasan; Pertama, yang bersangkutan tidak pernah berhasil menawarkan ukuran bahwa suatu tingkat suku bunga sudah atau belum berlipat ganda. Menurutnya, apabila tingkat suku bunga bank konvensional yang ada sekarang ini 20 – 30 % pertahunnya dibilang belum berlipat ganda ada benarnya manakala tingkat suku bunga bank hanya satu sampai tiga tahun. Tetapi apabila tingkat suku bunga itu diberikan lebih dari tiga tahun, - apalagi dijadikan dana abadi-sebagai andalan penghidupan untuk selamanya, pelipat gandaan itu jelas terjadi. Karena dengan tingkat suku bunga tersebut di atas, setiap tiga sampai lima tahun bunga sudah mencapai 100 % dari jumlah nominal uang yang didepositokan. Kedua, melandaskan keharaman riba semata-mata karena faktor berlipat ganda atas ayat 130 Ali Imran, sama sekali tidak tepat. Dengan mensitir kaidah ushul fiqih DR. Syaikhulhadi mengatakan bahwa dari 10 ayat dalam al-Quran yang mengharamkan riba, hanya satu yang secara fiqih, bisa dipegangi yaitu ayat 130 surat Ali Imran tadi. Karena berbeda dengan 9 ayat lainnya yang katanya sekedar melarang riba. Ayat satu ini sudah memberikan catatan (*qayyid*) yaitu "*riba berlipat ganda*". Kalau demikian, apa makna 9 ayat lainnya itu yang tidak main-main menyatakan kutukannya kepada riba, haruskah ayat-ayat itu dilumpuhkan begitu saja oleh satu ayat, hanya karena ayat

keberanian mereka berpendapat seperti itu harus dihormati. Akan tetapi pada saat yang sama orangpun boleh menyatakan bahwa dengan sistem bunganya, fungsi sosial yang dimainkan oleh bank adalah fungsi sosial yang *munkar (negatif)*. Bunga yang dikenakan oleh lembaga perbankan adalah bagian paling inti dari sistem perekonomian kapitalis yang sangat dikutuk Islam justru karena wataknya yang eksploitatif. Dengan adanya sistem bunga tersebut yang dalam Islam dikenal dengan bunga nasi'ah-kita tahu bahwa hanya pengusaha kuat saja dapat menikmati jasa permodalan bank dengan leluasa. Berbeda dengan pengusaha kecil yang segera akan hangus oleh panasnya bunga yang dipikulnya, pengusaha kuat bisa bersiasat agar panasnya api itu tidak dipikul sendiri. Pengusaha kuat dengan jaringan perangkat manajemennya mampu membagi atau bahkan mengalihkan sama sekali panasnya api riba ketangan masyarakat luas melalui sistem *riba fadhal* maupun *riba yad* yang inheren dalam bangunan perekonomian kapitalis itu sendiri.

Sebagai mana diketahui bahwa dalam pemikiran mu'amalat Islam, riba yang terkutuk itu ada tiga macam.

- 1) *Pertama*, riba nasi'ah. Yaitu kelebihan (*intrest*) yang diperoleh seseorang atas uang atau kapital yang dipinjamkannya kepada orang lain.
- 2) *Kedua*, *riba fadhal*. Adalah keuntungan yang diperoleh dari pertukaran (*jual beli*) jasa maupun barang secara tidak seimbang.

---

yang terakhir ini sudah bicara dengan qayyid. Ketiga, kalau hujjah tersebut tetap dipertahankan, maka yang tidak bisa mereka bantah adalah sejarah urutan turunnya ayat-ayat tentang riba. Ayat 130 Ali Imran ini, ternyata bukan ayat riba terakhir, sebab sesudah itu masih ada ayat riba yang lainnya – dan sekaligus yang terakhir – yang menegaskan keharaman riba dalam kemuthlakannya, yaitu ayat 278 – 280 al-Baqarah yang isinya begitu keras. Ini berarti keharaman riba dimata al-Quran adalah muthlak. Tidak terpengaruh oleh apakah itu berlipat ganda atau tidak, asal itu riba, haramlah hukumnya. (Baca: Masdar F. Mas'udi, **Hak milik dan ketimpangan sosial Telaah sejarah dan kerasulan**, dalam **Kontektualisasi Dokterin Islam**, Editor Budhi Munawar Rachman, Yayasan Paramadina, Jakarta, 1994, hal. 661).

- 3) *Ketiga, riba yad.* Yaitu keuntungan yang diperoleh dari pertukaran jasa atau barang dengan cara mengulur waktu pembayaran. Jika Islam melancarkan kutukannya yang pertama kali adalah riba *nasi'ah*, hal itu bukan karena riba yang lainnya kurang eksploitatif, melainkan karena riba *nasi'ah* adalah penyulut dan pembuka jalan bagi munculnya riba yang lain.

Dalam ketiga macam riba itu, yang selalu diuntungkan adalah orang-orang yang lebih kuat, sedangkan korbannya adalah mereka yang lemah. Dengan keperkasaan modal dan manajemennya pengusaha kuat yang menerima suntikan dana bank mampu melancarkan jurus-jurusnya agar usaha yang dikelola bisa mendatangkan untung (*surplus value*) berlipat ganda; sebahagian untuk dibayarkan kembali pada bank bersama modal, dan sebahagian yang lain untuk dirinya sendiri. Semuanya itu atas resiko yang dibebankan kepada masyarakat yang masuk dalam jaring-jaring usahanya.

Resiko pertama, akibat ulah pengusaha yang harus mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, ditanggung oleh masyarakat yang menjadi kaki tangan usahanya, yakni kaum buruh atau tenaga kerja. Sedikit ada guncangan, jumlah mereka bisa dikurangi. Dalam iklim usaha seperti ini salah satu ukuran manajemen yang baik katanya adalah yang mampu menekan jumlah tenaga kerja seminimal mungkin tapi dengan kesetiaan dan keterampilan kerja yang setinggi mungkin. Tenaga kerja yang sedikit kurang ahli dan kurang setia, harus segera dicarikan penggantinya, kalau perlu dengan mesin robot atau sejenisnya.

Maka dalam sistem ekonomi beralaskan riba, selain pengangguran massal selalu menyertainya, secara politis posisi kaum buruh cenderung diperlemah. Khawatir dipecat kemudian tidak dapat menghidupi diri sendiri dan keluarganya, mereka di-*fait accompli* untuk menerima nasib sebagai mana adanya. Tapi penekanan jumlah tenaga kerja saja belum cukup menjamin



keuntungan yang berlipat ganda. Atas nama *efisiensi*, jam kerja juga harus dicanangkan sepanjang-panjangnya. Mulai pagi buta sampai malam, orang harus memeras pikiran dan tenaga, menghitung angka dan melayani mesin untuk memenuhi ambisi majikannya.

Di atas pundak masyarakat luas, resiko yang harus ditanggung dalam sistem ekonomi riba diabad modern ini, tidak kalah beratnya. Didesak oleh panasnya riba yang menyertai modal usahanya, para pengusaha bersiasat keras untuk –disuatu pihak – menekan harga bahan baku yang umumnya dibeli dari masyarakat dengan harga yang serendah-rendahnya, sedang di lain pihak harga komoditi yang mereka produksi dijualnya dengan harga yang setinggi-tingginya. Se jauh produk yang mereka hasilkan hanya untuk konsumsi kalangan atas yang terbatas, mungkin tidak mengapa. Tapi kalau komoditas itu menyangkut kebutuhan masyarakat luas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan informasi) tentu akan sangat besar akibatnya. Sementara itu masyarakat yang terpepet dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, adalah masyarakat yang lemah untuk tetap setia memenuhi keharusan-keharusan moral dan etikanya.

Tetapi dampak negatif dari ekonomi riba, bagaimanapun tidak berhenti sampai di situ. Pengusaha yang dibakar oleh panasnya riba, jika ada kesempatan juga dapat membagi bebannya kepada siapa saja. Beberapa pos pengeluaran seperti pajak yang harus dibayarkan kepada negara, biaya penanggulangan dampak industri, kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam dan sebagainya, tidak mustahil akan ikut jadi permainan mereka. Kalau perlu dengan memberi suap (*risywah*) kepada pihak-pihak yang berwenang, yaitu aparat birokrasi atau penguasa.

Oleh sebab itu, jika orang berbicara tentang keuntungan besar yang diberikan bank dengan sistem ribanya, maka keuntungan itu

pada hakikatnya hanya keuntungan materi yang dinikmati oleh kalangan yang sangat terbatas saja.

- 1) Pertama dan terutama adalah para bankir yang memiliki dan mengendalikan bank.
- 2) Kemudian dibawahnya, kalangan pengusaha kuat yang mampu memanfaatkan pasilitas modal dari bank.
- 3) Lalu yang ketiga para nasabah kakap yang sengaja membungakan uangnya agar bisa hidup enak tanpa usaha.
- 4) Keempat, para nasabah sedang dan kcil yang mendepositokan uangnya sekedar untuk keamanan atau gengsi.

Yang tidak boleh dilupakan dari keempat golongan yang merasakan keuntungan lembaga bank dengan ribanya, jika ditelusuri lebih jeli lagi, akan ditemukan fakta bahwa seringkali pihak tersebut pertama, kedua dan ketiga, orangnya adalah itu-itu juga. Sebagai bankir sekaligus dia adalah pengusaha besar dan deposan keliber kakap. Orang-orang seperti ini jumlahnya sangat sedikit, tapi jaringan permodalannya sedemikian rupa, ibarat gurita raksasa yang selalu siap menghisap darah masyarakat luas sebagai pangsanya. Itulah kaum *konglomerat*, anak sah dari sistem perekonomian kapitalis modern dengan lembaga ribanya.

Bagaimana dengan masyarakat luas yang berekonomi lemah dan makanpun tidak menentu, lembaga bank tidak punya urusan dengan mereka. Lembaga perbankan hanya berkepentingan dengan orang-orang kaya kelas atas, atau mereka yang ada dikelas menengah. Sistem perekonomian seperti itu tidak layak memperoleh pembenaran dari agama, justeru karena missinya yang secara mendasar bertentangan dengan idealisme sosial agama iu sendiri. Yakni bahwa ***“Kekayaan dibumi ini seharusnya tidak dimonopoli kalangan tertentu saja”***.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الحشر: 7)

### C. Beberapa Pendekatan dalam Memandang Ketimpangan Sosial

Sejak persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial mulai memasuki sejarah pergumulan masyarakat manusia, banyak cara dan upaya yang telah dilakukan –terutama oleh para elit penguasa – dalam menanggulangnya. Namun kesemuanya belum menampakkan hasil yang memuaskan sebagai mana yang diharapkan. Patut disimak dengan apresiasi dan sekaligus kritis terhadap beberapa pendekatan dalam memandang kemiskinan dan ketimpangan sosial tersebut, di antaranya; *pendekatan pasivisme – religious*, *pendekatan sekularisme–kapitalis*, dan *pendekatan materialism-komunis*.

#### 1. Pendekatan Pasivisme - Religious

Menurut aliran ini ada atau tidaknya kemiskinan dan ketimpangan sosial bukanlah urusan manusia, tapi sepenuhnya urusan Tuhan. Pandangan ini berangkat dari paradigma fatalistik yang mengatakan bahwa segala sesuatu telah ditentukan langsung oleh Tuhan, karenanya mereka tidak begitu peduli dengan persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pandangan sosial seperti ini dapat ditemukan dalam tradisi teologi umat manapun, tak terkecuali umat Islam. Dikalangan muslim pandangan ini dicarikan pembenarannya lewat ayat-ayat Al-Quran seperti ayat 32 surat al-Zukhruf ;

أَلَمْ يَقْسِمُوا رَحْمَةً رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ . (الزخرف : 32)

**Artinya:** (Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan beberapa derajat sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan

sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan).

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ (النحل: 71)

**Artinya:** Tuhan telah melebihi rizki sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. (Q.S. al-Nahl : 71).

Pandangan seperti ini selain mengandung kelemahan yang mendasar karena mengambil pesan al-Quran secara terpotong, juga mengandung pengingkaran terhadap idealisme al-Quran yang menganjurkan agar manusia selalu aktif mengupayakan keadilan dalam kehidupan sosialnya. Bukankah dalam memahami ayat-ayat al-Quran kita perlu memahami struktur ayat-ayat al-Quran mana yang berbicara tentang *das sein* (realitas yang ada, selalu fakta) dan mana yang berbicara prihal *das sollen* (realitas ideal sebagai cita-cita).

Pemahaman ajaran agama secara doktriner cenderung meletakkan semua ayat sebagai acuan tentang “*das sollen*” (apa yang seharusnya ada). Jika apa yang senyatanya ada (realitas kini) dipahami sebagai yang seharusnya ada, yang terjadi adalah kemandegan sejarah. Lebih jauh lagi manakala prinsip *aktivisme* yang ditekankan oleh al-Quran dipahami dengan prinsip *pasivisme* maka fungsi ayat yang memerintahkan ikhtiyar mengubah nasib dan memperbaiki kehidupan menjadi lumpuh. Bukankah banyak ayat al-Quran yang berbicara tentang upaya ikhtiyar yang perlu dilakukan umat agar mencapai kehidupan yang lebih baik, dan memperhatikan kondisi kehidupan orang-orang miskin, seperti ayat (Q.S: al-Ma’un : 1 – 3) yang berbunyi;

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ

**Artinya:** *(Tahukah kamu siapakan orang yang mendustakan agama? Dialah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau mengusahakan secara serius persoalan makan (kebutuhan dasar) bagi orang-orang miskin).*

Semua orang Islam tokoh maupun awam mengenal baik ayat ini. Dalam setiap waktu hampir selalu dibaca. Akan tetapi sepanjang sejarahnya yang lebih dari sepuluh abad, ternyata belum juga berhasil menggerakkan umat Islam merumuskan kosep yang tangguh untuk mengatasi derita kemiskinan dan ketimpangan sosial yang diprihatinkannya. Memang dalam kehidupan nyata selalu saja ada perbedaan antara penghidupan seseorang satu dengan yang lain, seperti diungkapkan oleh bagian ayat al-Zukhruf 32 dan al-Nahl 71 tersebut di atas. Ada yang berpenghidupan sebagai direktur, pengusaha atau jendral, ada pula pegawai dan buruh dengan bakat serta keterampilan yang berbeda-beda, penghasilan dan derajat sosial yang cendrung tidak sama. Sehingga dikenal ada masyarakat lapisan atas, lapisan menengah dan lapisan bawah.

Mengemukakan adanya pelapisan sosial, karena perbedaan peran sosial, adalah fungsi obyektivitas al-quran. Obyektifitas adalah prinsip keilmuan untuk melihat realitas sebagaimana adanya. Tapi obyektivitas keilmuan bukanlah segalanya. Merasa puas dan kemudian berhenti hanya pada obyektivitas keilmuan adalah kedhaliman yang nyata. Obyektivitas keilmuan hanya akan punya makna jika diikuti dengan segera oleh subyektivitas keagamaan (*religious consciousness*), yang tidak lain adalah pemihakan untuk melakukan perubahan.

Pada ayat yang sama al-Quran memaparkan fakta obyektif berupa perbedaan peran dan kemudian derajat sosial dalam masyarakat manusia dengan desakan agar diwaspadai melalui sikap kritis jangan sampai berdampak pada terbentuknya hubungan eksploitatif oleh mereka yang di atas terhadap saudaranya yang ada dibawah. Jika hubungan eksploitatif itu terjadi, maka kita

harus berusaha mentranspormasikannya pada pola hubungan saling melayani (sebagaimana ditegaskan oleh bagian akhir dari al-Zukhruf :32) dimana yang kuat bisa dipaksa, kalau tidak mau secara sukarela mengembalikan kelebihan yang diperoleh bagi kepentingan orang lain yang berkekurangan dan lemah (seperti yang ditegaskan oleh bagian akhir dari al-Nahl : 71).

Memang harus diakui pendekatan pasivisme keagamaan ini bukan tidak punya keperihatinan atas kemiskinan sebagai derita kehidupan. Akan tetapi bagi mereka kemiskinan terjadi karena semata-mata takdir Tuhan, dan oleh sebab itu harus diterima dengan segala kepasifan. Apa yang mereka lakukan terhadap persoalan itu cukup sederhana: Beri orang-orang miskin itu santunan berupa makanan, pakaian, uang atau lainnya. Atau suatu treatment yang bersifat formalistis dan karitatif; semata-mata menuruti perintah ajaran untuk meringankan beban orang miskin. Tidak pernah jadi pemikiran mereka apakah dengan santunan itu simiskin bisa mengentaskan diri dari derita kemiskinannya. Bagi mereka, itulah urusan Tuhan, jika dikehendaki seketika ia bisa kaya raya. Tapi jika tidak, usaha apapun yang dilakukan manusia kemiskinan tetap menyimpannya.

## **2. Pendekatan Skularisme – Kapitalis**

Menyusul pendekatan pasivisme-relegious adalah pendekatan sekularisme-kapitalis. Apabila pendekatan pertama mengatakan kemiskinan merupakan urusan tuhan, maka pendekatan kedua ini berpendapat bahwa kemiskinan itu merupakan persoalan manusia. Kalau mau dan tahu jalannya, manusia bisa mengatasinya dengan kekuatan sendiri. Menurut? mereka Tuhan tidak punya urusan dengan soal-soal seperti ini. Masalahnya adalah apakah memang perlu kemiskinan itu di atasi?. Bertolak dari pendirian bahwa segala sesuatu memiliki kegunaannya sendiri-sendiri bagi tertib kehidupan, maka kemiskinan tidak boleh ditiadakan. Membiarkan kemiskinan yang keterlaluan memang tidak bijaksana, akan tetapi melenyapkannya juga bisa berbahaya. Yang penting bukan

mengatasi kemiskinan melainkan mengendalikannya agar tidak sampai merusak tatanan.

Paham ini memandang kemiskinan sepenuhnya terjadi atas kesalahan atau kekurangan yang ada pada diri orang-orang miskin itu sendiri. Yaitu karena mereka tidak memiliki sifat-sifat pribadi yang lazim dimiliki oleh orang-orang yang kaya, seperti keuletan mencari duit, gemar menabung dan sebagainya. Oleh sebab itu satu-satunya jalan untuk memperbaiki nasib simiskin, adalah pendidikan sebagai upaya pengembangan sumber daya untuk menanamkan sifat tersebut pada diri pribadi orang-orang miskin itu. Kemiskinan adalah suatu fenomena yang bersekala perorangan, karena itu harus didekati juga dalam skala perorangan. Realitas sosio-struktural menunjukkan, orang-orang kaya dan kalangan mapan lainnya menyandarkan kepentingannya tidak ada hubungan apapun dengan masalah kemiskinan.

Sementara itu mempersiapkan orang miskin menjadi berpotensi kaya dengan strategi pendidikan, memerlukan modal yang tidak sedikit. Untuk pendidikan perlu banyak sarana dan prasarana yang tidak murah. Sesudah pendidikan modal usaha juga harus disediakan. Artinya, bahwa program memecahkan kemiskinan pada ujungnya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh masyarakat miskin itu sendiri, tapi oleh orang-orang kaya juga. Dengan demikian, usaha mengatasi kemiskinan menurut teori ini akan selalu ditunggangi oleh kepentingan pihak kaya dalam mempertahankan kekayaannya disuatu pihak dan melanggengkan ketergantungan simiskin kepada mereka dilain pihak. Apa yang dilakukan negara-negara kapitalis terkemuka kepada negara-negara dunia ketiga belakangan ini memperlihatkan dengan jelas skenario tadi.

Meski begitu, paradigma sekular-kapitalisme ini bukan tidak punya daya tarik. Buat banyak orang yang gampang silau dengan kekayaan dan - karena itu - kurang mau berpikir sedikit lebih kritis, daya tarik itu terletak pada tercapainya tingkat kemakmuran

material dalam masyarakat yang sejak lama menerapkan konsep kapitalisme secara saksama. Misanya Amerika, Jepang dan beberapa negara di Eropa Barat. Seperti diketahui, tingkat pendapatan perkapita di negara-negara ini memang yang tertinggi di antara semua negara yang ada. Akan tetapi apabila kita lihat lebih teliti dan dalam perspektif sosial yang lebih luas akan segera terasa bahwa paradigma sekular kapitalisme ini tetap merupakan musuh keadilan yang wajib diperangi, karena beberapa bukti. Pertama, di lingkup masyarakat yang menerapkan konsep itu sendiri ketimpangan sosial antara golongan kaya dan yang miskin cenderung semakin tajam. Bahkan lebih tajam dibanding yang terjadi dikalangan masyarakat lain yang tidak menerapkannya. Kedua, apabila jumlah orang miskin di lingkungan masyarakat kapitaslis yang kaya raya bisa diperkecil, hal itu sebenarnya terjadi atas biaya kemiskinan masyarakat bangsa-bangsa lain yang masuk dalam jaringan dan perangkap mereka. Proses globalisasi ekonomi yang kini tengah terjadi, pada hakikatnya adalah momentum besar bagi kekuatan kapitalis untuk memperluas jaringan dan perangkapnya itu.

Tidak kalah mendasar dari keberatan-keberatan tadi adalah yang berkaitan dengan pandangan kemanusiaan dari teori sekular-kapitalisme itu sendiri dengan menjunjung tinggi kebebasan individu untuk meraih kebahagiaan setinggi-tingginya. Kedengarannya paradigma kapitalisme sangat manusiawi dan sejalan dengan misi universal agama-agama. Akan tetapi karena apa yang dimaksud dengan kebahagiaan dalam slogan itu, sesuai iman sekularitasnya, adalah kebahagiaan duniawi, maka yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat penganut paham ini adalah jaminan bahwa dukungan bagi setiap orang untuk mengumbar nafsu ketamakan dan kerakusannya, suatu masyarakat yang dalam al-quran dilukiskan sebagai masyarakat yang selalu berdaya upaya untuk menghimpun kekayaan sebanyak-banyaknya karena mengira kekayaan itulah yang bakal menjamin kelangsungan hidupnya.



Allah memperingatkan orang-orang semacam ini dengan firmanNya;

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3)  
كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نَارُ اللَّهِ الَّتِي تَمُوقِدُ (6)  
الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْفُؤَادَةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّصَدَّدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9)

**Artinya:** (Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, tidak ! Sekali-kali tidak . Sesungguhnya dia akan dilemparkan kedalam hutamah. Tahukah kamu apa Hutamah itu ? (yaitu) api (azab) dari Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati, Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang. (Q.S. al-Humazah : 1 – 9).

Dan untuk itu dukungan bukan saja diberikan oleh sistem politik dan ekonomi tetapi juga oleh sistem budaya, keilmuan dan juga agama.

Sementara itu semua orang tahu bahwa obyek ketamakan dan kerakusan kapitalistik ini adalah sumberdaya alam yang terbatas persediaannya. Sumberdaya alam yang tidak bakal memuaskan hawa nafsu setiap orang yang memujanya. Oleh sebab itu dari masyarakat penganut paham sekular kapitalistis ini akan selalu disaksikan - dan semua kita kini telah menyaksikan - sikap dan tingkah laku keras kepala mereka dalam mempertahankan dua hal yang sangat berbahaya bukan saja bagi moralitas keadilan, tetapi juga bagi kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri secara keseluruhan. Yakni pertama adalah derita kesengsaraan orang-orang yang kalah dan terlempar dalam menghadapi kerakusan

mereka; dan kedua eksploitasi gilagilaan atas kekayaan alam yang dapat mengancam daya tahan dan keselamatannya.

Memang mereka sering memperlihatkan sikap iba melihat bumi yang terus diperkuasa dan melihat orang-orang lemah yang semakin tak berdaya. Berbagai aksi kritis untuk melindungi kekayaan alam berupa flora maupun fauna disuatu pihak, dan berbagai uluran tangan kederawanan untuk negara-negara miskin yang menderita kelaparan atau musibah bencana alam dipihak lain, memperlihatkan dengan mencolok sikap iba dari mereka. Akan tetapi sangat boleh jadi semuanya itu hanya tipu muslihat untuk menina bobokkan orang-orang yang tidak waspada. Buktinya begitu mereka didesak untuk mengubah tata kehidupan ekonomi dan politik terutama dengan kelestarian bumi manusia dan orang-orang yang lemah umumnya di dunia ketiga bisa dilindungi secara struktural tanpa pikir panjang hati dan mulut mereka segera menyatakan penolakannya. Jalan buntu yang terjadi dalam berbagai perundingan utara selatan dan perundingan global lainnya mengenai kedua hal tersebut merupakan bukti nyata atas sikap dasar penganut paradigma sekular kapitalisme ini.

### **3. Pendekatan Materialisme – Komunis.**

Pendekatan ketiga adalah pendekatan materialisme komunis. Sebagai antitesis terhadap pendekatan pertama dan kedua. Pendirian dasar dari pendekatan ketiga ini adalah “bahwa kemiskinan bisa di atasi dan harus di atasi bukan oleh Tuhan atau oleh belas kasih orang kaya melainkan oleh orang-orang miskin itu sendiri”. Pendekatan ketiga ini melontarkan tuduhan terhadap kedua pendekatan pertama. Bahwa mereka telah bersama-sama menina bobokkan golongan miskin untuk menuntut hak-haknya yang terampas dari tangan golongan kaya. Bedanya pendekatan pertama (pasivisme-religious) menina bobokkan kaum miskin dengan janji-janji sorganya. Sedang pendekatan kedua (sekular – kapitalisme) menina bobokkan orang miskin dengan trik-terik karitas gaya sinterklasnya.

Pada level individual pendekatan ketiga diaktualisasikan antara lain, melalui aksi ala Robin Hood dengan mengambil kembali hak-hak material miskin dari tangan orang-orang kaya secara paksa. Dalam Islam sejauh aksi sepihak itu dilakukan sebagai penyelesaian darurat oleh orang yang benar-benar terpepet secara relatif bisa dipahami. “*al-daruratu tubi al mahdhurat*” (keterpepetan yang sangat, dapat membolehkan yang semula dilarang), dan “*al-masyaqqatu tajlibu al-taisir*” (Kesulitan membawa kemudahan).

Pernah suatu ketika beberapa budak milik Hathib bin Abi Balta’ah mencuri seekor onta kepunyaan tetangga, dan menyembelihnya. Menerima pengaduan itu, Umar bin Khatthab r.a. tidak segera menjatuhkan hukuman melainkan lebih dahulu bertanya kepada budak-budak itu tentang sebab-musabbab mengapa sampai mencuri. Ternyata mereka benar-benar terpepet untuk mengisi perut karena ditelantarkan oleh majikannya. Khalifah Umar Ra. benar-banar marah. Hathib segera dipanggil dan dipaksanya untuk mengganti onta yang dicuri budak-budaknya tersebut. Sementara budak budak itu sendiri ia bebaskan dari segala tuntutan. Pada level kolektif pendekatan ketiga yang komunistis ini diaktualisir secara besar-besaran dan penuh kedengkian melalui perjuangan politik berskala massif. Di Indonesia hal itu pernah terjadi, ketika awal tahun 60 – an sejumlah petani yang tergabung dalam Barisan Tani Indonesia (BTI) secara sepihak mengkapling tanah ladang atau sawah milik orang-orang kaya didesanya. Memang di antara semua sistem sosial modern yang ada, komunisme patut memperoleh pujian sebagai yang paling lantang menyuarakan kepentingan orang-orang yang tidak punya. Dan kalau kita mau jujur, pesan moral setiap agama ketuhanan memang begitu adanya bahkan lebih.

Akan tetapi karena cacat mendasar pada akidah (*filosofi*) maupun syari’ah (*kerangka institusional*)–nya, komunismepun gagal patut digagalkan. Cacat akidah terletak pada pandangannya

terhadap hakikat manusia sebagai tidak lebih dari fenomena material belaka. Suatu pandangan kemanusiaan yang menurut kisah kejadiannya di *introdusir* pertama kali oleh tokoh antagonis yang bernama Iblis. Dalam percakapannya dengan Tuhan, Iblis pernah menyatakan pandangannya tentang manusia sebagai makhluk yang tercipta hanya dari tanah liat.

Hakikat manusia sebagai ruh yang memiliki persambungan transendental dengan Tuhan, diingkarinya. Konsepsi keadilan manusiawi yang ditawarkan oleh pandangan kemanusiaan madzhab ini menjadi begitu naif. Konsep keadilan yang sebenarnya sangat *sublim*, direduksi sedemikian rupa menjadi hanya terbatas pada aspek ekonomi dengan pengertian kesamarataan hak-hak materi. Mereka mengira bahwa hanya dengan terpenuhinya kebutuhan materi, sempurna sudah semua cita-cita hidup manusia.

Pada level syari'ah ( *pelebagaan* ) nya, kenaiifan mereka lebih kentara lagi. Meskipun selalu berangkat dari klaim kepentingan rakyat kecil, kaum proletar, akan tetapi apa yang diperbuat oleh komunisme sebagai sistem sosial dan politik tidak lain adalah pemancangan secara paksa dominasi segelintir orang yang berkuasa atas mayoritas rakyat yang tidak berdaya – atau sengaja dibikin tidak berdaya. Atas nama kepentingan kaum miskin, elite penguasa mengklaim kewenangan yang haram dibantah. Akibatnya harga kemanusiaan (*human dignity*) sebagai makhluk moral dan spiritual dinistakannya sama sekali.

Kebebasan berpikir dan berkeyakinan sebagai prasyarat muthlak bagi aktualisasi hakikat kemanusiaan yang ruhani, dianggap *absourd*. Maka meskipun kesenjangan ekonomi dinegara komunis relatif lebih terjembatani, dibanding dinegeri-negeri lain yang menganut pendekatan *pasivisme-religius* dan *sekular-kapitalisme*, akan tetapi kesenjangan dibidang non ekonomi, sangatlah lebar. Di sana hanya segelintir orang memiliki

kebebasan berbicara dan berpendapat, sementara mayoritas yang sangat besar hampir - hampir tidak mengenalnya sama sekali.

#### **D. Konsep Islam dalam Menanggulangi Ketimpangan Sosial**

Dalam al-Quran ada pernyataan yang cukup menentang, khususnya bagi konseptor pembangunan yaitu ayat yang berbunyi:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (هود : 6)

*Artinya: (Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberinya rezki, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata). (Q.S : Hud : 6)*

Memang tidak semua orang mau membuka hatinya untuk menerima Firman Allah ini. Akan tetapi untuk menolak kebenarannya begitu saja agaknya juga tidak gampang, karena data statistik yang paling teliti sekalipun selalu saja menunjukkan bahwa kekayaan alam yang disediakan Allah di bumi ini sebenarnya sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan - bedakan dengan keinginan - makhluk hidup yang melata di atasnya, tidak terkecuali umat manusia. Lebih-lebih dengan senjata teknologinya, umat manusia kini mampu mengeksplorasi kekayaan alam yang tersimpan diperut bumi yang paling dalam sekalipun. Oleh sebab itu apabila dalam kenyataannya banyak orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan *dharury*-nya, apalagi *takmily* atau *tahsini*-nya, itu bukan karena *supply* yang terbatas melainkan lebih disebabkan *distribusi* yang terampas.

Keterampasan ini memang tidak terjadi secara individual, langsung dari tangan orang yang berhak, tetapi melalui tatanan sosial yang timpang. Karena orang yang kaya bisa terus memperbesar kekayaannya, sementara yang miskin semakin tenggelam dalam kemiskinannya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan hak orang-orang yang terampas, yang

perlu dilakukan adalah aksi sosial dengan membenahi kembali struktur dan sistem perekonomian masyarakat bersangkutan, dimana neraca kekuatan antara yang kaya dengan yang miskin bisa diatur kembali secara seimbang.

Memang, apabila desakan kolektif untuk memecahkan ketimpangan sosial ini sengaja tidak dilakukan, atau dilakukan dengan main-main, maka desakan bagi meletusnya tindakan anarkis yang melawan hukum – dan bahkan disintegrasi bangsa - menjadi sulit dihalang-halangi. Mengharapkan orang terus bersabar menahan lapar sementara sendirinya bergelimang dengan segala kemewahan, tentu sangat tidak bermoral. Nabi SAW mensinyalir hal ini dengan haditsnya; “Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman orang yang tidur dengan perut kenyang, sementara dia tahu tetangganya menangis karena kelaparan”.<sup>40</sup>

Sementara itu, karena masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial pada dasarnya terjadi akibat tatanan sosial yang buruk, sudah barang tentu negaralah instrumen yang harus digunakan untuk mengatasinya. Yang dimaksud dengan negara adalah persekutuan kolektif yang mencakup kalangan masyarakat kaya dan masyarakat miskin secara bersama-sama. Negara yang hanya persekutuan orang-orang kaya bisa menjadi drakula keserakahan. Sebaliknya negara yang hanya merupakan persekutuan orang-orang melarat cenderung menjadi monster kedengki.

Hanya dengan komitmen kedua belah pihak negara bisa berfungsi sebagai arena pergumulan untuk menemukan sintesa keadilan antara kedua kelompok masyarakat tadi. Melalui negara, orang-orang kaya dapat membayar kewajibannya untuk menegakkan keadilan atas pundak saudara-saudaranya yang miskin. Dalam pandangan Islam menegakkan negara untuk tujuan keadilan hukumnya wajib; bukan saja dari sudut nalar, tapi sekaligus moral.

---

<sup>40</sup> *Dalam konteks kehidupan umat manusia yang semakin menjadi satu keluarga, dimana planet bumi sudah bisa dijelajah dalam tempo 24 jam dan apa yang terjadi dipelosok bumi barat dapat diketahui oleh manusia dipelosok bumi timur pada hari yang sama, maka term “tetangga” yang dipakai Nabi SAW dalam hadits ini tentunya ikut mengalami perubahan. Tidak lagi semata-mata terbatas pada orang atau keluarga yang tinggal di samping kita.*

Dalam pada itu, sejauh persoalan yang ingin dipecahkan adalah 1) kemiskinan pada orang yang selama ini kehilangan hak-hak dasarnya, terutama hak atas kebendaan, dan 2) ketimpangan sosial yang menganga lebar antara golongan kaya dan yang tidak punya, maka yang muthlak harus dilakukan oleh negara sebenarnya cukup jelas dan sederhana. Dengan tetap mengakui keabsahan hak perorangan atas benda yang jadi kebutuhan hidupnya sebagai basis bagi hak-hak dasar kemanusiaan lainnya.<sup>41</sup> Maka untuk persoalan pertama solusinya adalah dengan merekayasa suatu kontrak sosial, dengan golongan yang bisa diikat komitmennya untuk secara irreguler menginfakkan sebahagian dari rizki yang dikuasainya bagi kepentingan pihak lain yang tidak punya. Sedang untuk persoalan kedua, bagaimana kesenjangan sosial bisa dipersempit, solusinya tentulah dengan memberi kekuatan kepada yang lemah tadi – setelah dipenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya melalui langkah pertama – untuk dapat mengembangkan sendiri penghidupannya.

Di samping itu elit penguasa mengakui secara konsisten terhadap keberadaan hak kepemilikan bagi oarang-orang miskin baik berupa tanah pertanian, pekarangan, sawah dan lain sebagainya. Pengakuan tersebut diwujudkan dalam bentuk kompromistis secara sukarela ketika hak-hak mereka harus digusur dari tangannya karena kepentingan yang lebih besar.

Secara formal, solusi pertama sebenarnya sudah dimulai di hampir setiap negeri dengan sistem pajak (*tax*) nya, bahkan pajak progresif. Hanya saja fungsi pajak sebagai penjamin keadilan terutama bagi yang lemah masih harus ditransformasikan dengan sekuat tenaga. Terikat oleh persepsi jahiliyahnya mengenai pajak, masyarakat dimana - mana masih menganggap pajak sebagai hutang rakyat terhadap negara dan untuk negara. Akibat dari itu yang terjadi adalah bahwa prioritas utama dan terutama dari pengalokasian (*pentasarrufan*) uang pajak adalah untuk

---

<sup>41</sup> Dikalangan pemikir muslim lebih dari 10 abad yang lalu, hak-hak dasar manusia dirumuskan kedalam lima hal: i) hak untuk hidup, ii) hak berkeyakinan, iii) hak berfikir / berpendapat, iv) hak pemilikan matei, v) hak berketurunan. Imam al-Ghazali menambahkan satu lagi yaitu hak untuk tidak dirusak kehormatannya. Baca : Syathiby, *al-Muwafaqat*, Mesir Juz, I hal. 14.

memperkuat eksistensi dan wibawa negara, bahkan sering dengan korban rakyat sendiri. Atau jika korban itu tidak lagi dimungkinkan dari kalangan rakyat sendiri, dicarinya dari rakyat bangsa negeri-negeri lain.

Negara perlu diperkuat, memang ada gunanya. Akan tetapi negara yang perlu diperkuat itu adalah negara yang berikrar untuk menjadi pelayan (*amil*) bagi kepentingan rakyat, bukan negara yang justeru merasa bangga ketika bisa mnyentromi dan menggagahi rakyat. Negara yang boleh diperkuat adalah negara yang menyadari sepenuhnya bahwa uang pajak yang ada ditangannya adalah amanat Tuhan yang harus dipergunakan bagi keadilan dan kesejahteraan bersama, yang dimulai justeru dari lapisannya yang tidak berdaya. Sistem perpajakan sebagai sukoguru lembaga negara masih harus ditransformasikan sedemikian rupa, sehingga penggunaannya sejalan dengan firman Allah yang berbunyi ;

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة : 60)

**Artinya:** (Sungguh sedekah (*upeti* /pajak) itu milik orang-orang fakir, orang-orang miskin untuk keperluan negara sendiri sebagai pelaksana, milik orang-orang yang perlu disadarkan hatinya, milik orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tertindih hutang, untuk kesejahteraan bersama, dan juga untuk anak jalanan. Itulah ketentuan Allah, dan Allah sungguh maha mengetahui lagi maha bijaksana). (Q.S : 9 : 60).

Sedangkan untuk persoalan kedua, bagaimana golongan lemah dapat mengembangkan usahanya sendiri, strategi pemecahannya tentulah dengan mendekatkan kembali sumber-sumber permodalan kepada mereka tanpa mengabaikan faktor pendidikan yang membebaskan. Bila ini dilakukan, ketergantungan golongan lemah kepada negara (baca : dana pajak) yang mereka sendiri sebenarnya tidak menyukainya, pada akhirnya bisa dikurangi. Strategi mendekatkan sumber-sumber permodalan kepada golongan kapitalis dalam pranata riba. Pertama-tama riba *nasi'ah* harus



dibuang dari sistem permodalan, baik yang diterapkan oleh lembaga bank maupun lembaga sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “riba” di sini tidaklah mencakup seluruh apa yang umumnya disebut sebagai bunga pinjaman. Karena apabila seseorang meminjam uang rupiah 1 (satu) juta selama satu tahun, padahal dalam satu tahun itu telah terjadi penurunan nilai (inflasi) atas rupiah sebesar 9 persen, maka pembayaran kembali satu juta rupiah plus 9 persennya tentulah pengembalian yang seutuhnya. Tidak dikurangi dan tidak dilebihi. Maka seperti firman Allah dalam Surat al-Baqarah 279, riba yang dimaksudkan untuk uang adalah pembayaran pinjaman yang dipersyaratkan melebihi nilai nominal (*ra’su al-mal*) – nya. Dalam bahasa ekonomi riba adalah bunga pinjaman yang melebihi *rate infalis* nya.

Dengan dihapusnya unsur riba – dalam pengertian tersebut di atas – tidak perlu ada pihak yang dirugikan, kalau tidak malah diuntungkan. Pihak debitur yang umunya pengusaha akan dikurangi tekanan mental dan fisiknya karena beban mental untuk mengejar keuntungan (*surplus value*) berlipat ganda bisa diturunkan. Dan jika ini terjadi, masyarakat luas juga akan merasakan keuntungannya. Disuatu pihak harga jual barang yang diproduksi para pengusaha bisa diturunkan, dan dilain pihak harga jual bahan baku yang dihasilkan dengan kerja keras masyarakat, juga bisa diperbaiki.

Dalam sistem ekonomi bebas riba, seleksi lapangan kerja bisa dikendorkan. Sektor-sektor industri dan kegiatan-kegiatan ekonomi lain yang bersifat padat karya kembali dimungkinkan. Sehingga yang bisa di tampung dalam dunia usaha tidak lagi terbatas hanya orang –orang yang sangat ahli dan berpendidikan tinggi. Orang-orang yang kurang ahli dengan pendidikan menengah, bahkan rendahpun tidak perlu terlalu risau karena langkanya lowongan kerja. Tingkat angka kesempatan kerja yang berarti rendahnya angka pengangguran, apalagi dengan kemungkinan upah yang lebih baik – lagi-lagi karena perusahaan tidak dibebani riba – pada gilirannya akan memperkuat daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang kuat dimana-mana adalah landasan muthlak bagi jalannya perekonomian itu sendiri secara berkesinambungan.

Tidak kalah penting dari keuntungan masyarakat luas dengan hilangnya riba adalah dipulihkannya akses golongan masyarakat lemah terhadap modal. Tidak seperti sekarang akses itu hanya dinikmati oleh golongan yang kuat saja, minimal menengah. Ini berarti kesempatan bagi golongan ekonomi lemah untuk ikut memiliki alat produksi dan atau menjalankan sendiri usahanya kembali dibuka. Itu jika usaha sendiri tidak dimungkinkan, misalnya karena alasan keahlian atau minat, mereka bisa menawarkan tenaganya kepada orang lain tanpa harus menjadi korban eksploitasi oleh perusahaan yang mempekerjakannya.

Juga lembaga permodalan bank itu sendiri, tidak perlu harus merugi. Memang dalam sistem ekonomi non riba ini bank tidak berhak mengeruk untung, tapi harus bisa berkembang sebagai lembaga sosial atau *baitul mal* atas tanggungan masyarakat seluruhnya, baik sebagai penyimpan maun peminjam. Karena keberadaannya memang merupakan kepentingan bagi semua. Yang punya duit berkepentingan dengan bank non riba atau baitul mal karena dengan jasanya ia bisa menyimpan duitnya dengan jaminan inflasi dan sekaligus pengaman dari kemungkinan pencuri. Bahkan jika yng bersangkutan sebagai deposan adalah orang yang terpanggil oleh anjuran al-Quran, maka keuntungan lain yang tidak kalah besarnya adalah bahwa dengan lembaga bank tersebut disuatu pihak mereka dapat *mentasarrufkan* (meminjamkan) uangnya kepada orang lain secara terjamin, dan dipihak lain dapat terhindar dari ancaman Allah atas orang-orang yang gemar menyimpan kekayaan dengan memutuskan fungsi sosialnya. Dalam surat al-Taubah ayat 34 – 35 Allah berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ  
وَيُظْهِرُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فَدُوفُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (التوبة: 34 – 35)

**Artinya:** *Wahai orang-orang yang beriman ! Sungguh banyak rahib-rahib dan pendeta-pendeta memakan harta orang lain dengan cara bathil dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Dan orang-orang yang gemar menyimpan emas perak dan tidak mendayagunakannya untuk kabaikan, berikan kepada mereka kabar gembira prihal siksa yang amat pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakaar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang apa yang kamu simpan itu.*

Dalam konteks sekarang dimana penyimpanan kekayaan untuk diri sendiri tidak lagi hanya dalam bentuk emas atau perak, tapi juga dalam bentuk uang, ayat tersebut menunjuk dengan jelas akan haramnya menyimpan uang dibawah bantal seperti yang telah mentradisi dimasyarakat. Tradisi seperti itu bukan saja bodoh dilihat dari kacamata ekonomi, karena membiarkan uang digrogoti inflasi dan dengan mudah dapat tercuri, tapi juga bodoh secara moral karena memutuskan fungsi sosial dari kekayaan yang nota bene adalah amanat Allah untuk kemaslahatan semua orang. Dengan bantuan bank sebagai baitulmal setiap orang dapat menyimpan uangnya sekaligus memfungsikannya secara positif bagi kepentingan sosial.

Sementara itu kepentingan orang yang memerlukan uang terhadap keberadaan lembaga bank non riba adalah jelas. Dengan lembaga itu mereka dapat memenuhi keperluannya tanpa ada kemungkinan diperas dan memeras. Memang perlu ada pembatasan bahwa yang berhak memperoleh uluran tangan lembaga bank sosial ini adalah mereka yang hendak menggunakan dana itu untuk tujuan produktif yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat banyak, atau untuk kepentingan konsumtif yang non kemewahan.

Memang dengan hilangnya riba, golongan punya yang kapitalis akan kurang berminat mendepositokan uangnya di bank, tapi lebih suka menggunakannya untuk membiayai usaha sendiri. Kalau kekhawatiran ini benar tentu hal itu hanya terjadi pada sebahagian orang saja. Orang yang

tidak punya waktu untuk membuka usaha atau merasa kurang mampu menjalankan usaha tidak akan ikut terbawa arus itu. Kalau saja kaum kapitalis itu merasa terdesak untuk menginvestasikan uangnya, akan lebih bermaslahat bagi diri dan masyarakatnya. Semakin tinggi dan meluas kegiatan usaha suatu masyarakat, akan semakin tinggi pula daya tahan ekonominya. Dan dalam masyarakat modern yang daya tahan ekonominya tinggi, keberadaan lembaga bank, sekalipun tanpa riba, tetap kokoh adanya.

Sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan umum dan keadilan sosial, negara memiliki kewenangan dan kemampuan yang memadai untuk melaksanakan dua solusi tersebut di atas. Tidak ada hambatan maupun rintangan yang dapat menghalanginya kecuali suatu kesadaran. Dan kesadaran di sini tidak cukup hanya dari pihak pelaksana kebijakan negara. Apalagi yang masih terbatas pada lapisan verbal belaka. Kesadaran yang mendalam dan merata dihati segenap rakyat terutama yang ada dilapis bawah – merupakan kunci yang sangat menentukan tumbuhnya kesadaran yang lebih kuat ditingkat para pengambil kebijakan negara dan juga pelaksananya, yang kemudian diaktualisasikan dalam tindakan nyata dengan merubah tatanan yang selama ini merintangi tujuan bersama, keadilan sosial. (Q. S : al-Ra'd : 11).

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد : 11)

**Artinya:** (Sungguh Allah tidak akan merubah nasib suatu masyarakat sampai masyarakat itu sendiri merubah tatanan yang mendominasi perikehidupan mereka).

# **BAB V**

## **IMPLIKASI ANTARADHIN TERHADAP PEMINDAHAN HAK KEPEMILIKAN**

### **A. Sistem Pemindahan Hak Milik**

Islam mengakui adanya hak kepemilikan secara individu, karena itu Islam melindunginya. Ini terbukti adanya hukuman yang keras bagi siapa saja yang mengambil alih hak kepemilikan orang lain tanpa prosedur hukum yang sah. Adanya hukum potong tangan bagi para pencuri adalah salah satu bukti perlindungan hak kepemilikan tersebut. Bahkan Nabi SAW menyatakan kesiapannya memotong tangan puterinya sendiri mana kala puterinya itu melakukan pencurian. Islam juga membolehkan seseorang untuk membela hartanya dengan melawan perampas yang menyeranginya, serta menjadikan orang-orang yang terbunuh karena membela hartanya sebagai syahid seperti halnya orang terbunuh karena membela agama, darah dan keluarganya.

Pembolehan kepemilikan secara individu seperti tersebut di atas adalah sebagai fenomena, bukti dan jaminan pertama untuk kebebasan, eksistensi dan kelestariannya. Dikatakan demikian karena ketika sistem Islam mengakui hak milik pribadi, sesungguhnya ia ingin memenuhi dorongan fitrah yang murni pada manusia itu sendiri, yaitu kecintaan untuk memiliki. Hal ini dapat dibuktikan pada anak kecil yang sejak dini sudah mempunyai rasa memiliki, mereka riang dengan barang yang mereka miliki dan menangis manakala barang yang dimilikinya itu hilang atau diambil oleh orang lain. Pengakuan adanya hak milik individu tersebut juga dianut oleh sistem ekonomi kapitalis. Cuma saja, jika Islam membenarkan adanya hak kepemilikan itu karena memang fitrah manusia itu sendiri, maka kaum kapitalis melihatnya dari dampak kehidupan ekonomi dan kemajuan materi yang dapat merangsang pertumbuhan dan penambahan kekayaan.

Nampaknya Islam menempatkan hak milik individu termasuk fenomena kebebasan paling menonjol yang harus dihormati. Akan tetapi hal itu bukan berarti hak milik tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain, sebab kepentingan terhadap suatu barang terkadang dirasakan lebih bagi orang lain ketimbang sipemilik barang itu sendiri, bahkan kepentingan *ijtima'iy* di atas kepentingan individu. Dalam skala nasional, penguasa berhak memaksa pengambilalihan hak individu untuk digunakan bagi kepentingan yang lebih besar.<sup>42</sup> Untuk itu Islam menetapkan berbagai aturan agar hak kepemilikan terhadap suatu barang dapat dipindahtangankan. Terdapat beberapa sistem pemindahan hak kepemilikan, di antaranya dapat dilakukan dengan cara;

### **1. Waris dan Wasiat**

Pada dasarnya pemindahan hak milik didasari dengan prinsip suka sama suka karena yang demikian itu akan memberi dampak ketenangan jiwa bagi kedua belah pihak. Namun tidak demikian halnya dengan waris dan wasiat, keduanya tidaklah diharuskan adanya suka sama suka karena masalah waris dan wasiat ini sudah diatur tersendiri dalam hukum Islam dan tidak memerlukan adanya prinsip suka sama suka antara pewaris dengan yang mewariskan. Hal ini tidak diperlukan karena pemindahan tanganan hak kepemilikan melalui waris atau wasiat bertujuan untuk memberikan hak kesinambungan dan hak kebebasan mengelola barang milik. Kedua jenis hak ini disebut hak dasar, karena kesinambungan berarti kelestarian hak milik selama barang milik itu masih ada. Yusuf Qardhawi<sup>43</sup> membagi hak kelestarian ini kepada hakiki dan majazi. Menurutnya, kelestarian menjadi hakiki manakala barang milik tersebut dapat dikonsumsi dan

---

<sup>42</sup> Dalam pengertian yang lebih luas, hak milik yang dititipkan Allah kepada hamba-Nya, punya fungsi sosial dalam rangka membantu orang-orang yang tidak mampu. Karena itu, jika ada anggota masyarakat – terutama kelas atas - tidak mau mengeluarkan sebahagian hartanya, maka penguasa berwenang untuk memungutnya. *Q.S.al-Taubah : 103* menyatakan : *Ambilah sebahagian dari harta mereka sebagai zakat, untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka.*

<sup>43</sup> Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islamiy*, op-cit. hal. 366

memberi kesempatan bagi pemiliknya untuk mengkonsumsi barang tersebut dalam hidupnya, seperti makanan yang dimakannya hingga habis. Pakaian yang dikenakannya hingga usang. Perabotan dan peralatan yang dipakainya hingga rongsok. Dalam hal ini berlaku hukum bagi hak milik bahwa tangan pemiliknya tetap menguasainya selama jangka waktu yang diperlukan oleh kelestariannya.

Sedangkan kelestarian yang bersifat majazi dapat dibedakan kepada dua macam; **Pertama:** Barang milik yang dapat dikonsumsi, tetapi sipemiliknya tidak punya kesempatan untuk mengkonsumsi barang miliknya itu selama hidupnya. **Kedua :** Barang yang tidak dapat dikonsumsi seperti tanah atau bangunan, ketika pemiliknya itu meninggal dunia barang-barang tersebut masih menjadi hak miliknya.

Kedua bentuk kelestarian yang bersifat majazi tersebut diakui oleh undang-undang dan peraturan sebagai hak kepemilikan individu dan karenanya undang-undang dan peraturan tunduk kepadanya. Sistem pemindahan hak kepemilikannya dapat dilakukan dengan cara wasiat atau waris. Namun dalam kedua kondisi peralihan barang milik kepada orang yang mendapatkan wasiat atau ahli waris yang mewarisinya, tidak dapat dianggap sebagai kepemilikan yang baru dari segala segi. Tetapi dianggap sebagai perpanjangan hak milik yang lama untuk merealisasikan keinginan pemilik yang asli dalam kondisi wasiat, atau karena hubungannya dengan individu-individu yang bertalian darah kekerabatan yang kuat sehingga menjadikan mereka bentuk terbaru dari pewaris dan perpanjangan dari eksistensinya. Mereka semua seolah mewakili pemilik pertama dan seolah hak kepemilikan pertama tetap eksis meskipun mengenakan pakaian yang lain dari pakaiannya yang pertama.<sup>44</sup> Hal itu karena realisasi keinginan pemilik dan pemenuhan kebutuhannya tidak hanya

---

<sup>44</sup> *Ibid*, 367

terbatas pada mengkonsumsi barang yang dimiliki, tetapi terealisasi pula dengan perpindahan barang tersebut setelah kematiannya kepada orang yang selama hidupnya dia cintai. Dengan ini dapat dikatakan bahwa salah satu bentuk pemindahan hak kepemilikan tersebut adalah dengan cara wasiat atau waris. Sistem ini dapat memelihara kemaslahatan individu, keluarga dan masyarakat.

Kemaslahatan individu dapat terpelihara dengan cara memelihara dorongan individualnya, merealisasikan berbagai keinginan yang dibenarkan syara', memenuhi dorongan fitrah tanpa melakukan kezaliman seperti perampasan hak. Di antara dorongan murni dalam diri manusia adalah mencintai keturunannya. Kecintaan dapat mengalahkan perburuan intrest atau upah, dan seringkali orang mendahulukan cintanya dari dirinya sendiri. Ketika Nabi SAW mengungkapkan rasa cintanya terhadap puterinya Fatimah, beliau berkata;

إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مَعِيَ يُؤْذِنُنِي مَا آذَاهَا وَيُنْصِبُنِي مَا أَنْصَبَهَا (رواه احمد و ترمذی و الحاكم عن زبير)<sup>45</sup>

**Artinya:** *Sesungguhnya Fathimah adalah darah dagingku, akan menyakitiku apa yang menyakitnya dan akan melukaiku apa yang melukainya.*

Meskipun secara fitrahnya manusia mencintai dirinya sendiri lebih dari yang lainnya, dan bahkan manusia selalu berbuat untuk dirinya lebih dari yang lainnya, namun secara fitrahnya pula manusia selalu menginginkan agar anak keturunannya lebih baik daripada diri mereka sendiri. Oleh karena itu tidaklah heran manakala para nabi selalu menginginkan kebaikan bagi anak keturunannya seperti halnya mereka menginginkan kebaikan bagi

---

<sup>45</sup> Jalaludin Abdu al-Rahman Abi Bakri al-Sayuthi. *Jam'u al-Shaghir*, Dar al-Kutub, Beirut, tt. hal 2367



diri mereka sendiri, mereka memohon kepada Allah untuk anak keturunannya seperti halnya mereka memohon untuk diri mereka sendiri. Rasa cinta inilah yang mendorong Nabi Nuh A.S memohon pertolongan Allah untuk anaknya – meskipun anaknya itu kafir – beliau berkata;

رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ

**Artinya:** Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji-Mu itulah yang benar. Dan engkau adalah Hakim yang Maha adil. (Q.S. Hud : 45).

Sejalan dengan itu Ibrahim A.S berkata;

وَاجْزُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

**Artinya:** Dan jauhkanlah anak cucuku daripada menyembah berhala. (Q.S. Ibrahim” : 35).

Hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya ternyata bukan hanya sebatas cinta dan kasih sayang selama hidup didunia, tetapi menembus batas kehidupan setelah kematian. Orang tua yang meninggal tetap hidup pada diri anak-anaknya, bahkan Hadits Nabi SAW menjelaskan bahwa setelah manusia mati aktifitas kerjanya menjadi terputus sehingga dia tidak lagi mendapat tambahan penghasilan kecuali dari tiga jalur. Nabi SAW bersabda;

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)<sup>46</sup>

**Artinya:** Apabila anak Adam (manusia) sudah meninggal, maka terhentilah amalnya kecuali tigah macam 1. Shadaqah

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 793

*jariah yang pernah dia berikan semasa hidupnya, 2. Ilmu yang dapat diambil manfaat dengannya, 3. Do'a anak-anak yang shaleh. (H.R. Muslim)*

Demikian erat hubungan dan perasaan orang tua terhadap anak-anaknya, sehingga suatu kewajiban bila orang tua menginginkan anak-anaknya berkecukupan secara materi setelah kematiannya. Para orang tua menabung hasil jerih payah untuk kemaslahatan anak-anaknya dikemudian hari dengan mengorbankan kenikmatan dirinya sendiri. Berbagai dorongan individu dari seorang ayah atau ibu terhadap anak-anaknya merupakan gambaran umum yang lumrah dalam soal warisan, karena orang tua merupakan sebab keberadaan mereka dan tempat tumbuh hidup mereka. Karena itu seorang anak diperintahkan – secara agama dan moral – untuk berbakti kepada kedua orang tuanya selama hidup maupun setelah mereka tiada. Seiring dengan itu anak juga diperintah untuk menjaga hak-hak orang tuanya, mengenang jasa dan membalas kebaikan mereka.

Selain untuk memelihara kemaslahatan Individu, pemindahan hak kepemilikan melalui waris ini juga dapat memelihara kemaslahatan keluarga. Artinya dibalik sistem waris ini terdapat suatu kekuatan yang mampu memperkokoh tali ikatan di antara anggota keluarga dan dapat mengikat para anggotanya dengan ikatan yang sangat kuat, ikatan senasip sepenanggungan dan saling menolong dalam kehidupan serta saling mewarisi setelah kematian.

Dari sinilah tumbuh benih-benih kasih sayang di antara sesama, muncullah akhlak al-Karimah bagi anggota keluarga, yang pada akhirnya akan bermuara pada ketenangan dan ketenteraman jiwa dan stabilitas keluarga sebagai sel pertama dalam tubuh masyarakat. Fenomena nyata yang dikuatkan oleh studi ilmu kejiwaan (*Psikologi*) telah membuktikan bahwa “anak-anak pungut” yang kehilangan kasih sayang ibu dan bapaknya, dan kehilangan suasana keluarga yang penuh dengan berbagai

ungkapan kelembutan, mereka adalah anak-anak yang cenderung paling banyak bermasalah, mengalami kelainan kejiwaan, dan melakukan berbagai penyimpangan.

Ana Freud dalam *Athfal bila Usar (Anak-anak tanpa keluarga)* menjelaskan bahwa rasa cinta dan kasih sayang tumbuh secara lebih baik dalam lingkungan keluarga dibandingkan dengan lingkungan lainnya, begitu juga keperibadian yang dibentuk dalam lingkungan keluarga lebih baik daripada keperibadian yang dibentuk dalam lingkungan lainnya. Pengalaman membuktikan bahwa kebanyakan anak-anak yang diasuh oleh beberapa orang pengasuh secara bergantian pada umumnya ternyata mempunyai keperibadian yang lemah, dan pada dirinya tidak tumbuh rasa tolong menolong. Hal serupa juga dialami oleh orang yang tidak mempunyai bapak – mungkin karena ditinggal mati oleh bapaknya ketika masih kecil, atau karena lahir diluar nikah – orang semacam ini pada umumnya akan mengalami depresi dan lari dari realita dengan membayangkan seorang bapak yang tidak ada wujudnya. Ia akan berhubungan dengan bapaknya dalam khayalan dan menggambarkannya dengan berbagai macam gambar dan bentuk.<sup>47</sup>

## **2. Infaq dan Shadaqah.**

Istilah infaq berasal dari kata *anfaq* – *yunfiq* – *infaaqan*, yang berarti membelanjakan, mengeluarkan atau mempergunakan harta.<sup>48</sup> Akan tetapi istilah tersebut telah menjadi baku dalam bahasa Indonesia sehingga istilah infaq itu sudah biasa digunakan. Secara etimologi infaq adalah mengeluarkan atau membelanjakan sebahagian harta yang dimiliki, dengan maksud untuk mencapai ridho Allah SWT. Termasuk dalam pengertian ini adalah “shadaqah”. Bahkan Al-Quranpun menggunakan istilah shadaqah untuk arti mengeluarkan zakat. Bila dilihat dari apa yang di infaqkan dan siapa yang menerimanya, maka hukum infaq itu bisa

---

<sup>47</sup> Yusuf Qardhawi, *op-cit.* hal. 371

<sup>48</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta1, 997 hal. 461

menjadi sunnat dan bisa juga menjadi wajib. Infaq sunnat ialah memberikan sebahagian harta dalam bentuk sumbangan (tabarru'at). Infaq sunnat ini sama dengan shadaqah sunnat, contohnya memberikan sumbangan untuk membangun sarana ibadah seperti membangun masjid, madrasah dan lain sebagainya.

Oleh karena infaq sunnat ini digolongkan sebagai sedekah biasa, maka pemberiannya bersifat sukarela dan tidak ditentukan kadar minimal atau maksimalnya. Namun demikian jika pada suatu tempat tidak ada tempat ibadah sama sekali, sedangkan ditempat itu terdapat orang yang mampu, maka ia wajib menyisihkan sebahagian hartanya untuk kepentingan pembangunan atau pengadaan sarana ibadah tersebut. Adapun infaq wajib dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu; Infaq kepada yang berhak menerima zakat, dan infaq yang diberikan kepada pihak yang wajib diberi nafkah. Infaq dalam pengertian yang kedua ini ditujukan kepada tanggung jawab keluarga yang secara yuridis mempunyai kewajiban memberi nafkah, seperti ayah kepada anak dan isterinya.

Dengan demikian sebab-sebab yang menimbulkan kewajiban dalam memberi nafkah antara lain karena keturunan, perkawinan dan pemilikan. Seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya apabila telah terjadi akad nikah yang sah dan isteri telah merelakan diri kepada suaminya dalam arti telah terjadi hubungan mereka sebagai suami isteri. Allah SWT mewajibkan pemberian nafkah kepada suami untuk isterinya, karena seorang isteri setelah terjadi akad nikah yang sah, secara otomatis ia berkewajiban mentaati suaminya, sejauh suami tersebut tidak menyuruh kepadanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang secara agama. Selain pengertian infaq seperti tersebut di atas, ada juga ulama yang membedakan pengertian infaq dengan sedekah. Qadhi Abu Bakar bin Arabi misalnya sebagaimana yang dikutip

oleh Yusuf Qardhawi<sup>49</sup> yang mengatakan bahwa kata “shadaqah” berasal dari kata “Shidqun” yang berarti benar serta sejalannya perbuatan dengan ucapan dan keyakinan, menurutnya susunan huruf shad, dal, dan qaf, mendapat tambahan dua huruf atas wazan Tafa’ala, menjadi Tashaddaqa. Shadaqah (mufrad) dan shadaqaat (jama’) merupakan salah satu bentuk masdarnya. Kata shadaqah mengandung makna “Suatu pemberian yang hanya mengharapkan pahla tanpa mengharapkan pujian”.<sup>50</sup>

Yusuf Qardhawi mengupas kata ini lebih rinci. Menurutnya, banyak kata shaddaqa dengan arti yang berbeda-beda. Dalam berbicara, berarti benar, Kata tashaddaqa dalam kekayaan berarti dizakatkan. Dan bentuk kata ashdaqa kepada perempuan, berarti membayar mahar perempuan. Perubahan tashrif ini dimaksudkan untuk menunjukkan arti tertentu setiap kasus, dan semuanya diungkapkan dengan akar kata Shadaqa dimaksudkan untuk perbuatan menyedekahkan.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut istilah, sedekah berarti “pemberian dari seorang muslim secara suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sebagai kewajiban dengan mengharapkan ridha Allah dan pahala semata”.<sup>52</sup>

Al-Jurjani, seperti ditulis Abdul Aziz Dahlan,<sup>53</sup> mengartikan shadaqah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi dengan pemberian pahala oleh Allah. Berdasarkan pengertian ini, maka infaq atau pemberian dan sumbangan lain untuk kebaikan ternasuk dalam kategori ini.

---

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, (Studi konporatif mengenai status dan filsafat Zakat berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits)*, Litra Antarnusa, Mizan Bogor, 1996 hal.34–35.

<sup>50</sup> Luwis Ma’ruf, *Al-Munjid fi al-Lughati wa al-A’lami*, cet. Ke 24, Dar al-Masyriq Beirut, 1975 hal. 420.

<sup>51</sup> Yusuf Qardhawi, *loc-cit*.

<sup>52</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, Ikhtiar Baru Van Hoeve Jakarta 1997, hal. 1617.

<sup>53</sup> *Ibid*.

Meskipun sebahagian ayat tentang sadaqah mengandung arti zakat, namun dari pengertian di atas terdapat perbedaan antara shadaqah wajib dengan sedeqah sunnat. Zakat merupakan sedeqah wajib mempunyai kraktristik tersendiri. Penunaian zakat bukan berdasarkan kemurahan hati semata, tapi bila perlu penguasa dapat memaksa seseorang yang telah mempunyai kekayaan sampai nisabnya untuk membayarkan zakatnya, sehingga al-Quran menganggap penting menetapkan pengelolanya. Sedangkan sedeqah sunnat mengandung pengertian yang lebih umum serta bukan sebagai suatu kewajiban.

### 3. **Jual Beli dan Riba.**

Jual beli adalah salah satu cara pemindahan hak kepemilikan yang dibenarkan dalam syari'at Islam. Said Sabiq memberikan pengertian jual beli ini dengan mengatakan bahwa jual beli adalah “tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan jalan suka sama suka, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.<sup>54</sup> Louis Ma'luf dalam Munjidnya lebih sifisific mendefinisikan jual beli ini dengan mengatakan “Jual beli adalah menyerahkan barang dan mengambil uang, atau mengambil barang dan menyerahkan uang secara timbal balik”.<sup>55</sup>

Pengertian jual beli seperti tersebut di atas menggambarkan bahwa jual beli merupakan suatu sitem pemindahan hak kepemilikan dengan cara tukar menukar barang dengan uang sebagai harga yang telah di sepakati bersama secara sukarela. Pemindahan hak kepemilikan bisa terjadi dengan cara halal dan dapat pula terjadi dengan cara yang haram. Dengan cara yang haram misalnya dilakukan dengan cara riba, pencurian, pengkhianatan, atau dengan sumpah-sumpah yang palsu dan lain sebagainya. Tetapi pemindahan hak kepemilikan dengan cara yang halal dapat dilakukan dengan jual beli, infaq, shadaqah, waris, hibbah dan lain sebagainya. Dizaman jahiliah pemindahan hak

---

<sup>54</sup> Said Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III, Dal al-Kutub Arabiya 1985 hal. 46

<sup>55</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, Dar al-Kutub Mesir, tt. hal. 57

kepemilikan itu sering dilakukan dengan cara riba dan jual beli. Bahkan pada masa itu orang menganggap jual beli dan riba adalah sama, artinya sama-sama dapat dilakukan sebagai cara pemindahan hak kepemilikan. Anggapan masyarakat jahiliah tentang riba dan jual beli itu sama, dibantah oleh Allah dengan menurunkan ayat (Q. S : al-Baqarah :275) yang berbunyi;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة : 275)

**Artinya:** Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dengan turunnya ayat ini menjadikan jual beli dan riba itu dua hal yang jauh berbeda, seperti berbedanya siang dan malam, atau berbedanya haq dengan bathil sehingga secara hukum menjadikan jual beli itu halal dan riba itu haram. Bahkan jual beli merupakan sistem usaha yang tergolong “terbaik” manakala dilakukan dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Al-Bazar menceritakan hal ini berdasarkan penjelasan Nabi SAW melalui riwayat Rifa’ah bin Rafi’ yang berbunyi;

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَواتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)<sup>56</sup>

**Artinya:** Dari Rifa’ah bin Rafi’ (yang menyatakan) bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang usaha apa yang terbaik ?. Beliau menjawab; Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur. (H.R.al-Bazar dan disahkan oleh al-Hakim).

---

<sup>56</sup> Lihat Musnad Ahmad dalam CD *al-Hadits al-Syarifah al-Kutub al-Tis’ah*, Hadits ke 15276

Ketika menjelaskan hadits ini Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Pengertian “mabrur” adalah jual beli yang bersih dan dapat dipertanggung jawabkan (*Khalishun Maqbulun*). Artinya tidak melakukan kecurangan dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang salah sehingga menyebabkan berdosa. Untuk melakukan jual beli yang bersih tentu harus mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, yang oleh para ulama mujtahid dirangkum dalam bentuk rukun dan syarat sahnya jual beli. Rukun jual beli artinya sesuatu yang mesti ada dalam jual beli, dan dia termasuk bagian dari proses jual beli itu sendiri. Rukun ini menurut Taqiyuddin<sup>57</sup> terdiri dari; Aqid, Ma’qud ‘alaih (*obyek yang diperjual belikan*), serta Shighat (*Ijab Qabul*). Sedangkan yang berkenaan dengan syarat adalah syarat-syarat yang diperlukan bagi ketiga rukun tersebut agar jual beli dapat dikategorikan sah. Misalnya syarat aqid, syarat-syarat obyek yang boleh diperjual belikan, serta syarat-syarat bagi sahnya ijab dan qabul.

Seperti dikemukakan di atas bahwa rukun jual beli itu adalah sesuatu yang mesti ada dalam pelaksanaan jual beli. Yaitu adanya orang yang melakukan jual beli (*‘aqid*) yang terdiri dari penjual dan pembeli, obyek yang diperjual belikan (*ma’qud ‘alaih*), serta ijab dan qabul (*shighat*). Ketiga macam rukun ini diperlukan adanya beberapa syarat agar jual beli sah menurut hukum syar’iy. Ibnu Rusydi al-Qurthuby<sup>58</sup> juga berpendapat bahwa rukun jual beli itu terdiri dari adanya Aqidaini (*The Contracting Parties*), al-Ma’qud ‘alaih (*Obyek yang diperjual belikan*), Shighat (*Transaktion*)

al-‘Aqidaini (*The Contracting Parties*) adalah pihak-pihak yang melakukan jual beli, mereka ini perlu memperhatikan kemampuan bertindak secara hukum. Karena itu orang yang masih

---

<sup>57</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakri bin Muhammad al-Husainy, *Kifayatu al-Akhyar*, Jilid.I al-Ma’arif Bandung, tt. hal. 239

<sup>58</sup> Lih. Ibnu Rusydi al-Qurthuby, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Juz ke II, Mushtafa al-Baby al-Halabi Mesir, 1960 hal. 170 – 173



anak-anak atau orang gila – dalam arti *ghairu mukallaf* – tidak diperkenankan melakukan transaksi jual beli, dan andaikan terjadi maka jual beli dianggap tidak sah. Abu daud dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa ada tiga macam orang yang dianggap tidak mampu memikul beban taklif ini. Rasul SAW bersabda;

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الثَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبُرَّأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ (رواه ابوداود وابن ماجه)<sup>59</sup>

**Artinya:** *Qalam diangkat karena tiga sebab; 1. Karena tertidur sampai dia bangun. 2. Orang gila sampai dia waras. 3. Anak kecil sampai dia dewasa. (H. R. Abu Daud dan Ibnu Majah)''.*

Kedua penjual dan pembeli tidak sedang dalam pengampuan. Artinya mereka tidak dalam kendali orang lain disebabkan mereka boros, atau karena anak yatim yang belum dewasa. Bila penjual dan pembeli sedang dalam pengampuan berarti mereka tidak cakap bertindak secara hukum, pada hal transaksi jual beli itu harus dilakukan atas kehendak mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka (*Inama al-Bai'u 'An Taradhin*).<sup>60</sup>

Jual beli memerlukan adanya *obyek yang diperjual belikan*. Dalam ketentuan fiqih, obyek jual beli ini ditentukan dengan sejumlah syarat seperti;

1. Barang yang diperjual belikan itu bukan barang yang haram secara zat maupun sifatnya, seperti minuman keras, bangkai, babi, anjing, berhala dan lain sebagainya. Rasul SAW bersabda;

<sup>59</sup> Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakri al-Sayuthi, *op-cit*, hal 163

<sup>60</sup> Hadits ini berasal dari Daud bin Shaleh al-Madaniy yang dia terima dari ayahnya. Dia berkata; Saya telah mendengar Abu Sa'id al Khudri berkata; Rasul Saw telah bersabda; Bahwa jual beli itu hanya (sah apabila dilakukan atas dasar) suka sama suka. Lihat CD Hadits dalam Sunan Ibnu Majah hadits ke 2176. Selain itu Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits yang serupa. Lihat; Ash-Shan'aniy. *loc-cit*.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ  
(متفق عليه)<sup>61</sup>

**Artinya:** *Bahwa Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual khamar, bangkai, babi dan berhala (Muttafaqun Alaih).*

2. Bahwa barang yang diperjual belikan itu harus dapat diserahkan terimakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa barang yang diperjual belikan tersebut harus dalam kekuasaan, karenanya barang yang tidak dalam kekuasaan tidak dapat diperjual belikan seperti, burung yang terlepas dari sangkarnya, barang yang telah dirampas oleh orang lain, atau barang yang sedang digadaikan. Barang-barang tersebut tidak dalam kekuasaan, karena jika diperjual belikan akan mengakibatkan sipembeli menjadi tertipu. Padahal jual beli dengan tipuan termasuk yang diharamkan. Nabi bersabda;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ  
(رواه مسلم)<sup>62</sup>

**Artinya:** *Abi Hurairah berkata; Rasul SAW telah melarang jual beli dengan lemparan batu, dan jual beli yang mengandung tipu daya". (H.R. Muslim).*

3. Barang yang diperjual belikan itu adalah barang yang bermanfaat. Pengertian manfaat ini adalah barang yang berdaya guna terutama bagi si pembeli. Namun tentu tidak keluar dari ketentuan-ketentuan lain, seperti bukan benda najis, dan bukan pula barang yang diharamkan secara syar'iy.

---

<sup>61</sup> Al-Shan'any, *Subulussalam*, Jilid III, Pen. Dahlan Bandung cet. IV 1970 hal, 5

<sup>62</sup> *Ibid.* hal. 15

4. Bahwa barang yang diperjualkan itu adalah milik sempurna dari sipenjual. Kartena itu tidak boleh menjual sesuatu barang yang bukan atau belum dimiliki. Nabi SAW bersabda;

لَا تَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ الشَّيْءِ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ  
(رواه ابوداود والنسائي)<sup>63</sup>

*Artinya: Jangalnlah menjual barang yang tidak ada padamu, karena yang demikian itu menunjukkan tidak halalnya menjual barang yang belum dimiliki. (H.R. Abu Daud dan Nisa'iy).*

5. Barang dan harganya harus diketahui; Jika barang dan atau harganya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan<sup>64</sup> yang dimaksud di sini adalah bahwa barang yang akan dijual itu harus sudah dikenal oleh pembeli atau minimal sudah ditentukan kualitas barangnya. Bila perlu penjual harus menerangkan tentang barang yang dijualnya, terutama ketika barang yang dijualnya itu tidak dapat dihadirkan pada majlis akad. Penjual menunjukkan harga barang tersebut sesuai dengan kualitas barang, sehingga pembeli dapat memperkirakan kemampuannya untuk membeli barang tersebut.
6. Barang yang dijual itu ada ditangan penjual. Hal ini agar tercapai kemaslahatan dari pihak-pihak yang melakukan transaksi, agat terhindar dari keragu-raguan, dan terhindar dari resiko kerugian dan pertentangan yang tidak diinginkan.

Termasuk bagian dari rukun jual beli adalah **Shighat** ijab qabul. Shighat ini harus dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum dan mengerti tentang apa yang

---

<sup>63</sup> *Ibid.* Hal. 17

<sup>64</sup> Kamaluddin, *Fiqih Sunnah*, J. XII cet. II al-Ma'arif Bandung, 1987 hal. 61

diucapkannya, sehingga ucapannya itu benar-benar mencerminkan keinginan hatinya. Ijab dan qabul harus ditujukan kepada obyek yang diperjual belikan; kedua belah pihak yang melakukan ijab qabul itu harus berhubungan langsung dalam suatu majlis, paling tidak pihak yang tidak dapat hadir secara langsung mengetahui bahwa dalam majlis tersebut telah dan atau sedang berlangsung ijab dan qabul.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Aktivitas mana memang dilegitimasi secara agama maupun perundang-undangan, bahkan Nabi SAW mensinyalir bahwa jual beli yang dilakukan secara suka sama suka adalah usaha yang paling diridhoi Allah. Jual beli atau disebut juga dagang, memang bukan suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian ekonomi, yaitu segala perbuatan perantara antara produsen dan konsumen.<sup>65</sup>

Sejarah jual beli telah tumbuh dan berkembang cukup lama. Tidak kurang dari Nabi SAW sendiri justru menjalani usaha ini semenjak beliau masih usia remaja – sebelum diangkat menjadi Nabi – bersama pamannya Abu Thalib, dan bahkan pada akhirnya beliau nikah dengan Siti Khadijah seorang konglomerat dimasanya yang juga sebagai usahawan yang bergerak dibidang perdagangan. Lebih jauh lagi bila dilihat dari peraturan dan pembagian hukum perdata dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang hukum Dagang hanya berdasarkan riwayat saja. Hal ini disebabkan dalam hukum Romawipun belum dikenal peraturan-peraturan sebagai mana yang sekarang termuat dalam W.v K karena memang perdagangan Internasional baru mulai berkembang dalam abad pertengahan.<sup>66</sup>

Berkembangnya sistem jual beli sebagai salah satu cara dalam pemindah tangan hak kepemilikan, menghadapi berbagai

---

<sup>65</sup> Subekti, Prof. SH. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa Jakarta, cet. Ke 14 1979, hal. 159

<sup>66</sup> *Ibid.* 158

delimitasi dalam hukum maupun dalam kehidupan masyarakat. Secara doktriner al-Quran mengisyaratkan bahwa jual beli itu hukumnya “halal” karena jual beli tidak sama dengan riba yang diharamkan itu. Namun dibalik kehalalan jual beli dan keharaman riba tersebut, kita tentu ingin tahu lebih jauh apa yang menyebabkan jual beli itu menjadi halal dan riba itu menjadi haram, padahal keduanya pada masa jahiliyah sama-sama telah menjadi suatu sistem yang digunakan untuk mencari keuntungan. Bukankah jual beli itu dilakukan untuk mengejar keuntungan sebagai mana halnya riba juga untuk mengejar keuntungan.

Nampaknya esensi perbedaannya terletak pada sistem yang dapat merugikan orang lain. Dalam riba terdapat secara jelas memperkaya diri sendiri di atas kerugian dan penderitaan orang lain, sedangkan dalam jual beli yang dilandasi prinsip suka sama suka tidak akan berdampak kepada kerugian kedua belah pihak, tetapi sama-sama diuntungkan sehingga tidak ada yang sakit hati karena dirugikan. Itulah sebabnya falsafah dagang – jual beli – yang dianut oleh masyarakat Minangkabau – Sumatera Barat – terungkap dalam istilah “Awak baruntuang, Urang balabo”. Artinya produsen mendapat keuntungan karena barang dagangannya terjual dengan harga melebihi dari modalnya, sedangkan konsumen beruntung karena dia mendapatkan barang yang memang dia butuhkan.

Riba sebagai suatu sistem mencari keuntungan di atas kerugian orang lain sangat jelas terlihat pada *riba fadhal* dan *riba nasi'ah*, yaitu dalam kasus barter yang melibatkan pertukaran tidak setara atau karena waktu penyerahan. Alasan pelarangan dari dua model pertukaran itu adalah untuk menghilangkan kemungkinan adanya eksploitasi dan mendapatkan harta milik orang lain secara tidak sah. Seperti diketahui bahwa *riba fhadhal* adalah pengenaan jumlah tambahan dalam pertukaran secara barter atas komoditas yang sama, misalnya menjual atau membeli satu kuwintal gandum diganti dengan satu setengah kuwintal gandum. Sedangkan riba

Nasi'ah adalah pertukaran barang secara barter atas sejumlah komoditas tertentu seperti emas, perak, gandum, gula, garam dan lain sebagainya dengan barang yang sama atau serupa, dimana yang satu diserahkan langsung sementara yang lainnya diserahkan belakangan. Misalnya membayar 10 gram emas sekarang dengan 12 gram emas yang dibayar satu bulan yang akan datang. Atau menjual satu kuwintal gandum sekarang dengan satu setengah kuwintal gandum yang diserahkan setelah satu bulan.<sup>67</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, diharamkannya riba tidak lain karena riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapat harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang kaya dengan mengorbankan orang-orang miskin dan mengabaikan aspek prikemanusiaan demi penghasilan materi.<sup>68</sup>

Riba sebenarnya bukan hanya diharamkan dalam syari'at Islam, tetapi juga oleh agama-agama lain seperti agama Yahudi dan Nasrani. Pengenaan bunga bank misalnya selalu dipertimbangkan sebagai kebijakan yang tidak etis oleh seluruh agama didunia, termasuk juga oleh para filosof kuno.

A.A Islahi mengutip pernyataan Thomas F. Devine<sup>69</sup> yang mengatakan bahwa “Dalam Perjanjian Lama banyak ayat yang melarang pengenaan bunga pada pinjaman kepada orang miskin atau penganut Yahudi dan mengutuk usaha mencari harta dengan membebani orang miskin dengan riba”. Leviticus 25 : 37 menulis: “Engkau tak akan meminjamkan uang dengan riba kepada saudaramu”.

Dengan cara yang sama, Judaisme dari Talmud dan Mishnah melarang setiap bentuk transaksi riba antara Yahudi dan lainnya.

---

<sup>67</sup> A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Thaimiyah*, Terjemahan H. Anshari Thaiyib, Bina Ilmu Surabaya 1997 hal. 160.

<sup>68</sup> Yusuf Qardhawi : *op-cit.* hal. 310

<sup>69</sup> Thomas, F. Devine, S.J. *Usury* pada *Encyclopaedia Americana*, New York, Americana Corporation, 1976, vol. 27 hal. 824 dalam A.A. Islahi, *op-cit.* hal. 150

Para Rabbi menjelaskan larangan ini berpijak pada Kitab Exodus 22:25: “Jika kamu meminjamkan uang kepada siapapun, dan orang itu menjadi miskin karenanya, engkau pasti tak suka disebut sebagai pemakan riba, juga tidak suka disebut senang atas penderitaan orang lain yang terkena riba”.<sup>70</sup> Dalam perjanjian baru disebutkan bahwa Yesus menganjurkan umat Nasrani untuk meminjamkan uang secara sukarela tanpa mengharapkan keuntungan dari pinjaman tersebut. Yesus berkata :

*Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu ?. Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasan. (Lukas:6:34-35).*<sup>71</sup>

Ayat tersebut memerintahkan kepada umat kristiani untuk memberi pinjaman kepada orang lain secara suka rela dan tidak dibenarkan mengambil keuntungan berupa bunga dari pinjaman tersebut. Ini menunjukkan bahwa mengenakan bunga berlawanan dengan semangat Kristiani dan karenanya dilarang. Menurut Spiegel, pada awalnya sang Bapa melihat riba itu dari sejumlah celaan. Mereka menemukan penegasan dari pendapatnya itu dalam sejumlah ayat Kitab Perjanjian Lama dan sejumlah prinsip umum dalam Kitab Perjanjian Baru yang ajarannya memperkuat pandangan itu, secara khusus yang dikutip di atas dari Lukas.<sup>72</sup>

Pada masa Yunani Kuno praktik bunga sudah menjadi sesuatu yang lazim dilakukan. Para ahli hukum Romawi kuno membolehkan tingkat bunga tahunan sekitar 12 persen atas pinjaman dalam berbagai jenis. Tetapi para filosof Romawi,

---

<sup>70</sup> Bandingkan dengan Abelson, H. *Usury (Jews)* pada *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, New York Charles Scribners & Sons 1967 Vol. 12 hal. 556

<sup>71</sup> Lembaga Alkitab Indonesia, *Al-Kitab Perjanjian Baru*, th.1986 hal.83

<sup>72</sup> Spiegel, H.W. *The Growth of Economic Thought*, Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1971 hal. 63

seperti Cicero (106-43 SM) dan Seneca (4 SM-65 M) mengutuk pengenaan bunga yang digambarkannya sebagai tindakan tidak manusiawi. Begitu juga Plato dan Aristoteles sangat menentang pengenaan bunga. Mereka berpendapat bahwa cara itu berarti menentang ajaran kesejahteraan sosial dari negara. Menurut mereka cara itu tidak adil dan seperti mencari keuntungan yang tidak alami dari missi yang tidak bernilai.<sup>73</sup>

Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa riba sebagai suatu sistem untuk mencari keuntungan dalam perdagangan bukan saja dilarang oleh ajaran Islam tetapi juga oleh agama-agama lain yang ada di atas dunia ini. Oleh karena itu apapun bentuk riba yang digunakan untuk pemindahan hak kepemilikan jelas tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi jual beli yang juga sebagai cara pemindahan hak kepemilikan dapat dibenarkan manakala jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Prinsip suka sama suka ini merupakan syarat mutlak untuk terjadinya jual beli secara adil, karena dengan dasar itu baik penjual maupun pembeli tidak akan dirugikan, bahkan sama-sama diuntungkan. Dalam filsafat Minang dikatakan “awak baruntuang, urang balabo”.

## **B. Status Hukum Bagi Hak Milik Yang Dipindah Tangankan Tanpa antaradhin**

### **1. Jual Beli Tanpa Sukarela**

Berkembangnya sistem jual beli sebagai salah satu cara dalam pemindah tanganan hak kepemilikan, menghadapi berbagai delimitisasi dalam hukum maupun dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum – dalam hal ini hukum Islam – dikenal ijab dan qabul sebagai pengertian yang sama dengan transaksi, haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka (*Antaradhin*) yang dalam hukum mu’amalat termasuk salah satu prinsip yang musti dipatuhi. Sementara itu prinsip Antaradhin termasuk “amal Qalbi” yaitu

---

<sup>73</sup> Thomas, F. Devine, *SJ. loc-cit.*



perbuatan hati yang tidak mungkin dapat diketahui melainkan dengan tanda-tanda secara sharih atau kinayah. Ulama salaf – terutama Imam Asy-Syafi'iy – lebih menekankan tanda-tanda tersebut secara transparansi melalui lafadz yang dituturkan langsung oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi itu. Cara ini dipandang lebih menunjukkan kesungguhan kedua belah pihak ketimbang dengan cara lain, bahkan Said al-Bakri berpendapat bahwa transaksi itu dipandang tidak sah tanpa penuturan lafadz jual beli ketika terjadinya ijab dan qabul.

Imam Malik tidak menafikan adanya ijab dan qabul itu tanpa talaffudz, bahkan menurut beliau jual beli dengan sistem al-mu'athah-pun dapat dianggap sebagai jual beli yang sah. Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa keridhaan yang ditunjukkan oleh perbuatan sama nilainya dengan keridhaan yang ditunjukkan oleh perkataan. Oleh karena itu jika antara penjual dan pembeli telah terdapat bukti-bukti yang menunjukkan mereka saling menyukai, maka jual beli tersebut sudah dikategorikan sah menurut hukum. Al-Baghawi menjelaskan kedua pendapat ini dengan mengatakan;

وَمِنْ هَهُنَا أَخَذَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِعْتِبَارَ الْأِيْجَابِ وَالْقَبُولِ لَفْظًا لِأَنَّ التَّرَاضِيَ  
أَمْرًا قَلْبِيًّا فَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ عَلَيْهِ وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهَا مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُمَا إِذَا حَصَلَ  
الرِّضَا أَيْ لِأَنَّ الْأَقْوَالَ كَمَا تَدُلُّ عَلَى التَّرَاضِ فَكَذَلِكَ الْأَفْعَالُ تَدُلُّ فِي بَعْضِ  
الْمَحَالِ قَطْعًا فَصِيحُ بَيْعِ الْمُعَاطَةِ مُطْلَقًا<sup>74</sup>

**Artinya:** Dari sini Imam al-Syafi'iy r.a. memandang ijab dan qabul itu mesti dilafadzkan, karena ridha itu merupakan urusan hati yang membutuhkan tanda-tanda atasnya. Ada kalanya juga dibutuhkan tanda-tanda tersebut

<sup>74</sup> Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Syarah al-Sunnah*, Juz ke IV, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1992 hal. 201

*manakala orang tidak mensyaratkan ijab dan qabul itu dengan lafadz apa bila ridha sudah tercapai. Tetapi bukankah perkataan yang dapat menunjukkan ridha sama halnya dengan perbuatan yang juga menunjukkan ridha pada sebahagian tempat, oleh karena itu sahlah jual beli secara mu'athoh.*

Berdasarkan ungkapan tersebut di atas, nampak jelas bahwa persoalan jual beli terjadi perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan tersebut berpangkal dari perbedaan dalam memahami dua persoalan pokok yaitu; 1. Apakah istilah al-Syarra' (beli) itu terkait dengan al-Bai'u (jual) atau tidak. 2. Sejauh mana 'akad dapat dikategorikan sebagai syarat dari jual beli tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwa "al-Syarra'" seiring dengan "al-Bai'u", karena yang dimaksud dengan al-Bai'u itu adalah pemindahan hak kepemilikan melalui harga tukar dengan cara tertentu, sedangkan al-Syarra' adalah penerimaan atas suatu tawaran oleh pihak lain.

Kemudian al-'Aqad yang terdiri dari ijab dan qabul, secara etimologi pengalihan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pengertian ini dapat difahami dari ungkapan sya'ir arab yang berbunyi;

مَا بَعْتُكُمْ مَّهْجَتِي إِلَّا بِوَضْلِكُمْ \*\* وَلَا أَسْلَمُهَا إِلَّا يَدًا بَيْدٍ<sup>75</sup>

**Artinya:** *Saya tidak menjual barang daganganku kepadamu kecuali dengan uangmu, dan saya tidak akan menyerahkannya kecuali dengan sambut tangan.*

Dengan demikian secara terminologi jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan cara tertentu. Berkenaan dengan pengertian jual beli seperti ini maka esensi dari jual beli tersebut adalah pemindahan hak kepemilikan terhadap sesuatu barang atau yang bernilai barang dengan cara-cara yang telah diatur secara

---

<sup>75</sup> Muhammad al-Syarbaini al-Khatib, *op-cit.* hal. 2

hukum. Pengaturan tersebut meliputi rukun dan syarat sahnya jual beli. Rukun jual beli – sebagai mana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya – terdiri dari ‘aqid, ma’qud ‘alaih, dan shighat. Ketiga macam rukun ini pada dasarnya terbagi lagi menjadi enam macam, karena ‘aqid terdiri dari penjual dan pembeli, ma’qud ‘alaih terdiri dari harga dan barang yang dihargai, sedangkan shighat terdiri dari ijab dan qabul.

Secara urutan dalam sistem hukum, *al-‘aqid* dan *al-ma’qud ‘alaih* disebutkan terlebih dahulu daripada *al-shighat*. Namun dalam pembahasan kitab-kitab fikih *al-shighat* selalu ditempatkan pada posisi awal disebabkan perbedaan yang tajam dikalangan ulama ada pada pembahasan *al-shighat* itu. Di antara perbedaan tersebut adalah menyangkut masalah penempatan apakah *al-shighat* itu sebagai rukun atukah sebagai syarat dalam jual beli. Imam al-Ghazali lebih melihatnya sebagai rukun, tetapi al-Syarbaini lebih menitik beratkannya sebagai syarat. Oleh karenanya menurut al-Syarbaini terkadang *al-shighat* itu ditempatkan sebagai syarat tetapi terdapat hubungan yang signifikan dengan rukun.

Shighat sebagai syarat dari jual beli membagi dirinya menjadi dua, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan penyerahan dari penjual kepada pembeli sekaligus menunjukkan kepemilikannya secara transparan. Penunjukan ini lebih diutamakan dengan penuturan lafadz secara langsung seperti “saya menjual barang ini kepadamu dengan harga ...”.<sup>76</sup> *Qabul* adalah penerimaan pembeli terhadap barang yang ditawarkan penjual. Untuk membuktikan bahwa pembeli itu suka untuk membeli barang tersebut haruslah

---

<sup>76</sup> Al-Syarbaini menambahkan bahwa lafadz yang digunakan itu haruslah menunjukkan kepemilikan barang yang dijual oleh penjualnya. Oleh karena itu selain lafadz tersebut bisa juga digunakan lafad lain yang pengertiannya sama, seperti saya serahkan kepemilikan barang ini kepadamu, atau “ini untuk mu dengan harga sekian...” dan lain sebagainya. (lihat; *Ibid*, hal. 3).

ditunjukkan dengan ungkapan kata-kata (lafadz) yang jelas, seperti saya membeli, atau saya terima, dan lain sebagainya.

Imam al-Syafi'iy dan para pengikutnya menjadikan lafadz *ijab* dan *qabul* itu sebagai syarat sahnya jual beli, dengan pemikiran bahwa persoalan jual beli bukan semata-mata persoalan mencari keuntungan, tetapi lebih diutamakan pada kepatuhan terhadap syari'at Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu apa yang telah disampaikan Allah melalui lisan Rasul-Nya, itulah aturan yang harus diikuti. Jadi bukan bagai mana mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tetapi bagai mana aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu dapat dijalankan. Salah satu aturan tersebut adalah kehalalan jual beli yang dilakukan secara suka sama suka. Karena itu setiap jual beli pada dasarnya dihukum mubah manakala dilakukan secara suka sama suka antara penjual dan pembeli sejauh tidak ada pelarangan dari Nabi SAW. Akan tetapi jika sesuatu yang dilarang oleh Nabi untuk diperjual belikan baik cara maupun barang yang diperjual belikan itu maka haram dilakukan meskipun kedua penjual dan pembeli itu sudah sepakat dan terdapat persetujuan yang mengandung prinsip suka sama suka.<sup>77</sup>

Suatu penekanan dari ulama Syafi'iyah bahwa jual beli tidak sah tanpa *ijab* dan *qabul*, karena keduanya merupakan syarat dalam aqad. Hanya saja dibutuhkan *shighat* dalam jual beli karena *shighat* itu sebagai bukti keridhaan dari kedua belah pihak, sedangkan keridhaan itu merupakan sifat yang tersembunyi di dalam hati dan baru dapat diketahui setelah dinyatakan secara jelas melalui lafadz, karena itu penetapan hukumnya haruslah melalui lafadz yang jelas. Lafadz yang jelas atau kinayah merupakan bukti

---

<sup>77</sup> Contoh yang relevan dewasa ini adalah jual beli ganja, syabu-syabu, putau, daging babi dan lain sebagainya. Dalam kaitan ini meskipun penjual dan pembeli telah terjadi suka sama suka, namun jual beli semacam itu tetap saja diharamkan. Lihat : Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iy, *Al-Um*, Jilid ke III, Dar al-Fikri Beirut, 1983 hal. 3

keridhaan kedua belah pihak sebagaimana qaidah ushul yang berbunyi;

دَلِيلُ الشَّيْءِ فِي الْأُمُورِ الْبَاطِنِيَّةِ يَقُومُ مَقَامَهُ<sup>78</sup>

**Artinya:** Bukti dengan sesuatu dalam masalah batiniah menempati posisi yang sama.

Sesuatu dalil atau bukti nyata dari masalah-masalah yang tersembunyi (batin) bernilai sama dengan apa yang tersembunyi itu. Masalah keridhaan dalam jual beli ini misalnya adalah masalah batin karena dia tersembunyi di dalam hati. Namun keridhaan itu dapat diketahui melalui bukti-bukti nyata seperti talaffudz. Karena itu apa yang ditunjukkan oleh lafadz yang diucapkan secara jelas (*diucapkan langsung*) atau kinayah (*secara tertulis*) dipandang sama dengan keridhaan yang ada di dalam hati pihak-pihak yang melakukan akad tersebut. Qaidah ini sejalan pula dengan qaidah lain yang menyatakan:

الْأَمْرُ الظَّاهِرُ مَتَى قَامَ مَقَامَ الْبَاطِنِ يَدُورُ الْحُكْمُ مَعَهُ وَجُودًا وَعَدَمًا<sup>79</sup>

**Artinya:** Persoalan yang nyata, ketika menempati posisi yang tersembunyi berlaku hukum yang sama dengannya baik positif maupun negatif.

Disamping itu shighat ini menurut Syarbaini sebagai aplikasi dari ayat 29 Surat al-Nisa' yang menegaskan bahwa tidak dibenarkan memakan harta dengan cara-cara yang bathil, melainkan melalui perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka. Ayat ini dipertegas lagi oleh Hadits Nabi yang berbunyi: *Innama al-bai'u 'an taradhin'*.<sup>80</sup> Menurut pendapat ini, *al-*

---

<sup>78</sup> Lihat: Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Dar al-Qalam, Damsyik, 1986, hal. 370

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Syekh Muhammad al-Syarbaini al-Khatib, *loc-cit.*

*mu'athoh* tidak termasuk dalam kategori '*aqad* karena tidak menunjukkan bentuknya, karena itu menerimanya sama saja dengan menerima jual beli yang fasid. Jika jual beli dengan cara *mu'athoh* ini dilakukan maka sebagai konsekwensinya pemilik barang dapat mengambil kembali barang yang sudah dijualnya itu jika barang tersebut masih ada, tapi kalau barang itu sudah tidak ada lagi ditangan pembelinya maka pemiliknya (penjual) dapat meminta ganti kepada pembeli tadi.

Nampaknya apa yang dimaksudkan oleh Imam al-Syafi'iy dan para pengikutnya dengan menuturkan lafadz yang jelas ketika terjadi *aqad*, bertujuan untuk menyatakan hak kepemilikan bahwa penjual benar-benar telah menjual barang yang dijualnya itu kepada pembelinya. Dengan demikian berarti hak kepemilikan dan penguasaan barang tersebut telah berpindah secara hukum. Sebagai dampak dari ketentuan ini maka bila terjadi persengketaan antara penjual dan pembeli, hakim dengan mudah dapat menetapkan bahwa barang tersebut sudah menjadi milik yang sah bagi pembelinya. Di sinilah pengertian apa yang ditegaskan ulama Syafi'iyah bahwa jual beli tidak sah tanpa *talaffuz*.<sup>81</sup> Pemahaman seperti ini dipertegas lagi oleh Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa dalam tataran hukum dunia penjual bisa saja mengambil kembali barang yang telah diserahkan kepada pembeli.<sup>82</sup>

Lain persoalan kalau yang sifatnya *mu'athoh* seperti upah, hibah, dan lain sebagainya. Menurut al-Syarbaini, bentuk *mu'athoh* itu adalah persetujuan dalam masalah harga barang yang ditawarkan, dan penyerahannya pun tidak diperlukan ijab dan qabul meskipun terkadang ada juga orang yang menggunakan

---

<sup>81</sup> Dengan pengertian ini berarti *Talaffudz* yang dimaksudkan itu adalah penegasan dari pihak penjual bahwa barang yang dijualnya itu benar-benar telah dijualnya. Bagi pembeli merupakan pengakuan yang jelas bahwa barang tersebut memang sudah dibelinya. Dalam tataran perdagangan penegasan dan pengakuan tersebut selalu dituangkan dalam bentuk surat-surat berharga yang menyatakan hak kepemilikan barang yang sudah diperjual belikan itu.

<sup>82</sup> Syekh Muhammad al-Syarbaini al-Khatib, *loc-cit.*

lafadz ketika dilakukan serah terima. Dalam kaitan ini menurut al-Syarbaini, dan al-Baghawi serta sejumlah ulama pengikutnya bahwa jual beli yang sifatnya mu'athoh tidak disyaratkan adanya penuturan lafadz<sup>83</sup> tetapi hanya dikembalikan pada adat kebiasaan setempat saja seperti halnya membeli rokok, gula, kopi, permen dan lain sebagainya. Ibnu Sarij dan Ruwani menambahkan bahwa jual beli secara mu'athoh ini hanyalah berlaku untuk sejumlah barang tertentu yang sifatnya sudah umum berlaku dipasaran. Tetapi terhadap barang-barang yang belum dikenal maka jual belinya tidak sah kalau tidak dengan *talaffudz*.

Lebih jauh lagi al-Syarbaini memberi contoh; Bila seseorang mengambil sejumlah barang - *dengan pola jual beli mu'athoh* – kemudian setelah lama waktu berselang baru diadakan perhitungan harga dengan mengacu kepada harga yang berlaku secara umum pada saat itu, maka jual beli semacam ini tidak sah, karena dia tidak termasuk jual beli mu'athoh dan tidak pula termasuk jual beli lafdzi.<sup>84</sup>

Sebagai konklusi dari pendapat ini adalah bahwa pemindahan hak kepemilikan melalui jual beli tanpa disertai suka sama suka maka jual beli tersebut batal, karenanya pemilik barang – dalam hal ini penjual – dapat mengambil kembali barang yang telah berada ditangan pembeli tersebut. Penunjukan suka sama suka itu haruslah dibuktikan dengan pengungkapan lafadz yang jelas sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak.

Dalam tataran aplikatif pengungkapan lafadz itu dapat dituangkan dalam bentuk surat-surat berharga yang menyatakan bahwa barang yang diperjual belikan itu telah dipindah tangankan

---

<sup>83</sup> Maksudnya jual beli mu'athoh seperti yang terjadi di mall super market atau diwarung-warung yang sifatnya jual beli barang-barang yang sudah biasa dilakukan dalam masyarakat tidak diperlukan adanya lafadz yang sharih (penuturan secara langsung) atau kinayah (dengan menggunakan surat-surat berharga) tetapi hanya dikembalikan pada adat kebiasaan yang berlaku disuatu tempat. Kalau suatu perbuatan yang dilakukan itu sudah dianggap jual beli maka sahlah jual beli tersebut.

<sup>84</sup> *Ibid.* hal. 4

dari penjual kepada pembelinya. Dalam hal jual beli tanah misalnya dikenal adanya Surat Keterangan Tanah (SKT), Akte Jual Beli, Sertifikat Tanah. Dalam hal pembelian mobil, ada Faktur pembelian, ada STNK, BPKB. Demikian pula dalam pembelian barang-barang berharga lainnya selalu ada surat-surat yang menyatakan pemindahan hak kepemilikan barang tersebut dari penjual kepada pembelinya.

Dengan adanya surat-surat berharga seperti tersebut di atas dapat dikatakan sebagai perwujudan dari sifat suka sama suka kedua belah pihak karena di dalam surat-surat itu telah dinyatakan secara jelas pemindahan hak kepemilikan dari barang yang diperjual belikan itu. Nampaknya pengertian Antaradin semacam ini yang dimaksudkan oleh ulama Syafi'iyah bahwa tidak sah jual beli tanpa talaffudz. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap hak kepemilikan yang dipindah tangankan melalui jual beli yang tidak disertai dengan prinsip suka sama suka termasuk jual beli yang tidak sah / batal.

Lalu bagaimana dengan ganti rugi tanah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah-tanah rakyat jika tidak didasari suka sama suka, apakah rakyat masih punya hak untuk menuntut agar hartanya itu dikembalikan?. Persoalan ini akan dicoba jelaskan pada uraian berikut ini.

## **2. Ganti Rugi Tanah Rakyat Oleh Pemerintah.**

Tanah termasuk hak Allah yang pengurusannya diemban oleh pemerintah (penguasa), karenanya pemanfaatan tanah oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum adalah sesuatu yang dibenarkan secara hukum, seperti pembuatan jalan, pembuatan pasar dan lainnya. Akan tetapi dilihat dari kepemilikan tanah tersebut ternyata tanah juga dapat dihakki secara individu. Oleh karena itu terhadap tanah ini terkandung dua jenis hak, yaitu hak Allah dan hak hamba. Dilihat dari fungsinya sebagai kebutuhan secara umum maka dia termasuk hak Allah yang dalam pelaksanaannya diwakili oleh pemerintah (penguasa). Namun



dilihat dari hak kepemilikannya, tanah juga menjadi hak hamba yang dalam pengelolaannya dihakki secara individu.

Oleh karena pada tanah itu terkandung adanya hak Allah yang meliputi kepentingan umum, dan juga terdapat hak individu anggota masyarakat, maka ketika terjadi dua hak yang berlawanan, maka kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan individu. Karena itu pemerintah berwenang untuk menggunakan tanah milik rakyat untuk kepentingan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan qaidah yang berbunyi;

الْمُتَعَدَّى أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ<sup>85</sup>

**Artinya:** Suatu perbuatan yang berdampak kepada kepentingan umum lebih diutamakan daripada perbuatan yang hanya berdampak kepada kepentingan individu.

Selain itu kewenangan penguasa menggunakan hak individu didasari pada kemaslahatan orang banyak. Dalam qaidah fiqhiyah dikatakan;

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>86</sup>

**Artinya:** Tindakan pemerintah terhadap rakyat haruslah disesuaikan dengan kemaslahatan.

Kedua qaidah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah punya kewenangan dalam menciptakan dan memelihara kemaslahatan umat. Untuk itu kepentingan individu atau kelompok dan golongan haruslah di kesampingkan manakala bersamaan dengan kepentingan umum termasuk kepentingan pribadi kepala pemerintahan itu sendiri. Dalam menjalankan kewenangannya

---

<sup>85</sup> Jalaludin Abdu al-Rahman bin Abi Bakr al-Sayuthy, *al-Asybah wa al-Nadhza-ir*, Maktabah Usha Keluarga, Semarang, tt. hal. 99

<sup>86</sup> Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Dar al-Qalam, Damsyiq, 1986 hal.138

pemerintah harus pula memperhatikan hak-hak individu tersebut. Artinya adanya kewenangan bukan berarti kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan hak-hak individu, karena itu diperlukan penyelesaian secara adil dan bijaksana agar tidak menimbulkan gejala sosial yang dapat mendatangkan kemudharatan bagi yang bersangkutan, sebab kalau hak-hak individu terabaikan sama sekali, bukan mustahil akan mendatangkan kemudharatan yang dampaknya lebih besar bahayanya daripada kemaslahatan yang ingin dicapai.

Di sini muncullah dua hal yang berlawanan. Disuatu pihak ingin menciptakan kemaslahatan orang banyak seperti pembuatan jalan atau pasar tadi, tetapi dipihak lain akan juga menimbulkan kemudharatan yang dampaknya akan berakibat secara umum, sebab kumpulan individu yang merasa haknya terganggu dapat membentuk suatu kekuatan yang berbahaya karena merasa diperlakukan tidak adil. Misalnya sawah rakyat diambil, padahal sawah menghasilkan padi sebagai makanan pokok, bila tidak ada penggantinya maka rakyat akan kekurangan makanan.

Kalaupun misalnya diganti dengan pembuatan sawah baru ditempat lain, namun mereka yang kehilangan sawah tadi tidak lagi dapat berusaha untuk kepentingan sanak keluarganya manakala mereka tidak mendapat bagian dari sawah tersebut sebagai pengganti sawah mereka yang hilang. Begitu juga rumah digusur, bila mereka tidak mendapat gantinya mereka akan kehilangan tempat berteduh yang pada gilirannya akan juga menjadi beban pemerintah. Demikian pula contoh - contoh lainnya selalu saja dapat menimbulkan kemudharatan yang dampaknya bukan hanya bagi individu-individu yang haknya diambil tetapi bisa meluas secara umum.

Bila hal itu terjadi maka pembentukan dan pemeliharaan kemaslahatan sudah berhadapan dengan terciptanya kemudharatan yang skalanya sama besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam qaidah fiqhiyah dikenal ketentuan;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>87</sup>

**Artinya:** Menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan daripada menciptakan kemaslahatan.

Berdasarkan qaidah tersebut pemerintah perlu terlebih dahulu menutup rapat-rapat kemungkinan-kemungkinan yang dapat menimbulkan kemudharatan tadi dengan cara mencari jalan keluar dari kesulitan individu sebagai akibat dari penghapusan haknya. Cara tersebut dapat dilakukan dengan mengganti hak-hak individu itu sesuai dengan peran dan fungsi hak tersebut bagi pemiliknya.

Selama ini langkah tersebut telah ditempuh oleh pemerintah yang dikenal dengan istilah *ganti rugi*. Akan tetapi dirasakan masih terdapat hal-hal yang kurang memenuhi tuntutan masyarakat disamping terkadang dirasakan juga adanya penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya dengan mengatasnamakan kepentingan umum ternyata untuk memenuhi ambisi pribadi, kelompok atau golongan tertentu dalam rangka memperkaya diri sendiri. Kondisi ini mengundang kecemburuan sosial hingga memuncak pada perampasan tanah negara oleh masyarakat seperti banyak terjadi diberbagai wilayah Indonesia terutama setelah bergulirnya bola reformasi baru-baru ini.

Masyarakat pada umumnya sangat memahami kalau kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Namun penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya perhatian terhadap prinsip-prinsip yang berlaku seperti prinsip suka sama suka (*'an taradhin*) sehingga memicu berbagai persoalan yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Persoalannya apakah tanah yang menjadi hak individu yang diambil alih penguasaannya oleh pemerintah tanpa adanya prinsip

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hal. 170

suka sama suka itu dapat dibenarkan secara hukum, dan apakah rakyat dapat menuntut pengembalian haknya itu.

Bila dilihat tanah sebagai hak Allah dan hak hamba yang secara aplikatif diserahkan kepada pemerintah dan rakyat secara individu atau lembaga non pemerintah, maka jelas rakyat memiliki hak penguasaan tanah yang dibenarkan secara hukum. Kepemilikan tanah tersebut tidak berbeda dengan hak kepemilikan harta lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam rangka ibadah kepada Allah. Oleh karena itu sejauh sistem perolehan hak itu dibenarkan secara hukum, seperti jual beli, waris, hibah, wakaf dan lainnya, maka kepemilikan barang tersebut menjadi hak individu yang sah.

Sebagai akibat dari keabsahan hak kepemilikan tersebut sudah barang tentu pemindahan hak kepemilikan kepada orang lain termasuk kepada pemerintah haruslah memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku termasuk prinsip suka sama suka. Meninggalkan prinsip ini akan memicu timbulnya permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan semua pihak.

Disadari bahwa bila pemanfaatan lahan pertanian diperuntukkan bagi kepentingan umum, pemerintah dibenarkan secara hukum untuk mengambil alih tanah tersebut, namun tentu bukan berarti hak individu hilang begitu saja karena pemerintahpun berkewajiban melindungi hak-hak rakyat. Peran pemimpin terhadap rakyatnya bagaikan peran wali bagi anak yatim. Imam al-Syafi'iy melukiskan hal ini dengan sebuah qaidah yang berbunyi;

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ<sup>88</sup>

**Artinya:** Peran pemimpin bagi rakyatnya bagaikan peran wali bagi anak yatim.

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hal. 122

Fungsi inilah yang mendasari kewenangan pemimpin untuk mengambil alih hak individu untuk digunakan kemaslahatan umat. Sebagai wali tentu akan melaksanakan yang terbaik serta menjaga agar tidak menimbulkan kesulitan dan kesusahan bagi yang dipimpinnya. Kalau tidak, berarti pemimpin telah melakukan sesuatu yang zalim terhadap orang yang dipimpinnya. Bila pemimpin telah melakukan kezaliman maka dengan sendirinya kewenangan khalifahnyanya menjadi gugur. Artinya seorang pemimpin tidak berwenang untuk mengambil hak rakyat manakala tindakannya akan merugikan rakyatnya karena perbuatan itu termasuk zalim. Ketentuan ini telah dinyatakan Allah dengan firman-Nya; (Q. S. al-Baqarah : 124)

وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ  
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (البقرة : 124)

**Artinya:** Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim".

Pernyataan Allah pada ayat tersebut menunjukkan bila pemimpin sudah melakukan kezaliman terhadap rakyat maka hak kekhalifahannya menjadi gugur, dan karena itu rakyat tidak punya kewajiban untuk mematuhi. Lebih jauh lagi orang-orang yang merasa haknya dirugikan dapat menuntut agar haknya dikembalikan. Ibnu Taimiyah - sebagai mana dikutip A.A. Islahi – mengatakan:

*secara yuridis syar'iy hak milik individu dapat menjadi subyek intervensi pemerintah, namun bagaimanapun hak*

*milik pribadi itu merupakan institusi dasar. Karena itu merupakan pikiran yang salah kalau menyebutkan hak negara di atas segala-galanya. Hak milik pribadi tidak boleh diusik, selama ia menggunakannya sesuai dengan syari'at. Eksploitasi oleh seseorang individu atau kelompok adalah tirani.*<sup>89</sup>

Pemanfaatan lahan tanah milik individu oleh penguasa diperlukan negosiasi yang bijak dan adil sebagai wujud tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat untuk mengayomi dan melindungi hak mereka. Tanggung jawab tersebut dapat berbentuk penghormatan terhadap hak-hak individu tadi, karena itu bila hak individu akan dipindahkan menjadi hak negara perlu adanya sikap sukarela (*taradhin*) dari pemilik hak disuatu pihak dan pemerintah dipihak lain. Kerelaan dari pemilik hak individu bisa terjadi karena yang punya hak mewakafkan, menghibahkan atau menjualnya. Kemungkinan yang disebutkan terakhir ini nampaknya dapat dijadikan sebagai analogi dari ganti rugi itu. Artinya pemerintah dapat mengambil alih hak kepemilikan individu menjadi hak negara dengan cara membelinya.

Jika analogi ini yang digunakan sudah barang tentu prinsip suka samasuka (*taraadhin*) tidak boleh diabaikan begitu saja. Mengabaikan prinsip ini berarti perampasan dan pemaksaan kehendak yang termasuk perbuatan zalim. Bila hal itu terjadi maka pemindahan hak dengan cara ganti rugi tanpa *taraadhin* menjadi tidak sah, dan karenanya pemilik hak individu itu dapat menuntut pengembalian haknya.

---

<sup>89</sup> AA Islahi, *op-cit*, hal. 146

# **BAB VI**

## **KESIMPULAN**

---

Berdasarkan urain pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sbb:

1. Pandangan Islam terhadap harta adalah :
  - a. Harta sebagai amanah Allah kepada hamba-Nya, karena pemilik hakiki dari seluruh harta adalah Allah Swt. Sedangkan manusia hanya pemilik majazi atau pemegang amanah.
  - b. Dalam pengelolaan harta, Allah memberikan kewenangan kepada hamba-Nya sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Untuk itu Islam mengakui adanya hak Allah dan hak hamba dalam kepemilikannya. Hak Allah diserahkan pengelolaannya kepada Negara sebagai pemegang amanah secara umum. Sedangkan hak hamba diserahkan kepada masing-masing individu sebagai hak individu, dan kepada masyarakat sebagai hak sosial.
  - c. Islam sangat menghargai hak individu, sehingga pemindahan hak individu itu kepada individu lainnya atau kepada Negara perlu adanya prinsip suka sama suka (taradhin).
2. Untuk menerapkan prinsip 'an taradhin dalam perspektif perdagangan kontemporer dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Mu'athah: Pada jual beli barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari, suka sama suka (taradhin) dapat dilihat dari tindakan penjual dan pembeli yang sudah menunjukkan sikap suka sama suka, serta adat kebiasaan yang berlaku disuatu daerah.
  - b. Talaffudz : dalam melaksanakan jual beli barang-barang berharga, seperti tanah, rumah, mobil dan lainnya, prinsip antarahin dapat dilihat dari pengakuan kedua belah pihak

(penjual dan pembeli) yang dibuktikan dengan adanya penuturan lafadz menjual dan membeli secara lisan, atau secara tulisan yang tertuang dalam bentuk surat-surat berharga dan bukti-bukti autentik lainnya, seperti sertifikat tanah, STNK dan BPKB pada mobil, akte jual beli dan lain sebagainya.

3. Sebagai implikasi prinsip antaradhin terhadap pemindahan hak kepemilikan dalam jual beli berdampak kepada sah dan tidaknya transaksi.
  - a. Jika dalam bukti-bukti tertulis tidak ditemukan prinsip suka sama suka antara pembeli dan penjual, maka pemindahan hak kepemilikan dengan jual beli menjadi tidak sah.
  - b. Ganti rugi tanah termasuk bagian dari mu'amalah, oleh karena itu diperlukan adanya prinsip suka sama suka (taradhin) antara pemerintah atau pengusaha dengan pemiliknya. Pengambil alihan hak milik tanpa adanya suka sama suka (taradhin) termasuk kezaliman, karenanya rakyat berhak mendapatkan penggantianannya atau menuntut pengembalian harta tersebut.

**WALLAHU A'LAM**



## DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Thaimiyah*, Terjemahan H. Anshari Thaiyib, Bina Ilmu Surabaya, 1997 .
- Al-Quran al Karim; Departemen Agama R.I. *Terjemahan al-Quran al-Karim*, Jakarta, 1987
- Al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th
- Al-Zanjani, *Takhrij al-Furu' ala al-Ushul*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1979
- Amrullah Ahmad, SF. Dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Islam Nasional*, Gema Insani Press, 1996
- Anwar A. Qodri, *Islamic Jurisprudence in the Modern World*, Lahore, 1973
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Fachrudin bin Muhammad bin Umar bin Husen al-Razi, *al-Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*, Jilid II, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1988
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997
- H.W. Spiegel, *The Growth of Economic Thought*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1971
- Hans Wehr, *The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, Spoken Language Services, inc*, Itasca, New York, 1976
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz II, al-Ma'arif, Bandung, tt.
- Masdar F. Mas'udi, *Hak milik dan ketimpangan sosial, Telaah sejarah dan kerasulan dalam kontekstualisasi dokterin Islam*, Editor Budhi Munawar Rachman, Yayasan Paramadina, 1994

*Panji Masyarakat*, No. 01 Th. IV tgl. 26 April 2000

RM Mac Iver and Charles H. Page, *Society and Introductory analisis*, Macmillan & Co. Ltd. London 1961

Rohi Baalbaki, DR. *al-Mawarid A, Modern Arabic – English Dictionary*, Dar al-Ilmy Li al-Malayin, Beirut, Lebanon 1997

Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Dar al-Fikr, Beirut, 1986

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff, *Sociology*, Edisi ke 4 – A bagian ke 7 Feffer and Simons Internasional University Edition, 1964.

-----, *Sosial Change*, Viking Press, New York, 1922

William M. Newman, *The Social Meaning of Religion*, Chicago, Rand McNally College Publishing Company 1974

Yusuf Qardhawi *al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyat ma'a Nazariyatin Tahliliyat fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1985

-----, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishod al-Islamy*, alih bahasa, Didin Hafidhuddin, dengan judul *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Rabbani Press, Jakarta, 1997

Zainal Asikin, SH. SU. *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**MOHAMMAD RUSFI** ; Lahir tanggal 15 Pebruari 1959 di Ambuliyoh, Olok Pandan Waisindy Hanuwan, Kecamatan Karya Penggawa Krui, Kabupaten Pesisir Barat – Propinsi Lampung. Tammat SD (1971) di Olok Pandan Krui, Madrasah Tsanawiyah al-Syukuriyah di Tardana Waisindi Krui (1974), Madrasah Tarbiyah Islamiyah Syek Muhammad Jamil Joho Padang Panjang Sumatera Barat (1976), Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang (1980), S1 Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang (1984), S2 IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (2001) S3 IAIN Raden Intan Lampung (Penyelesaian Disertasi)

Mulai berkiprah di dunia pendidikan sebagai guru agama SMA Baiturrahmah Padang (1983-1985), Asisten Dosen Ilmu Falak pada Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang (1984-1986), Dosen tetap Ilmu Ushul Fiqih Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung (1986-sekarang), Pernah mengajar di Diniyah Taqwa Tanjungkarang (1985-1990), SMA Nusantara Tanjungkarang (1986-1990), SMEA Trisakti Tanjungkarang (1989-1995), Fakultas Syari'ah Darussalam Tegineneng Lampung Selatan (1990-1996). Kepala SMA Pemuka Bandar Lampung (1994-1997).

Karya-karya Ilmiah dan penelitian yang pernah ditulis dan dipresentasikan antara lain;

1. Methoda Dakwah Islamiyah (1990),
2. Asuransi Jiwa Jama'ah Haji (1992),
3. SDSB Ditinjau dari Berbagai Aspek (1992)
4. Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam Kajian masa kini (1993),
5. Mengantisipasi Pengaruh Negatif Globalisasi dengan Memahami Islam secara Kaffah (1994)
6. Tinjauan Syari'at Islam tentang Operasi Ganti Kelamin (1994)

7. Peluang dan Tantangan Dakwah dalam Pembinaan Generasi Muda (1994)
8. Kecenderungan Masyarakat Muslim Bandar Lampung dalam Pembagian Harta Warisan (Penelitian Kolektif : 1995).
9. Korelasi antara Tasawuf dengan Ilmu Pengetahuan Manusia (1997)
10. Profil Ulama Propinsi Lampung (penelitian Kolektif : 1997).
11. Mafhum Mukhalafah sebagai Methoda Istimbath Hukum Islam: *Studi Komparatif antar golongan*, (1998),
12. Profil Majelis Taklim di Bandar Lampung (Penelitian mandiri : 1998)
13. Perkawinan antar Agama (1998)
14. Perkembangan Thoreqat dan Tasawuf di Indonesia (2000)
15. Ilmu Ushul Fiqih (2009)
16. Fiqih Ibadah (2010)
17. Ilmu Tauhid (2010)
18. Membangun Keluarga Sakinah dalam perspektif Syekh Abdul Qodir Jailani (Penelitian mandiri 2015)
19. Berbagai makalah dan tulisan di majalah dan koran.
20. Pengasuh pengajian dengan materi Fiqih, Tauhid dan Tasawuf setiap malam selasa sampai malam sabtu di Pondok Pesantren Arafah Jl. Rambutan Hajimena-Natar Lampung Selatan.
21. Mengisi pengajian di beberapa masjid di Bandar Lampung
22. Mengisi pengajian tafsir al-Quran dan kuliah subuh setiap pagi Khamis dan pagi Jum'at di RRI Tanjungkarang (dari tahun 2000 – 2014)